

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN**

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

**Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh,
Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
1 Maret 2018**

**KARAKTER DAN MUATAN
BUDAYA POLITIK BANGSA**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam yang dilaksanakan pada 1 Maret 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Ahmad Farhan Hamid, Syamsul Bahri, Arif Budimanta, KH. Amidhan, Sholeh Amin dan Otong Abdurrahman.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Bali. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------|-----|
| SAMBUTAN..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| PENGANTAR..... | 1 |
| RANGKUMAN | 3 |
| NOTULENSI | 6 |

LAMPIRAN 1- MAKALAH

| | |
|---|----|
| 1. TUHA PEUT DI ACEH Oleh : <i>Ahmad Syai, S.Pd., M.Si</i> | 14 |
| 2. KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA Oleh : <i>Drs. Ampuh Devayan</i> | 20 |
| 3. KARAKTER DAN BUDAYA POLITIK BANGSA Oleh : <i>Barlian AW</i> | 34 |
| 4. KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA Oleh : <i>Dedy Afriadi, M.Sn</i> | 38 |
| 5. KARAKTER DAN MUATAN POLITIK Oleh : <i>Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA</i> | 41 |
| 6. KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA Oleh : <i>Drs. H. Jailani Ahmad, MM</i> | 44 |
| 7. PERAN SENI BUDAYA DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA INDONESIA Oleh : <i>Mirza Irwansyah, Ph.D</i> | 51 |
| 8. KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA; TRADISI ME'BU DI ACEH Oleh : <i>Maisarah, S. Pd.I, MA</i> | 62 |

| | |
|---|-----|
| 9. MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA POLITIK BANGSA BERBASIS KEARIFAN LOKAL | |
| Oleh : <i>M Adli Abdullah.</i> | 66 |
| 10. REVOLUSI MENTAL, SEBUAH KEHARUSAN MEMPERBAIKI KARAKTER BUDAYA BANGSA | |
| Oleh : <i>Nab Bahany As</i> | 75 |
| 11. INTERNALISASI NILAI KARAKTER DALAM BUDAYA POLITIK BANGSA SEBAGAI PROSES PENGUATAN SISTEM NILAI | |
| Oleh : <i>Dr. Rusli Yusuf, M.Pd.</i> | 81 |
| 12. KARAKTER DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH BESAR DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | |
| Oleh: <i>Dr. Samsul Bahri, M.Pd</i> | 90 |
| 13. MEMBANGUN KARAKTER POLITIK BANGSA (TINJAUAN DARI ASPEK PENDIDIKAN) | |
| Oleh: <i>Dr. Silahuddin, M.Ag</i> | 99 |
| 14. KEMAJEMUKAN SEBAGAI PILAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | |
| Oleh: <i>Dr. Saiful, S.Pd., M.Si</i> | 114 |
| 15. KEPEMIMPINAN DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ACEH | |
| Oleh: <i>Drs. Mawardi Umar, M. Hum., MA</i> | 119 |
| 16. POKOK-POKOK PIKIRAN : KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA | |
| Oleh : <i>Dr. T.M. Jamil, M.Si</i> | 131 |
| 17. PERAN SASTRA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA | |
| Oleh : <i>Dr. Wildan, M.Pd</i> | 140 |
| 18. PEUTUA BEUNA, MITOS RAJA YANG BIJAKSANA | |
| Oleh: <i>Drs. Yusri Yusuf, M.Pd</i> | 146 |

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Para pendiri negara sangat menyadari bahwa politik pembangunan negara Indonesia harus terbentuk dari budaya bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelembagaan politik dan pola interaksi politik telah tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia. Soepomo pada rapat BPUPK menyatakan:

“Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschiedte) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa jang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan tjorak masjarakatnja. Oleh karena itu, politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan “sociale structuur” masjarakat Indonesia jang njata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya”.

Ironisnya kajian-kajian kelembagaan politik, pola interaksi politik dan perilaku politik dalam perspektif budaya bangsa Indonesia dapat dikatakan langka dalam khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Seakan-akan sejarah panjang kerajaan-kerajaan dan masyarakat adat di Indonesia minim warisannya dalam budaya politik.

Padahal masyarakat adat di seluruh nusantara sangat kaya dengan konsep-konsep pengambilan putusan, sistem pemerintahan, mekanisme perwakilan, mekanisme pemilihan pemimpin, termasuk pedoman perilaku politik dan kompetisi politik.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 terdapat setidaknya 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kelompok etnik (*etnichal group*) atau suku bangsa yang mendiami bumi Indonesia. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Artinya, akan didapati banyak sekali warisan budaya dalam konteks politik tersebut baik dalam bentuk konsep, nilai maupun aktualisasi dalam praktek.

Diskusi dan kajian yang masif dan komprehensif semakin dirasakan penting jika melihat fakta bahwa kemajemukan dan keanekaragaman budaya bisa merupakan sesuatu hal yang positif dan negatif sekaligus.

Anggapan positif jika kemajemukan ini berhasil diformulasi untuk berbagi kekayaan yang dikandung dalam tiap budaya. Sedangkan anggapan negatif terjadi karena perbedaan budaya telah menjadi akar dari berbagai konflik. Anggapan kedua tersebut sekarang ini menjadi semakin terbukti sejak era informasi yang membuat peningkatan interaksi dan gesekan antarbudaya yang menyebabkan meningkatnya berbagai ketegangan, tarikan dan klaim yang terkait identitas yang dapat menjadi sumber perdebatan potensial.

Oleh karena itu, tantangan mendasar bagi para pembentuk kebijakan, budayawan dan berbagai elemen masyarakat adalah bagaimana menawarkan suatu visi yang koheren mengenai arti keanekaragaman budaya yang dapat menjelaskan bagaimana hal itu dapat bermanfaat untuk aksi masyarakat dan bukan sebagai ancaman.

RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, Kamis, 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut.

1. Perlu ada politik dan strategi kebudayaan yang jelas dan tegas guna merevitalisasi budaya dan adat yang semakin tergerus oleh proses modernisasi. Ada keprihatinan peserta FGD atas dampak modernisasi dan globalisasi yang tidak sesuai dengan karakter dan tradisi budaya bangsa dan makin luntarnya penghargaan atas kebudayaan sendiri khususnya pada generasi muda.
2. *Local wisdom* yang sering disebut dengan pengetahuan lokal (*local knowledge*), atau (*local genius*), yaitu kecerdasan masyarakat lokal menyikapi berbagai hal terkait sistem organisasi, sistem kekerabatan, sistem teknologi, sistem ekonomi, ilmu pengetahuan serta cara pandang terhadap kehidupan belum menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan bangsa (politik, budaya, pendidikan, lingkungan dan bidang lainnya) dan cenderung terabaikan. Padahal, nilai-nilai budaya lokal sebagaimana *Gampong* dan *Mukim* serta kisah *peutua beuna* di Aceh, jika direvitalisasi, masih cukup relevan diterapkan dalam kehidupan modern.
3. Dalam bidang ketatanegaraan, di Aceh, kepemimpinan lokal dan satuan hidup dan pemerintahan masih merujuk pada model lokal seperti *gampong* (sering disetarakan dengan desa), yang dipimpin oleh seorang *keuchik*. Pemerintahan di tingkat ini dilaksanakan bersama oleh perangkat yang terdiri dari *keuchik* (eksekutif), *tuha peut* (legislatif), dan *teungku imum meunasah* (agama). Model ini sempat dihapuskan sejak penerapan UU Desa (No 5/1979) tetapi kembali lagi sejak UU Pemerintahan Aceh (No 11/2006). Hal ini menunjukkan

bahwa faktor hukum menjadi krusial dalam strategi dan politik revitalisasi budaya.

4. Meski begitu, revitalisasi kebudayaan juga harus dilakukan secara terencana dan kehatian-hatian agar tidak muncul ekses. Desentralisasi dan demokrasi di era reformasi memang memberikan ruang cukup luas bagi pemajuan kebudayaan lokal (daerah). Namun, fakta lain menunjukkan, identitas lokal, ikatan primordial dan sentimen agama, etnis, dan adat, menjadi alat politik yang menjadi pemicu konflik sosial (van Klinken, 2007). Budaya daerah belum menjadi sumber inspirasi dan nilai bagi pembangunan karakter bangsa, selain hanya menjadi ikatan baru bagi satuan satuan politik di tingkat lokal yang bertarung demi kekuasaan.
5. Terdapat kritik bahwa proses pendidikan kita selama ini hanya mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan berpikir semata. Sedang pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa kurang diperhatikan. Padahal kita memerlukan manusia-manusia berkarakter dan itu harusnya dilakukan lewat proses pendidikan. Pembangunan karakter bangsa bisa dilakukan salah satunya melalui seni budaya. Untuk itu muncul usulan untuk menjadikan seni budaya sebagai pendidikan wajib pada setiap institusi pendidikan dengan karakter muatan lokal dimana institusi pendidikan itu ada.
6. Ada kegundahan juga terkait dengan praktek politik kita yang dinilai belum menunjukkan karakter budaya politik yang sesuai dengan nilai budaya bangsa. Hal itu dinilai muncul karena kegagalan partai politik (parpol) melakukan pendidikan politik bagi warga dan gagal juga mewujudkan perannya menghasilkan kader-kader atau calon pemimpin yang bersih. Hal itu karena kelembagaan Parpol sendiri dinilai sebagai salah satu institusi paling korup dan tidak transparan. Parpol hanya menjadikan dirinya sebagai kendaraan bagi pihak-pihak yang ingin berkuasa. Oleh karena itu, ke depan, parpol dituntut lebih berperan dalam pembentukan budaya politik yang sehat.

7. Terdapat sejumlah pembicara yang menyoroti soal peran elit pemimpin dalam membangun budaya dan karakter bangsa. Elit dinilai belum mampu memberikan keteladanan karakter dalam kebijakan-kebijakannya di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, hal yang urgen dilakukan dalam kerangka pembentukan karakter dan budaya bangsa yang baik adalah dengan memperbaiki sistem rekrutmen para elit yang selama ini disinyalir masuk dalam sirkulasi elit lewat cara-cara yang kurang sehat seperti faktor modal.
8. Muncul pemikiran bahwa demokrasi yang dikembangkan saat ini terlalu liberal dengan dominannya kebebasan individual dan menghilangkan persaudaraan kolektif. Konsep demokrasi yang dikembangkan terlalu “Menuhankan manusia” karena kekuasaan tertinggi diletakkan pada manusia. Karenanya, proses pembentukan budaya dan sistem politik harus dikembalikan pada konsep-konsep dasar yang ada dalam Pancasila yaitu ketuhanan (agama), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis, 1 Maret 2018

Narasumber 1; Prof. Dr. Darwis Sulaiman

- Berbicara soal budaya, tidak bisa dilepaskan dengan pembicaraan mengenai adat, hukum-hukumnya, institusinya dan pelaksananya. Pelaksana adat di Aceh, memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dan dalam pelaksanaannya, sangat kental watak demokratisnya.
- Karakter lainnya, di Aceh, adat dan hukum tidak bisa dipisahkan dan salah satu karakter adat dan hukum adat di Aceh adalah adanya ditematkannya hukum agama, dalam hal ini Islam, lebih tinggi dari adat beserta hukum-hukumnya. Bahkan, bisa dikatakan Islam membentuk karakter adat orang Aceh.
- Di Aceh, ada lembaga Gampong dan Mukim yang merupakan lembaga penjaga tradisi dan penegak hukum-hukum adat yang sudah ada sejak abad ke-16. Namun dalam perkembangannya, lembaga ini terkesan kurang berhasil menghadapi arus modernisasi dengan segala problematikanya.
- Perlu ada politik dan strategi kebudayaan yang jelas dan tegas guna merevitalisasi budaya dan adat yang semakin tergerus oleh proses modernisasi
- Politik dan strategi kebudayaan untuk Revitalisasi adat Aceh yang ada saat ini adalah lewat perangkat HUKUM (Qanun).

Narasumber 2; Prof. Dr. Farid Wajdi, MA

- Pendidikan kita selama ini hanya mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan berpikir. Sedang pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa kurang diperhatikan.

Padahal kita memerlukan manusia-manusia berkarakter dan itu harusnya dilakukan lewat proses pendidikan.

- Di bidang politik, kita melihat dampak dari kurangnya karakter dan muatan budaya bangsa. Yang terkesan saat ini, politik kita saat ini kejam, kotor, dan lain-lain. Banyak praktek-praktek politik yang tidak terpuji seperti korupsi, perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, hukum yang terbang pilih, ekonomi yang memperkaya kelompok sendiri dan tidak mensejahterakan rakyat.
- Mengapa hal itu terjadi? Ada budaya buruk yang dipelajari sejak kecil yaitu kalah jadi abu, menang jadi arang, mau menang terus. Politik kita itu harus “membunuh” yang lain.
- Akhirnya Budaya Politik kita yang terbentuk adalah, jika sudah menang, sudah beres persoalannya. Segenggam kekuasaan, lebih baik daripada segenggam kebajikan.
- Hal itu menimbulkan semacam alergi orang untuk berpolitik. Padahal Alexis atau Dolly itu hancur karena ada faktor kekuasaan.
- Pemimpin harus berkarakter. Politik itu haruslah sebuah proses. Kepemimpinan tidak bisa instant.

Narasumber 3; Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA

- Seni dan Budaya berperan dalam membangun karakter;
 - a. Seni Budaya sebagai perekat persatuan bangsa.
 - b. Seni budaya sebagai nafas kebersatuan dan kebangsaan.
 - c. Seni budaya merupakan pondasi kekuatan bangsa untuk menahan dan menghadapi serbuan negatif globalisasi yang cenderung melemahkan *social capital* bangsa Indonesia.
 - d. Sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa agar terciptanya insan seni yang memiliki semangat bekerjasama membangun bangsa yang beradab dan bermartabat.

- Ada 4 (empat) nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, meliputi
 - a. **AGAMA** Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama.
 - e. **PANCASILA**. Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni.
 - f. **BUDAYA**. Tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap kehidupan pribadi dan bermasyarakat.
 - g. **TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL**. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Nab Bahany, As

- Revolusi Mental harus ditindaklanjuti. Revolusi Mental bukan sekedar jargon.
- Budaya Politik saat ini adalah Budaya Politik “Penjarahan” dalam mencapai kekuasaan (sikat menyikat, dengki mendengki), sangat tidak sehat.

Barlian AW

- Bapak Darwis menjelaskan nilai-nilai adat Aceh lama, sekarang banyak, terutama anak-anak muda Aceh, yang tidak memahaminya.
- Contoh Meunasah. Dia bertingkat. Ada bagian bawah (ruang pembicaraan publik) tapi semua masalah di selesaikan di bagian atas. Sekarang di atas sibuk berkonflik karena ruang bagian bawah tidak ada lagi.
- Kajian nilai-nilai politik simbolik budaya Aceh (meunasah), enam pilar masyarakat Aceh, terkait dengan budaya politik. Musafat, Mufakat, Kerabat, Muhadat (adat memperkuat agama, agama membersihkan adat). Sangat terkait dengan Empat Pilar.

Dr. Wildan, M.Pd

- Bangsa kita berbasis sastra. Sumpah Pemuda itu sebuah puisi. Reformasi juga penuh puisi.
- Untuk membangun peradaban, pelajarylaha karya-karya sastra.

Dr. Samsul Bahri, M.Pd

- Bagi masyarakat Aceh, budaya tidak bisa dipisahkan dari Adat dan Adat Istiadat. Namun ada pandangan, adat dan adat istiadat Aceh sudah tergerus oleh tsunami.
- Beberapa adat kebiasaan hilang, misal, mengaji di Meunasah.
- Musyawarah. Kecik (kepala desa) dulu bisa gerakkan masyarakat untuk gotong royong, sekarang tidak lagi.
- Ada pergeseran, dan sulit diwujudkan kembali.
- Bagaimana soal politik dinasti, dimana orangtua menurunkan kekuasaan pada anak. Ini riil ada di masyarakat.

Dr. T.M. Jamil, M.Si

- Kita bersama, tapi ada dalam kesendirian. Misalnya, satu keluarga memakai hape. Ini bisa diletakkan pada level nasional.
- Kita tidak konsisten. Pada pemimpin yang konsisten, kebijakan konsisten.
- Ulama itu mewarnai orang, jangan diwarnai. Ulama harus menjadi panutan. Karakter menurut pada ulama.

Syera Fauzya Lestari, S.Pd., M.Sn

- Bagaimana kita melihat posisi budaya lokal? Dalam budaya terkandung unsur seni, (makalah)

Dr. Rusli Yusuf, M.Pd

- Persoalan bangsa kita saat ini adalah persoalan moralitas. Kita kurang komitmen pada moralitas yang sudah kita miliki.
- Budaya politik transaksional. Ini karakter budaya politik yang jauh dari karakter asli bangsa kita.
- Karakter kita terjadi karena reformasi dan amandemen. Kita menjadi liberal. Kebebasan dominan, persaudaraan dihilangkan.
- Konsep demokrasi kita menghilangkan tuhan. Demokrasi kita “menTuhankan” manusia. Kekuasaan tertinggi ada pada manusia, individualisme.
- Mari kita kembalikan roh pengembangan peadaban pada konsep-konsep dasar bangsa kita (Pancasila).

Drs.Mawardi Umar, M.Hum

- Kearifan lokal masyarakat Aceh mungkin bisa menyumbang bagi praktek demokrasi liberal yang kini diterapkan.

Ampuh Devayan

- Persoalan hari ini, bangsa kita masih carut marut karena karakter kita masih rapuh. Ini persoalan kita.
- Ada peran lembaga pendidikan, belum mampu memperkuat karakter.
- Pembentukan karakter kita lebih bersifat instruktif-kewajiban, bukan internalisasi nilai-nilai.
- Karakter dibangun dari atas, dari pemimpin, ilmu. Bagaimana kita dipimpin oleh yang lebih bodoh dari kita? Ketika kita dipimpin oleh orang bodoh, bangsa kehilangan karakter.
- Di level masyarakat, kita masih dalam masa transisi, bodoh tidak, pintar tidak.
- Pembentukan karakter, ketahanan sosial, dibangun dari dirinya, dari keluarga, rumah.

Syamsudin

- Pendiri bangsa dan pemangku kebijakan selalu berbeda dalam memahami masalah soal Aceh.
- Perbedaan muncul dari kultur yang berbeda. Perbedaan kultur menyebabkan perbedaan pemahaman dan perbedaan ekspresi. Barat, orang Indonesia dan Orang Aceh bisa berbeda dalam memahami satu fenomena yang sama.

Prof. Yusni Sabi, Ph.D

- Kenapa kita tidak kunjung membaik; karena pemimpinnya belum menjadi teladan. Kita revolusi, reformasi, tapi belum membaik karena faktor kepemimpinan.
- Kalau kita mau baik, maka perbaiki sistem rekrutmen elit yang bisa menjadi teladan. Selama ini pemimpin direkrut karena faktor-faktor terbatas; banyak uang, paling keras suara, dll.

Dr. M. Adli Abdullah, SH. MCL

- Karakter bangsa yang berbudaya.
- Pemimpin yang baik dibentuk dengan aturan yang baik. Masalah kita, aturannya belum baik.
- Keluarga, Pendidikan, keteladanan. Ini hancur semua. Keluarga dihancurkan LGBT, pendidikan, pendidik diganggu problem-problem administrasi, mengejar scorpus, tidak baca-baca, keteladanan pemimpin tidak ada; mazhab machiveli, hedonis, tidak ada lagi tokoh bangsa. Pemimpin; ulama, orang kaya, penguasa.
- Bagaimana membangun budaya politik yang sehat; apatis, mobilisasi, partisipatif. Sekarang kita budaya politik apatis dalam membangun bangsa.
- Harus jelas arah pembangunan bangsa kita kemana? Dulu arah pembangunannya karakter, kemudian ke pembangunan fisik, sekarang ingin kembali ke budaya. Arahnya harus berkelanjutan.

Drs. Jailani Ahmad, MM

- Budaya politik dipengaruhi oleh nilai-nilai: adat istiadat, agama, budaya bangsa, dll.
- Banyak aturan yang tidak bisa diterapkan, tidak memiliki kepastian, sehingga politik kemudian adalah politik membunuh karakter, kekuasaan bergerak sendiri tanpa aturan.
- Politik kita dicerai oleh elit pemimpin. Misal, tidak diakuiinya suatu golongan, terlalu memojokkan satu golongan dan melakukan pembiaran pada golongan yang lain. Ulama semakin dimusuhi, pelanggaran UU terjadi dimana-mana, tidak ada penegakan hukum, isu-isu sensitif bagi masyarakat (PKI) dibiarkan mengambang.
- Elit pimpinan mempertontonkan budaya yang tidak patut dipertontonkan.
- Politik Indonesia saat ini diwarnai partisipasi masyarakat yang tinggi; ini karena kondisi pemimpin yang memperhatikan, politik pencitraan (mengelabui masyarakat, bukan diri yang sebenarnya, artifisial).

- Bagaimana kita bisa menciptakan sistem pemilihan pemimpin yang baik. Money politics, dll. Perlu ada aturan hukum dengan sanksi yang tegas jika tidak mau anarkis.
- Budaya sebagai perekat. Budaya diarahkan ke budaya industrial.

Dr. Silahuddin, MA

- Pendidikan politik harus sejak usia dini, bagi politisi, itu sudah terkontaminasi.
- Kita tidak punya pola kebijakan, ganti pemimpin berganti pola.

Dr. Bahrun, M.Pd

- Kalau karakter baik, orang baik, maka budaya politik akan baik.
- *Best practice* pendidikan karakter; program guru Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia – guru, menyiapkan guru yang baik untuk pendidikan karakter.

TUHA PEUT DI ACEH

Oleh : Ahmad Syai, M.Sn.

Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. *Tuha Peut Gampong* atau nama lainnya adalah unsur pemerintahan *Gampong* yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan *Gampong*. *Tuha Peut* hanya ada di Aceh, dan setiap desa yang ada di Aceh memiliki lembaga ini. *Tuha Peut* sangat kompleks tugasnya mulai dari urusan agama hingga ekonomi pembangunan desa.

Tuha Peut, awalnya terdiri dari empat orang yang sudah dipilih oleh masyarakat dalam suatu desa, namun sekarang *tuha peut* terdiri dari 5 orang. Ini adalah perkembangan yang terjadi dalam personil *tuha peut* itu sendiri. *Tuha Peut* terdiri dari 4 suku diantaranya *suke toh batee* dari Timur Tengah, *Suke Ja Sandang* dari India, *Suke Imum Peut* dari Cina dan *Suke 300* dari nusantara (Jawa, Sumatera, Padang, Banjar dan lain-lain).

Secara politis jabatan *tuha peut* memiliki prestise yang berbeda di masyarakat. Di samping tugas yang sangat berat, banyak urusan di tingkat desa selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh *tuha peut*. *Tuha Peut* memang harus melayani masyarakatnya dengan segala kondisinya pula. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Daeng (2000: ix) menyatakan setting masyarakat yang berubah merupakan kondisi objektif penting dalam proses pendefenisian kebudayaan. Sebuah konsep tidak hanya merupakan suatu alat untuk memadatkan sejumlah nilai, tetapi juga suatu alat yang digunakan secara praktis untuk menata kehidupan sosial”. Kondisi inilah yang mengakibatkan adanya penyelesaian sosial dan budaya yang dilakukan oleh *tuha peut* dalam menjalankan roda pemerintahan di desanya masing-masing.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *tuha peut* merupakan perangkat desa yang siap dalam segala situasi oleh karena itu menarik kiranya dibahas apa yang dilakukan *tuha peut*, bagaimana fungsinya

dalam ranah pemerintahan desa dan siapa saja yang berada pada posisi *tuha peut* di desa.

TUHA PEUT

Adalah jabatan eksekutif di desa-desa wilayah Aceh. Jabatan *tuha peut* untuk perangkat desa. Wewenangnya begitu besar, karena untuk menjadi *tuha peut* juga butuh orang-orang yang mengerti visi dan misi desanya sehingga pemikirannya dapat mewarnai kemajuan desa ke depan. *Tuha peut* juga harus berkarakter, artinya orang yang menjabat sebagai *tuha peut* sedikit banyaknya dapat menjadi contoh bagi masyarakat di desanya. Memiliki pengetahuan yang baik, bijaksana, mampu berkomunikasi dengan siapa saja dan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat siap siaga dalam segala keadaan di desanya.

Tuha Peut, merupakan *local wisdom* yang dapat diterapkan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugasnya adalah a). membahas dan menyetujui anggaran pendapatan belanja Gampong. b). Membahas dan menyetujui qanun Gampong. c). Mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong. d). menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. e). Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama *Keuchik*. f). Memberi nasihat atau pendapat kepada *Keuchik*. g). Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. (Pasal 18 Qanun Nomor 9 Tahun 2008).

Semakin mengerucut kiranya tugas *tuha peut* yang ada pada tiap-tiap desa di Aceh. Ada berbagai macam kondisi yang selalu dihadapi oleh *tuha peut* itu sendiri. Sosok-sosok yang sangat tegar, santun, berkarakter, dan mampu memberikan pemahaman kepada semua warga masyarakat.

Tuha peut juga memiliki wewenang yaitu: a) Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. b). Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. c), mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat. d). Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan

dengan syari'at Islam. e). Menerapkan ketentuan adat. f). Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. g). Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan h). Menegakkan hukum adat.

Komplek sekali tugas sebagai *tuha peut*, namun di desa sepertinya jarang terjadi benturan yang dahsyat antara *tuha peut* dengan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa semua warga taat akan aturan dan norma yang berlaku. Peursen (1988: 48) menyatakan "Nilai-nilai dan norma-norma seolah-olah merupakan polisi lalu lintas yang mengatur masyarakat".

Pernyataan di atas semakin jelas bahwa, norma dan nilai yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu akan terus dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika norma dan nilai yang telah ada selalu dirawat dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, akan memudahkan masyarakat menerima semua kondisi yang ada. Namun sebaliknya, jika norma dan nilai-nilai yang berlaku pada suatu masyarakat tidak dapat dijalankan dengan baik, maka keresahan akan muncul dan semua orang yang berada di wilayah tersebut akan merasakan ketidaknyamanan. Pada kondisi inilah *tuha peut* dituntut untuk menyelaraskan apa yang harus dilakukan dan kebijakan yang seperti apa yang harus diberlakukan.

Dari berbagai kasus yang pernah muncul di desa, agresifitas *tuha peut* dengan segala kemampuannya selalu diberikan sehingga semua masalah dapat diatasi dengan baik, tanpa harus bersinggungan dengan yang lainnya. Contoh tersebut sebenarnya riak-riak kecil yang terus berlangsung di desa, riak-riak kecil juga berlangsung di tingkat yang lebih tinggi sampai pada tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lembaga Tinggi Negara yang sampai saat ini menyedot perhatian publik dengan segala permasalahannya.

MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki segala kewenangan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negaranya, namun akhir-akhir ini lembaga tinggi negara ini seperti kurang mewakili aspirasi rakyat Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh, ketika rapat berlangsung, banyak sekali kursi-kursi kosong, kemungkinannya ada dua yaitu sedang berada di lapangan untuk

menyelesaikan tugas kenegaraan dan sengaja tidak hadir karena kondisi yang lain.

Ini yang terjadi saat ini, disaat permasalahan yang muncul membutuhkan penyelesaian, disaat itu pula perbedaan cara pikir muncul dan saling ribut serta saling tinju, memberikan contoh buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbeda cara pikir dan berbeda penyelesaian, namun di tingkat desa jarang terjadi kondisi kekerasan, adu argumen itu biasa, tetapi adu kekerasan tidak pernah terjadi. Maka tinjauan yang menyeluruh sangat perlu dilakukan untuk menjadi anggota legislatif. Tingkat pendidikan turut mewarnai kedewasaan berpikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin baik pula analisis dan cara pikirnya, harapan yang lebih baik tentunya harus dimiliki oleh para elit.

Kontjaraningrat (1998: 173) menuliskan seorang pemimpin memiliki 3 unsur penting untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu: (1) kekuasaan, (2) Kewibawaan, dan (3) popularitas. Walaupun kedua unsur pertama umumnya dianggap sebagai unsur-unsur yang terpenting, tanpa unsur yang ke tiga, seorang pemimpin tidak adapat melaksanakan kepemimpinannya dengan baik dan mantap. Ketaatan pada seorang pemimpin yang tidak populer adalah ketaatan yang didasari sikap takut, atau karena secara adat resmi telah mendapat kewenangan.

Dalam bahasa sehari-hari kedua unsur yang sering kali dikacaukan, harus dibedakan dengan tajam. Ada pemimpin yang memiliki kekuasaan yang besar, tetapi sebaliknya tidak arif dan bijaksana dan tidak memiliki wibawa, sebaliknya ada pula pemimpin yang diakui masyarakat sebagai orang yang berwibawa, arif dan bijaksana tetapi tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Untuk menganalisa ketiga unsur kepemimpinan tersebut di atas, kita harus melihatnya dari segi hubungan antarmanusia.

Perlu adanya pemikiran yang menyeluruh dan analisis kebutuhan yang lebih terhadap keberlanjutan MPR. Kiranya ini hanya sebagai pemikiran yang sangat pendek, mungkin dapat dialihkan dalam bentuk yang lain, sehingga biaya (financial) tidak perlu dikeluarkan terlalu tinggi, sudah saatnya hidup hemat dilakukan. Untuk apa membuang uang yang begitu banyak sementara hasil kerja

para pemimpin masih belum dapat dilihat secara riil. Korupsi di segala sektor, ini menunjukkan bahwa semua sedang dalam kondisi kritis, perlu pemulihan dengan segera. Budaya (seni) memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kondisi ini.

Sudah saatnya perubahan itu dilakukan sehingga tidak harus mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk memberikan gaji pada lembaga tinggi negara tersebut, perlu ada badan khusus yang menggantikan dan lebih efektif dan efisien secara keuangan. Mungkin tawaran sederhana seperti yang terdapat pada desa-desa di Aceh dengan membentuk badan khusus seperti *tuha peut* yang dapat memberikan rasa aman, solusi dan tindakan yang nyata. Di samping itu budaya menghargai lebih diutamakan sehingga semua orang mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika diapresiasi oleh yang lainnya.

Seni sangat dibutuhkan oleh semua orang, bicara seni, artinya bicara kritis. Dalam seni ada banyak hal yang membuat pikiran manusia berubah dan bertambah. Seni membawa manusia pada sesuatu yang menyenangkan, apakah melalui lukisan, alam, musik, tari, teater, semua hal tentang seni yang menyenangkan membuat pikiran semakin segar dan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam konsisi yang lebih baik.

Akhirnya karakter dapat membentuk manusia menjadi lebih baik atau sebaliknya. Budaya yang optimis dan maju membuat perubahan yang menyeluruh. Budaya sebagai akar dari kehidupan manusia Indonesia memberikan kontribusi yang lebih baik, menyeluruh dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Daeng, Hans. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanto, Nirwan. 199. *Senjakala Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Gibsons, Michael. 2002. *Tafsir Politik*. Yogyakarta: CV.Qalam.
- Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peursen, Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- P.Huntington, Samuel. 1996. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- Waridi. 2003. *Seni Dalam Berbagai Wacana, Mengenang 20 Tahun Kepergian Gendhon Humardani*. Surakarta: Program Pendidikan Pascasarjana ISI Surakarta.

KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh: Drs. Ampuh Devayan

PROLOG

Character building, memang masih jadi isu bagi bangsa ini. Semua kebobrokan yang dirasakan kini lahir dari adanya karakter atau watak kita yang rapuh. Memang jumlah orang jujur masih cukup banyak. tetapi mereka tidak berdaya menghadapi kelompok kecil manusia yang mabuk kekuasaan, memanfaatkan apa saja bahkan menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan.

Pembangunan karakter harus jadi landasan ideal dalam budaya politik bangsa. Ini terkait eksistensi manusia itu, pada hakekatnya adalah makhluk politik” (The Ethics: Aristoteles). Manusia melalui politik dapat mencapai nilai moral yang paling tinggi. Karena di luar polis, manusia bisa menjadi subhuman (binatang buas) atau superhuman (Tuhan).

Secara sederhana, manusia dalam menjalani kehidupannya merupakan proses politik. Setiap orang membangun dan menjalin interaksi antarsesama, secara individu, kelompok, antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi lainnya. Proses politik yang dilakukan itu kemudian menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik

Dalam terminology agama (Islam), politik itu disebut kepemimpinan. Artinya, ajaran Islam hanya menginginkan bagaimana seorang politikus sanggup berpolitik dengan moral yang abash. Dan bila politik adalah kepemimpinan berarti jiwa politikus adalah moral. Karenanya, politikus harus berpolitik dengan moral dan memiliki watak. Sehingga, manuver dan kebijakan politik apa pun yang ia ambil adalah produk berkualitas dari moral yang ia olah. Dengan kata lain bahwa budaya politik haruslah mencerminkan karakter dan esensi politik itu sendiri.

Budaya politik merupakan pola perilaku dalam membangun intraksi-intraksi dalam kehidupan berbangsa mencakup penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Politikus yang berbudaya bagaimana menjadikan cermin moral untuk menganalisa, mendalami kebaikan dan kejelekan yang ia lakukan dalam membangun intraksi-intraksi dimaksud secara berkarakter dan bermoral.

Bagaimana membentuk budaya politik yang berkarakter? Inilah yang dasar dalam pembahasan ini. Pertama adalah menelaah dan memahami makna karakter itu. Kedua, budaya politik yang berwatak dan berkarakter, sehingga terciptanya politikus yang memiliki integritas keperibadian secara utuh sesuai dengan karakter bangsa, sehingga politik benar menjadi alat untuk memartabakan manusia sebagai rangkaian pengabdian kepada manusia, semesta dan Tuhan (Allah swt)

Membentuk Karakter

Karakter sebagai keunggulan moral sangat penting untuk pembangunan manusia seutuhnya. Selama ini pendidikan kita hanya fokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan, maka perlu direvitalisasi dan menjadi keharusan di tengah emangkin kompleksnya jalan bangsa Indonesia. Alhasil, pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan pembelajar di sekolah dan kampus.

Isu itu menjadi hebat karena disampaikan oleh Presiden RI. Ternyata tidak cukup hanya dengan pendidikan karakter untuk memperbaiki moralitas bangsa Indonesia. Muncul pula program pendidikan antikorupsi. Belum puas dengan pendidikan antikorupsi, ditambah lagi dengan pendidikan Pancasila yang dulu pernah diajarkan.

Bahwa kerusakan moral bangsa ini, sektor pendidikan diklaim bertanggung-jawab. Dan menurut Mendikbud, tanggungjawab pendidikan karakter terletak pada peran guru. Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, “ing ngarso sung tuladho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani”, maka seorang guru idealnya memiliki

kedekatan dengan anak didiknya. Guru hendaknya dapat melekat dengan anak didiknya sehingga dapat mengetahui perkembangan anak didiknya. Tidak hanya dimensi intelektualitas saja, namun juga kepribadian setiap anak didiknya. Oleh sebab itu perlu masuk dalam kurikulum, maka kompleks lah materi pelajaran yang diterima anak-anak kita.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Tak tanggung-tanggung ada delapan belas hal yang dikembangkan dalam pendidikan karakter: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat / komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. (sumber: hasil kajian pusat kurikulum nasional)

Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk

agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati

dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

Bila kedelapan belas itu berhasil diaplikasikan maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat tangguh, handal, produktif dan religius, humanis dan bermartabat. Pendek kata kita menjadi bangsa yang prima baik di dunia maupun akhirat, baik lahir maupun batin.

Pertanyaannya, apakah itu sudah menjamin? Karena untuk membentuk integritas kepribadian seorang, bukan didasarkan pada ada-tidaknya dalam kurikulum. Karena kurikulum hanya teks-teks yang memerlukan tafsir. Artinya, integrasi prose pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler harus dilaksanakan dengan berbasis pada pengembangan budaya dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya olah pikir (literasi), dan olahraga (kinestetik), tapi harus selalu berkorelasi dan holistic dengan olah hati (etik dan spiritual) dan olah rasa (estetik).

Sebenarnya, pendidikan karakter bukan suatu domain tersendiri yang dipersepsikan dalam dunia pendidikan atau terpisah dari penguasaan ilmu. Konsepsi itu yang sebenarnya diperjelas dalam proses belajar mengajar di sekolah-sekolah kita. Sebab jika dipilah antara ilmu dan karakter, maka sadar atau tidak, para murid hanya fokus pada upaya serius penguasaan ilmu namun tanpa karakter.

Karakter berhubungan dengan eksistensi manusia. Bahwa secara eksistensial, "manusia berkarakter" adalah individu yang humanistik. Itulah individu yang menempatkan altruisme sebagai kebajikan hidup. Manusia berkarakter adalah individu yang menyadari kemaslahatan sebagai milik semua orang. Kemaslahatan sengaja diperjuangkan sebagai intensi pribadi agar kemaslahatan benar-benar mewarnai kehidupan setiap orang.

Dalam konteks tersebut bahwa agenda pendidikan sejatinya bagaimana mencetak murid-murid yang mumpuni menguasai ilmu juga sekaligus humanistic dan bermoral. Artinya, penguasaan ilmu bukan sekadar aksesori semu yang secara substansial dan simbolik belaka.

Penguasaan ilmu harus dijauhkan dan terbebaskan dari tabiat munafik. Dengan pendekatan ini berarti, berilmu sama dengan berkarakter. Semakin luas dan dalam penguasaan ilmu, semakin besar peluang seorang manusia menjadi pribadi berkarakter. Dan membentuk karakter tidak hanya di sekolah saja, tapi dimulai dari rumah dan di lingkungan sosial.

Intinya, dalam proses pembelajaran ilmu agar tidak menjadi liar, sepenuhnya diperlakukan dialektika jiwa dan moral lewat pendidikan karakter. "Ini ibarat melihat mutiara dalam kotak perhiasan yang cantik. Kebanyakan orang hanya fokus pada kotak pembungkus di luarnya, dan bukan pada mutiara di dalamnya. Terlalu fokus pada kotak luarnya hanya akan membuat mutiaranya jadi terlupakan. Ini paradigma yang harus diubah orangtua saat bicara pendidikan," kata Bill McIntyre, Director of International Education Practice Franklin Covey, dalam seminar guru dan kepala sekolah "The Leader in Me" di Jakarta, Sabtu (5/4/2014)

Anak-anak adalah mutiara di dalam kotak. Artinya, mendidik mereka bukan sekadar memoles luarnya--sisi akademik, tapi juga membentuk karakter dalam dirinya. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan berupa nilai moral dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain.

Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Maka pendidikan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pendidikan karakter individu seseorang. Secara hakiki manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan (Pusat Kurikulum, 2010)

Pendidikan karakter mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat. Di sini memerlukan metode khusus yang tepat. Di antaranya dengan memberi keteladanan,

metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Di sini perlu pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan seluruh komponen. Dengan kata lain prosesnya tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa.

Pendidikan karakter bermakna melakukan usaha sungguh-sungguh, sistematis dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta keyakinan setiap orang bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun dan menguatkan karakternya. “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat), “kata Theodore Roosevelt

Tidak ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan, tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggung-jawab, tanpa memupuk persatuan, tanpa semangat berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan optimisme. Inilah tantangan pendidikan bangsa kita ke depan. Sanggupkah?

Budaya Politik

Sebelum membahas lebih jauh pentingnya karakter sebagai muatan budaya politik bangsa, terlebih dahulu mendefinisikan budaya sebagai suatu proses induksi ke dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik. Karena hasil akhir dari suatu politik yang berbudaya dan menjadi karakter bangsa, adalah bagaimana seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai, dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya, serta peran itu yang berlaku.

Para ahli mendefinisikan budaya politik sebagai pola yang muncul dalam berbagai aspek dari suatu perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya politiknya. Secara umum dijabarkan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pelaksanaan administrasi dalam negara, sistem pemerintahan, norma atau hukum yang berlaku.

Budaya politik sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat memiliki ciri-ciri yang lebih khas, mencakup masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Semua aspek itu digunakan sebagai tempat untuk mewujudkan budaya politik dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga tipe. *Pertama*, budaya politik apatis (tidak acuh, masa bodoh, dan pasif). *Kedua*, budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi). *Ketiga* tipe budaya politik partisipatif (aktif)

Budaya Politik apatis disebut sebagai tipe parokial, yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Masyarakat yang memiliki orientasi budaya politik, umumnya mereka yang bermukim dan komunitas khusus di pedalaman. Biasanya kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.

Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi). Masyarakat sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, akan tetapi masih bersifat pasif. Namun keterbatas pengetahuan dan edukasi atas system politik, sehingga berpandangan bahwa masalah politik adalah masalah pemerintah Sehingga frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.

Beberapa alasan karena masih adanya otoriter politik menghilangkan atau mengecilkan derajat kesukarelaan anggota masyarakat untuk melibatkan diri di dalam proses politik. Intinya, budaya politik mobilisasi suatu aktifitas atau kegiatan politik yang bukan berdasarkan keinginan sendiri tetapi atas dorongan dan ajakan

dari pihak lain dalam arti dikerahkan secara sengaja. Misalnya kegiatan aksi pembatalan hasil Pilkada yang dikoordinir oleh team sukses dari kandidat yang kalah, massa melakukannya tidak atas inisiatif sendiri (wikipidya)

Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Budaya partisipasi politik yang mulai tumbuh pasca reformasi, menandai lepasnya partisipasi politik dari ikatan perjuangan partai politik.

Semula partisipasi seperti itu lahir dalam bentuk kerja sama organisasi-organisasi masyarakat yang berbeda aliran baik atas restu maupun tidak didorong oleh partai yang membinanya. Demikianlah halnya dengan kerja sama mahasiswa dalam partisipasi politik di akhir masa Demokrasi Terpimpin yang kemudian mengorganisir diri di dalam kerjasama ini kemudian ternyata mengorbitkan peranan mahasiswa di dalam politik sehingga menjadi ujung tombak dari partisipasi politik pemuda yang dalam periode sebelumnya merupakan salah satu pemerintah partisipasi yang utama.

Budaya politik partisipan merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Secara umum, gambaran budaya politik di atas harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut dengan variabel konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam. Misalnya, adanya perbedaan bahasa, agama, dan stratifikasi sosial masyarakat, yang semuanya relatif masih rawan/rentan.

Budaya politik Indonesia yang masih apatis-mobilasi di satu pihak, dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa

masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial lain.

Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar yang dikenal dengan indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puritanisme dan non puritanisme dan lain-lain. Dan kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.

Karakter Sebagai Muatan Budaya Politik Bangsa

Karut marut dan lahirnya budaya konflik dalam dunia politik bangsa bukanlah nasib bangsa itu, Dengan moral excellence lah bisa membedakan baik dan buruknya dilupakan untuk mencapai kekuatan dan kepentingan kelompok dalam dunia politik.

Sektor pendidikan (sekolah) bukan satu-satu peyumbang atas keadaan buruknya karakter bangsa, akan tetapi sektor politik jauh lebih dalam karena semua kehidupan kita pada hari ini berhubungan dengan politik. Karena politik masih dipandang sebagai panglima yang dapat mengatur segala-galanya. Bahkan politik telah menjelma seperti Tuhan yang mengatur, menghukum, dan menentukan nasib setiap orang di Indonesia.

Kita harus mendukung pendidikan karakter di sekolah. Namun sayangnya program pendidikan karakter di sekolah tidak diikuti oleh program pendidikan karakter dalam bidang politik. Buktinya, berbagai kasus korupsi dan perselingkuhan politik antara pengusaha, penguasa, dan kehakiman terkuak yang melibatkan pemimpin, kepala daerah dan wakil rakyat terbukti dalam karakter di dunia politik di Indonesia belum dijadikan dasar. Praktik money politic yang semakin subur dalam sistem demokrasi kita akibat tidak diamalkannya politik yang berbasiskan nilai-nilai.

Itulah yang akan membayangi kita ke depan, dan akankah setiap momentum politik itu mengurangi catatan buruk itu atau justru mendaur ulang. Itulah yang pernah dipesankan tiga tokoh politik bangsa, Soekarno, Hatta, dan Mandela, dalam redaksi yang berbeda, mengingatkan menjadi pemimpin politik haruslah diawali dulu dengan melakukan pengabdian. Karena, kekuasaan yang diamanahkan merupakan perpanjangan tangan dari pengabdian dan perjuangan itu.

Politik hanya cara untuk mencapai masyarakat yang baik, maka sejatinya aktifitas perpolitikan harus dipandang sebagai rangkaian pengabdian. Sedangkan karakter adalah sikap batin--dimana segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki sesuai nilai kemanusiaan dan kemaslahatan. Karakter adalah cermin moral politik. Cermin memiliki dua sifat, menyerap dan memantulkan cahaya. Bila cermin itu menyerap kegelapan atau obyek yang buruk, maka buruk pula yang dipantulkannya. Sebaliknya bila cermin itu menyerap cahaya ilahiah, pastilah yang akan memendar cahaya kebaikan dan kebenaran

Jadi, budaya politik yang berkarakter harus bermuara pada kedua esensi pemahaman di atas. Bagaimana budaya politik mampu mewujudkan seluruh gagasan melakukan perubahan atau perbaikan kehidupan masyarakat luas yang dibingkai nilai-nilai moral dan budaya masyarakat itu. Artinya gerakan dibangun adalah gerakan nilai (value political movement).

Sebaliknya, politik akan kehilangan karakter dan mengalami destorsi budaya ketika politik dipandang sebagai alat perebutan kekuasaan, kedudukan dan kepentingan yang instan. Power political goverment (gerakan politik kekuasaan). Politik akan kehilangan karakter ketika kepentingan secara terorganisir itu hanya berkompromi untuk mewujudkan keinginan pragmatik untuk sukses para pelaku atau politisi. Para politisi tidak lagi menempatkan diri untuk kepentingan umum, mereka mengabaikan budaya politik.

"Mengerikan melihat apa yang terjadi kalau ambisi dan kekuasaan tumbuh berkembang dalam benak orang idiot." - Doung Thu Huong

Membangun karakter budaya politik bangsa, seperti ditekankan Eberhard Puntsch (Politik dan Martabat Manusia), pertama, pentingnya penguasaan pengetahuan. Karena tingkat pengetahuan yang tidak dimilikinya, atau melebihi kapasitasnya, maka seorang politisi akan terjebak pada ketidakmampuan dalam berbagai bidang, dan sekaligus ia harus menyembunyikan ketidakmampuannya itu. Karenanya para politisi dituntut menguasai banyak pengetahuan walaupun tidak secara mendetail agar ia dapat mengambil keputusan.

Politisi harus memperhitungkan dampak-dampak dari keputusan itu karena mereka lah yang akan bertanggung jawab. Ironinya, karena ambisi politisi sering harus bersikap tidak jujur untuk menyembunyikan ketidakmampuannya, dan tindakan pemaksaan ini akan berpengaruh pada kepribadiannya. Ketidakjujuran yang awalnya hanya menjadi kewajiban saja, namun kemudian menjadi kebiasaan, dan menjadi budaya politiknya.

Kedua, idealisme politik. Kara seorang filsuf, bahwa yang sempurna adalah ide, di luar itu tidaklah sempurna, termasuk juga tindakan manusia. Namun manusia selalu membutuhkan kegiatan berpikir untuk melakukan tindakan walaupun nantinya tidak sesempurna yang telah direncanakan.

Nah, memahami keadaan politik dapat mengubah karakter manusia, maka ideology politisi menjadi patron bagi terbangunnya karakter, selalu bersikap objektif atas apa yang diperjuangkannya, memahami kehidupan politik baik bersifat material maupun immaterial.

Praktik politik berkarakter sebenarnya sangat sederhana. Yaitu bagaimana semua praktik atau kegiatan politik pada nilai yang ada dalam diri bangsa harus dijadikan bingkai politik. Agama, budaya, adat, etika, hukum, undang-undang, dan norma merupakan sumber yang merupakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana hal itu direvitalisasi sebagai dasar praktik politik agar politik benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

Para pemimpin dan wakil rakyat yang berada pada wilayah politik perlu menyadari keberadaannya menjadi model pembentukan karakter bagi publik. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi

keberhasilan pendidikan karakter adalah model atau panutan. Para pemimpin dan wakil rakyat berada pada posisi sebagai panutan mereka adalah orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin dan representasi rakyat.

Sebagai orang terpilih, mereka diberikan kepercayaan, mandat, dan kuasa untuk membangun bangsa ini. Secara fungsional mereka seperti nabi yang berperan menyelamatkan umatnya. Semua ucapan dan perbuatan mereka akan diperhatikan rakyat.

Bagi rakyat, pemimpin dan wakil rakyat adalah idola atau tokoh masyarakat. Rakyat sangat menghormati mereka. Bahkan diberikan perhatian secara khusus, disapa secara khusus dan khusus secara khusus karena mereka itu harapan bagi rakyat.

Sesungguhnya, harapan rakyat itu menjadi yang sangat berat bagi mereka. Atas dasar beratnya tanggung jawab itu, maka rakyat rela memberikan fasilitas khusus yang berkategori keunggulan kepada mereka seperti, gaji, rumah, kendaraan dan sebagainya. Memenuhi, syarat keunggulan yang mereka terima harus dibalas dengan kinerja dan karakter yang mulia untuk melayani rakyat. Nilai-nilai luhur yang ada dalam pendidikan karakter perlu benar-benar diamankan oleh pemimpin dan wakil rakyat agar mereka menjadi orang yang berkarakter mulia.

Muatan budaya politik yang berkarakter pada hakikatnya adalah keteladanan. Itulah yang sudah dicontohkan Muhammad saw. Beliau adalah politisi ulung, di antara bukti, beliau sebagai pemimpin/komandan perang, telah berhasil mendirikan komunitas islam, dapat menghimpun dana dari umat untuk membangun masjid, mengaku dan memberikan kesempatan ibadah bagi nonmuslim, dan mendirikan jamaah islam, menjadi pemimpin kafilah.

Islam mengibaratkan politikus adalah “pengembala” umat yang bertanggung jawab atas ideologi Tuhan di muka bumi. Karenanya kedekatan sepirtual dalam hubungan vertical selalu berkroelasi dengan sosial menjadi hal utama. Hal tersebut harus dicerminkan dalam etika lazim keseharian seorang politikus. Dan kerusakan moral pada diri politikus atau pemimpin adalah tanda kehancuran suatu bangsa.

Politikus yang baik dalam Islam, adalah politikus yang dekat dengan rakyat. Bila kesuksesan politik yang diraih dengan mengorbankan prinsip dan pemonopolian rakyat adalah awal dari kehancuran. Dan menjauhi rakyat sama saja dengan membuat buta mata mereka akan persoalan bangsa, karena sesuatu yang kecil tampak besar, yang benar tampak salah, yang salah tampak benar di hadapan masyarakat, sehingga kebenaran harus bercampur dengan kepalsuan.

Ajaran Islam akan pendekatan rakyat telah diterjemahkan dalam biografi para sahabat Nabi, yang memanggul gandum tengah malam karena mendengar tangisan kelaparan rakyatnya. Sebab di mata Islam kepemimpinan adalah amanat serta pengabdian tanpa pamrih.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib kwh dalam suratnya ke gubernur Basrah, mengatakan, “Pemimpinmu (Ali) hanya memiliki dua pakaian usang dari potongan kain-kain. Kalau saja aku mau, bisa saja aku minum madu, berpakaian sutra, menyimpan gandum, namun naudzubillahimindzalik, mungkinkah aku lalui malamku dengan perut kenyang, padahal di sekelilingku banyak rakyatku kelaparan? Takutlah pada Allah wahai putra Khunaif! Dan merasa cukuplah dengan lembaran roti yang kau dapatkan.” Bagi beliau (Ali), kepemimpinan adalah amanat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Tujuan berpolitik adalah menegakkan ideologi Allah, bukan tempat menimbun harta

Reference

- Sujianto. Muhlisin, (2007). *Praktik Belajar Kewarganegaraan*. Editor: Friska Liberti. Jakarta. Ganeca Exact
- Buku Pendidikan Kewarganegaraan SMA XI Rini Setyani - Diah Hartati

KARAKTER DAN BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Barlian AW

Tulisan ini bermaksud mencoba membahas masalah kebangsaan dengan tema “Karakter dan Budaya Politik Bangsa” sebagaimana telah disampaikan oleh tiga penyaji utama tadi. Topik ini menjadi sangat penting bagi kita semua, karena masa sekarang adalah masa penuh dinamika di berbagai segi kehidupan, yang mempengaruhi karakteristik masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif, baik secara ekonomi, budaya, sosial maupun politik.

Budaya politik bangsa Indonesia ditentukan oleh anasir-anasir dan gugusan beraneka ragamnya budaya suku bangsa yang mendiami Tanah air kita. Sebagai Negara Bangsa atau Nation State Indonesia diikat oleh sebuah konsensus politik dan simpul kultural yang kemudian kita namakan kebudayaan nasional, sebagai puncak dari berbagai kebudayaan yang dianut oleh ratusan suku bangsa. Suku bangsa yang mendiami Indonesia amat beragam, mulai dari suku besar dengan mayoritas pendukungnya sampai suku-suku terkecil yang sebagian telah punah. Namun semuanya menjadi unsur penting dalam budaya politik dan politik budaya Indonesia.

Salah satu budaya yang kemudian tersimpul dalam semangat keindonesiaan ialah budaya Aceh yang tidak pernah absen dalam sejarah bangsa. Pada kesempatan ini saya lebih memberi tekanan pada bagaimana karakteristik Aceh yang langsung atau tidak langsung, yang sedikit atau banyak tersusun dan terefleksi dalam sebuah konsep Negara Bangsa bernama Indonesia.

Dari hasil telaahan dan pengamatan bahwa karakteristik orang Aceh dibangun oleh semangat kultural yang terdiri dari Enam Pilar Budaya atau Enam yaitu: Ibadat, Hareukat, Meusapat, Meupakat, Keurabat, dan Meuadat

1. Ibadah. Sebagai penganut Islam dengan latar historis yang kuat, Ibadat atau ibadah menjadi pilar penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Meski sekarang kita tidak berani mengklaim

bahwa 100 persen rakyat Aceh adalah Muslim, tetapi Aceh amat identik dengan Islam. Selain secara realitas dijadikan kegiatan, Ibadah menjadi harga diri dan jati diri orang Aceh. Publik akan menilai seseorang sejauhmana tingkat kegiatan dan konsisten ibadahnya sehingga menjadi cermin kredibilitas serta kapabelitas individual dan komunal.

2. Hareukat yaitu kegiatan berusaha untuk memenuhi kehidupannya. Berbagai profesi dijalani orang Aceh. Petani, nelayan, pekebun, saudagar, birokrat, seniman dan lain-lain, selalu menghidupkan rasa dan karakter kecehannya. Semakin berhasil seseorang dalam hareukat akan semakin mempertebal kualitas Ibadah karena yang bersangkutan mampu membayar zakat dan bersedakah demi membatu kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
3. Meusapat, yaitu kegiatan dan dan rasa kebersamaan dalam berkomunikasi, baik sesama keluarga maupun dengan komunitas di luarnya. Pertemuan-pertemuan paling sering dilakukan, baik formal maupun tidak. Dalam konteks Meusapat ini masyarakat Aceh sangat terbuka dengan para pendatang, karena secara historis apa yang disebut sebagai orang Aceh sekarang ialah para pendatang dari negeri-negeri yang berbeda.
4. Meupakat atau musyawarah adalah sebuah konsep dan sekaligus semangat dalam masyarakat Aceh. Itulah sebabnya maka setiap kampung di Aceh terdapat bangunan meunasah sebagai ruang publik dan tempat musyawarah. Kalau daerah lain biasanya pertemuan formal atau setengah resmi dilakukan di balai desa, di Aceh semuanya berlangsung di meunasah atau masjid. Balai desa yang dibangun dengan pola nasional terlantar di mana-mana. Setiap keputusan baik dalam keluarga maupun sesama masyarakat selalu mengedepankan semangat musyawarah dan menghindari perselisihan. Suatu kesepakatan-- kesepakatan apa pun termasuk kesepakatan politik-- menjadi pegangan dan komitmen bersama
5. Keurabat ialah rasa persaudaraan yang kuat, baik sesama saudara genetis maupun saudara sosial. Siapa pun yang dianggap baik, maka orang Aceh akan menerimanya. Dalam sejarah Aceh juga tercatat sejumlah "orang asing" yang datang ke Aceh diangkat

menjadi pemimpin, baik pemimpin negeri seperti sultan maupun pemimpin spiritual.

6. Meudadat, yaitu adanya ketentuan-ketentuan sosial atau norma yang menjadi kesepakatan bersama berbasis kultural, misalnya menghormati pemimpin, orang tua, tamu, atau orang-orang yang berjasa terhadap daerah ini. Adat juga mengatur kehidupan sehari-hari, sehingga muncul ritualitas kultural, yang bila dipatuhi akan memberikan makna yang besar bagi terbangunnya suatu masyarakat yang kemudian bemuara pada Nation Building.

Jika kita simak, Enam Pilar At ini, amat relevan dengan unsur-unsur dari Empat Pilar Kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Pilar Kebangsaan Pertama ialah Pancasila. Ini adalah sebuah kesepakatan yang lahir dari suatu kesadaran, dimulai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pilar Ibadat yang ada dalam masyarakat Aceh memperkuat butir-butir Pancasila yang ditopang oleh Meupakat, Meusapat, dan Keurabat.

UUD 1945 adalah hasil rumusan para pendiri bangsa melalui proses musyawarah (meupakat dan meusapat). UUD 1945 mempertegas bentuk negara serta berbagai piranti lainnya yang lahir untuk membentuk sebuah kesatuan yang dalam pilar keacehan disebut dengan Keurabat dan Meupakat.

Pilar Kebangsaan Ketiga ialah NKRI. Secara menjejarah Aceh menjadi Daerah Modal Indonesia ketika dalam agresi Belanda pasca-17 Agustus 1945 Belanda menyebutkan Indonesia tidak ada lagi wilayahnya, justru Aceh yang belum tersentuh langsung menyatakan Indonesia masih ujud. Ini adalah komitmen Aceh yang didasari pada kesepakatan atau Meupakat bahwa Aceh adalah bagian dari dan telah bergabung dengan RI seperti halnya Yogyakarta.

Pilar Bhineka Tunggal Ika ditabalkan dalam konsep Meusapat (bersatu) dan Keurabat (bersaudara). Sebab sejak awal apa yang kita sebutkan orang Aceh berasal dari tanah besar Asia, seperti Burma, India, Turki, Persia, atau Yaman. Kalau dari awalnya telah menyatu

menyebut dirinya Aceh dalam perbedaan dan keberagaman, maka tidak sulit ketika Aceh bersama suku-suku lain “membentuk” negara kesatuan bernama Indonesia.

Di Provinsi Aceh sendiri tak kurang dari delapan etnis bersatu kemudian menjadi penduduk Aceh. Itu belum lagi pada pendatang dari Jawa yang sekarang menyebut dirinya orang Aceh dan bersama-sama orang Aceh lainnya merumuskan dan berkongsi ideologi membangun Negara Bangsa Bernama Indonesia.

Dengan demikian, maka Karakter dan Budaya Politik Bangsa yang ingin kita mantapkan sebagai potensi kesatuan dan persatuan Indonesia dapat kita bangun dengan menggali potensi kultural suku bangsa di Indonesia. Aceh adalah sesuatu yang amat relevan dan telah teruji secara politik, historis, dan kultural. Maka setiap pribadi orang Aceh merasa masygul jika diabaikan dalam proses memperkokoh rasa kebangsaan untuk menunjang kelanjutan Indonesia sebagai Negara Bangsa.

KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Dedy Afriadi, M.Sn

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai aspek kehidupan tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog dan gelar wicara dalam media elektronik. Selain di media masa para pemuka masyarakat, para ahli dan para pengamat berbicara mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar baik tingkat local, nasional dan internasional. Permasalahan yang muncul di masyarakat pun beraneka ragam seperti kekerasan, kejahatan seksual, perusakan alam, budaya yang tergerus zaman dan lain sebagainya.

Salah satu alternative permasalahan budaya dan karakter bangsa itu adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternative yang bersifat preventif, karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternative yang bersifat preventif, selain itu pendidikan juga dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi berbagai penyebab masalah budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan tidak langsung tampak hasilnya karena semua itu butuh proses akan tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Oleh karena itu sudah seharusnya kurikulum saat ini memberikan perhatian yang lebih baik dalam lingkup pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Perwujudan kebudayaan nasional menuju pengembangan lebih menyeluruh membutuhkan berbagai usaha pembentukan kebudayaan daerah sebagai modal dasar pengembangan yang hakiki. Dengan adanya kebudayaan daerah yang bersifat tradisional yang kuat maka akan menambah khasanah budaya nasional yang memiliki identitas sendiri yang sekaligus merupakan identitas bangsa.

Salah satu artefak kebudayaan yang perlu dikembangkan dan dilestarikan adalah arsitektur tradisional dan ragam hias pada rumah adat. Arsitektur dan ragam hias merupakan salah satu peninggalan budaya, sebagai ciri atau identitas dari suatu suku bangsa tersebut. Dalam bangunan tradisional tersebut terkandung secara terpadu wujud ideal, wujud sosial dan wujud material suatu kebudayaan. Dengan wujud-wujud kebudayaan tersebut apabila dihayati dan diamalkan, dapat melahirkan rasa kebangsaan dan rasa kecintaan terhadap bangunan (arsitektur) tradisional serta ragam hiasnya yang merupakan bagian dari rumah adat tersebut.

Namun disayangkan dengan adanya modernisasi di segala bidang, telah menyebabkan pergeseran kebudayaan yang terkandung dalam bangunan tradisional beserta ragam hias yang terkandung di dalamnya. Hal ini terjadi karena pembangunan dewasa ini merupakan salah satu pendorong utama terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya. Pergeseran ini cepat atau lambat akan merubah bentuk, struktur dan fungsi dari bangunan tradisional dan ragam hiasnya. Kenyataan ini telah menjurus kepada terjadinya perubahan bentuk, bahkan akan terjadi kepunahan bangunan tradisional dan ragam hias yang terkandung di dalamnya bagi suatu suku bangsa, termasuk di daerah Aceh.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Propinsi Aceh memiliki potensi budaya dan mempunyai kontribusi dalam menyokong keanekaragaman kebudayaan nasional. Secara geografis Propinsi Aceh merupakan daerah yang strategis, karena terletak pada jalur pelayaran dan perdagangan Internasional yang menghubungkan dua kebudayaan masa lampau yaitu India, Arab, Eropa dan Cina. Oleh karena itu banyak unsur dari dua kebudayaan tersebut terserap ke dalam berbagai kehidupan masyarakat Aceh. Pengaruh kedua kebudayaan itu juga dapat dilihat pada berbagai artefak seni sehingga memberikan warna dan corak tersendiri dalam pembentukan kebudayaan Aceh.

Perkembangan budaya sepanjang sejarah kerajaan Aceh telah menghasilkan keanekaragaman bentuk kesenian, baik yang bersifat sakral maupun profan, sehingga tidak mengherankan apabila nilai-nilai seni terkandung dalam kebudayaan Aceh dipengaruhi oleh kaidah Islam yang telah menyatu dengan kebudayaan setempat. Pengaruh ini

terlihat pada ornamen atau ragam hias yang di tinggalkan. Bentuk-bentuk makhluk hidup tidak boleh di tampilkan, jika ada telah di stilisasikan atau di gubah sedemikian rupa hingga menjadi abstrak. Hal ini di sebabkan karena ajaran Islam melarang umat/pengikutnya menggambar makhluk hidup secara detail dan sempurna khususnya penggambaran manusia di khawatirkan kemudian hari disalahgunakan.

Pada zaman “now” apa yang kita rasakan di Aceh? Tentunya ini adalah sebuah renungan bagi kita masyarakat Aceh menanti jawaban dan tantangan berikutnya untuk kebidupan anak cucu yang akan datang. Modernisme telah mengantar kita pada sebuah perubahan. Benda-benda kriya Aceh belum tertata apik, sarana dan prasarana belum memadai, arsitektur dan ragam hias kurang mendapat perhatian ditambah lagi dengan hilangnya jejak para *utohrumoh*, hak paten terhadap karya seni masih sedikit, pengrajin rencong makin minim, institusi pendidikan seni kurang gaungnya, dan peran pemerintah dalam pelestarian cagar benda artefak yang ada di Aceh belum memberikan perhatian yang serius.

Politik itu juga *MixedwithArt*. Kalau tidak dipadukan antara *Art* and *Science* tentu suasananya tidak akan hidup dan akan tegang terus antara Legislatif dan Eksekutif apalagi menjelang tahun 2019. Seni budaya dan karakter muatan local merupakan persoalan penting yang harus di perjuangkan oleh negara.

KARAKTER DAN MUATAN POLITIK

Oleh: Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA

Karakter:

- Secara bahasa Karakter adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.

Karakter Politik

- Karakter politik sangat dipengaruhi oleh Pendidikan, Budaya dan pergaulan seseorang, pergaulan dan lingkungan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kepribadian seseorang.

Lemahnya Pendidikan Karakter

- Realita yang selama ini terjadi bahwa pendidikan kita selama ini hanya mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan berpikir. Sedangkan pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa dalam diri anak bangsa semakin terpinggirkan

Penguatan Karakter

- Penguatan karakter dapat diwujudkan dengan media pendidikan, yang mana pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Realitas kondisi saat ini, banyak sekali praktek kehidupan politik yang jauh dari tujuan pendidikan politik. Para politisi berebut kekuasaan, menghalalkan segala cara, korupsi semakin masif, suap semakin merajalela, penegakkan hukum masih diskriminatif, tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kekuasaan disalahgunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya, bukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kegagalan Partai Politik

Salah satu tujuan daripada lahirnya partai politik adalah melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, namun Partai politik (parpol) gagal mewujudkan perannya menghasilkan kader-kader atau calon pemimpin yang bersih. parpol dinilai sebagai salah satu institusi yang paling korup dan tidak transparan urusan pengelolaan keuangannya. Banyak kader parpol yang terjerat korupsi dan suap. Parpol hanya menjadikan dirinya sebagai kendaraan bagi pihak-pihak yang ingin berkuasa. Oleh karena itu, banyak terjadi politik transaksional dan politik dagang sapi di lingkungan parpol

Lemahnya Pemahaman Politik

Politik selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor padahal tujuan politik adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pemahaman politik yang lemah oleh elit-elit politik sehingga berefek kepada penyelewengan kekuasaan.

Membangun Mental

Setiap warga negara dibangun mentalnya untuk memiliki atribut kebangsaan yang positif seperti cinta tanah air, rela berkorban, demokratis, dan gotong royong, serta mampu berpartisipasi dalam membangun bangsa

Kesimpulan

- Tujuan utama dari penguatan karakter bangsa adalah mengembalikan jati diri bangsa. Nilai-nilai seperti nasionalisme, gotong royong, integritas, kemandirian, dan religius diharapkan kembali muncul sebagai identitas bangsa Indonesia ditengah degradasi karakter bangsa karena digerus oleh nilai-nilai liberalisme. Salah satu media strategis penguatan karakter adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan politik.

KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Drs. H. Jailani Ahmad, MM

LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia yang terdiri dari keaneka ragaman suku yang mendiami pulau-pulau di Nusantara dengan budaya, adat istiadat dan agama yang berbeda merupakan Anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Menurut data statistik setidaknya terdapat 1.340 etnik atau suku bangsa yang mendiami bumi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya terbesar dewasa ini dan dari keanekaragaman suku dan budaya tersebut dapat melahirkan perilaku sosial yang berpeda sesuai nilai budaya masing-masing daerah di Indonesia.

Dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, istilah budaya politik kerap kali digunakan untuk menjelaskan fakta pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan – tujuan tersebut. Kehidupan suatu negara tidak terlepas dari kegiatan politik. Kegiatan politik yang identik dengan kekuasaan dalam kehidupan bernegara dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. (Albert Wijaya, 1982)

Menurut Gabriel A. Almond dan G Bingham Powell, budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi yang berkecendrungan dan pola khusus yang terdapat pada bagian – bagian tertentu dari populasi. Di Indonesia budaya politik merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam kegiatan politik kenegaraan. Dengan demikian karakter dan budaya politik bangsa

Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat istiadat dan nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus memahami budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa politik merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut peraturan, pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada. Kebijakan umum hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan itulah diperlukan sarana politik yang disebut partai politik.

KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK

Pengertian untuk mendalami tentang karakter, terdapat beberapa pendapat para ahli antara lain;

- Doni Kusuma, Karakter adalah sebuah gaya, sifat, ciri, maupun karakteristik yang dimiliki seseorang yang berasal dari pembentukan tempaan yang didapatkannya melalui lingkungan yang ada disekitar.
- Wyne, Karakter menandai bagaimana teknis maupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan kedalam sebuah tingkah laku maupun tindakan.
- Soemarno Soedarsono, Karakter merupakan sebuah nilai yang sudah terpatrit didalam diri seseorang melalui pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang ada didalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud didalam sistem daya juang yang kemudian melandasi sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang.

Secara etimologi, istilah kebudayaan berasal dari beberapa bahasa, antara lain; Culture (Bahasa Inggris) artinya budaya, Colore (Bahasa Latin) artinya budaya, dan Akhlak (Bahasa Arab) artinya

peradaban atau budi. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi, artinya kemampuan akal budi seseorang atau sekelompok orang.

“Menurut Kuntjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindak dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Sedangkan menurut Moh. Hatta, kebudayaan adalah ciptaan dari satu kesatuan harmonis.”

Salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal adalah sistem bermasyarakat yang didalamnya terdapat organisasi kekuasaan atau politik. Kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat dan selalu berkembang dalam upaya memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama sehingga muncul kelompok-kelompok disebabkan oleh sifat manusia yang bertentangan dengan manusia lainnya. Di satu pihak dia ingin kerjasama, tetapi dilain pihak, dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Akan tetapi, manusia mempunyai naluri untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan orang lain secara rukun.

Di era moderen ini hampir dapat dipastikan tidak seorang pun dapat melepaskan diri dari pengaruh politik, seseorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Setidaknya, salah satu dari bentuk proses politik, seperti komplik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan, dan tawar menawar politik dapat mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu. Namun demikian kadar pengaruh politik terhadap setiap orang tidaklah sama, kesediaan menerima pengaruh dan kekuatan diri untuk menghindar akan menentukan gradasi pengaruh politik terhadap individu. Berbeda dengan posisi seseorang terhadap pengaruh proses politik, disisi lain terdapat terdapat kemampuan setiap orang untuk mempengaruhi seseorang proses politik. Mereka itu adalah orang yang menguasai sumberdaya dan teknologi politik serta mempunyai tekad atau daya juang.

Budaya politik secara umum merujuk pada pola perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan penyelenggaraan administrasi negara, adat istiadat,

serta politik pemerintahan yang tertanam dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu.

Beberapa ahli di bidang politik mengemukakan pendapatnya mengenai definisi budaya politik, di antaranya adalah:

- a) Larry Diamond; budaya politik merupakan sebuah sikap, keyakinan, ide, dan evaluasi suatu kelompok masyarakat terhadap sistem politik negaranya serta bagaimana tiap individu berperan dalam sistem tersebut.
- b) Rusdi Sumuntaputra; budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dimiliki oleh para anggota dalam satu sistem politik.
- c) Mochtar Mas'ud dan Colin McAndrews; budaya politik adalah sikap dan pandangan warga negara terhadap kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan negaranya.

Ciri-ciri budaya politik.

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, budaya politik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Terdapat sebuah sistem yang mengatur kekuasaan, contohnya undang-undang dan konstitusi.
2. Adanya kegiatan partai politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik.
3. Adanya gejolak dan tanggapan dari masyarakat mengenai pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Adanya sistem pengalokasian sumber daya masyarakat.

Berdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dapat dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Budaya politik Parokial

Budaya politik parokial ditandai dengan rendahnya minat, wawasan serta partisipasi masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Budaya politik tersebut sangat kental dengan kehidupan masyarakat pedalaman yang masih sangat terikat dengan adat istiadat yang dipimpin oleh ketua adat. Mohtar Mas'ud dan Colin McAndrews mengklaim karakteristik budaya parokial sebagai berikut;

- Ruang lingkup yang kecil,
- Anggota masyarakat sama sekali tidak menaruh minat pada perihal yang menyangkut politik dan pemerintahan,
- Tidak adanya peran politik yang bersifat eksklusif,
- Anggota masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang adanya kewenangan pusat yang dikendalikan oleh pemerintah,
- Masyarakat tidak memiliki ekspektasi apa pun terhadap sistem politik,
- Sistem politik bersifat efektif

2. Budaya politik Kaula

Dalam budaya politik kaula, masyarakat telah memiliki pengetahuan tentang politik dan penyelenggaraan pemerintahan, hanya saja tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Adapun karakteristik budaya politik Kaula, sebagai berikut:

- Masyarakat sadar tentang adanya otoritas dari pemerintah,
- Masyarakat cenderung patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dan enggan dalam memberikan kritikan.
- Sikap masyarakat cenderung pasif dalam berbagai kegiatan politik,
- Tingkat ekonomi masyarakat tergolong maju, namun partisipasi masyarakat dalam bidang politik masih relatif rendah.

3. Budaya politik Partisipan

Budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang paling idial diantara budaya politik lainnya, dimana kesadaran masyarakat terhadap politik dan pemerintahan relatif tinggi dan ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan serta pemilihan pemimpin. Ada pun karakteristik budaya politik partisipan sebagai berikut:

- Warga sadar tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara,
- Warga cenderung lebih kritis dalam menanggapi setiap kebijakan yang diambil pemerintah dan perilaku para pemegang kekuasaan,
- Warga sadar bahwa dirinya memiliki kekuatan dan hak untuk menyetujui suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah,

- Muncul keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

BUDAYA POLITIK INDONESIA

Budaya politik yang berkembang di Indonesia lebih cenderung mengarah pada karakteristik budaya politik partisipan sehubungan dengan telah terjadinya reformasi di era 1990-an. Partisipasi masyarakat lebih tinggi sehubungan dengan berlakunya sistem Pemilu langsung, umum bebas dan rahasia. Budaya politik Indonesia juga menunjukkan adanya kecenderungan neo-patrimonialistik yang merujuk pada bentuk eksistensi budaya, tradisi bangsa dan nilai-nilai religius yang dianut bangsa Indonesia ditengah kemunculan ideologi moderen yang dinamai dengan demokrasi.

Di era moderen ini hampir dipastikan bahwa setiap orang tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh politik, seseorang dapat saja mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan politik, seperti konflik, manipulasi sumber kekuasaan, paksaan, tawar-menawar, money politic dapat mempengaruhi seseorang dalam waktu tertentu. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan baik positif maupun negatif. Hal ini disebabkan manusia sebagai anggota masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana konflik.

Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Konflik –konflik ideologi berbagai golongan masyarakat khususnya di Indonesia telah menjadi sebab timbulnya kesulitan untuk mengembangkan aturan permainan (*rule of the game*). Oleh karena itu, tidak mengherankan apa bila konflik-konflik ideologis terus tumbuh berdampingan dengan konflik-konflik bersifat politis akibat pertentangan dalam pembagian kekuasaan, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kebijakan yang melegalkan hal-hal yang sensitif dan dogmatis ditengah tengah masyarakat.

Perkembangan demokrasi dewasa ini mempunyai dampak bagi kehidupan politik di Indonesia. Munculnya partai – partai politik turut menyemarakkan proses demokrasi . Akan tetapi banyak hal yang harus dikaji ketika hubungan antara elit politik dan massa pendukungnya sementara ini hubungan tersebut seolah- olah seperti hubungan antara bapak dan anak yang belum dijiwai oleh semangat demokrasi itu sendiri. Masyarakat dalam menentukan figur-figur kurang berfikir kurang berfikir secara rasional karena masih bersifat paternalis dan feodalistis. Hal ini sangat membahayakan bagi perkembangan suatu bangsa yang sangat membutuhkan ketahanan dan stabilitas politik.

Guna mewujudkan ketahanan politik sebagai kondisi kehidupan politik bangsa yang sehat, dan mampu memelihara stabilitas politik perlu diupayakan adanya tata cara berpolitik yang didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus berdasarkan pada tuntunan hak dasar kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum dan kenegaran disebut Hak Azasi Manusia.

Pembentukan, pemeliharaan, pengembangan dan pembinaan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya tentang arah kehidupan dan nmasa depan bangsanya. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya UU no.31 tahun 2002 tentang partai politik, UU no 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik, UU no 1 tahun 2015 tentang penapan partai politik, dan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu (presiden dan legislatif), dan menurut uu ini peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Partai politik, yang telah ditetapkan /lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PERAN SENI BUDAYA DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA INDONESIA

Oleh : Mirza Irwansyah, Ph.D

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman, terdiri dari berbagai Ras, Suku Bangsa, Kepercayaan, Agama, dan Bahasa Daerah yang merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri dan dijaga kelestariannya oleh seluruh rakyat Indonesia, yang mampu memperkaya khasanah bangsa dan menjadi modal berharga untuk membangun Indonesia.

Keanekaragaman tersebut tentu mempengaruhi karakter setiap individu rakyatnya pada proses pengambilan keputusan yang didasari oleh kebiasaan daerah masing-masing sehingga dapat menjadi potensi konflik dan kecemburuan sosial (yang mengatasnamakan agama, antar suku, antar golongan, antar etnis, radikalisme, antar ras).

Pancasila sebagai dasar negara menjadi rujukan bersama dalam menjaga, dan melestarikan segala perbedaan ditengah keanekaragaman Indonesia. Nilai Pancasila dan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki makna “berbeda tapi tetap satu jua” seakan tidak mampu sebagai pedoman kehidupan bangsa saat ini. Padahal sejak dahulu nenek moyang kita menjadikan nilai budaya sebagai cara pengambilan keputusan bagi berkehidupan berbangsa dan bernegara dimana gotong royong, musyawarah-mufakat, saling menghormati antar sesama warganegara menjadi bagian yang melekat dalam diri bangsa ini.

Menurut Koentjaraningrat (2013:153) nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup pada alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap amat mulia sehingga sistem nilai yang ada pada suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan untuk bertindak yang mempengaruhi pandangan hidup seseorang dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan

tujuan–tujuan pengambilan keputusan hingga akhirnya pengaruh itu sampai pada hasil tindakan manusia.

Jika kita mengkaji apa yang disampaikan Koentjaraningrat bahwa terdapat sebuah sistem nilai budaya yang dijadikan sebagai tujuan dari pengambilan keputusan yang datang bukan dari pemaksaan melainkan dari nilai-nilai budaya itu sendiri yang tertanam dan menjadi acuan sehingga terciptalah toleransi, kerukunan, dan saling menghargai diantara keanekaragaman Indonesia. Cara berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan dalam kehidupan manusia menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir dari nilai, moral, norma, dan keyakinan dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem nilai budaya.

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan sistem nilai budaya yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, seni budaya memiliki peran aktif dan sistematis dalam membangun pendidikan karakter bangsa untuk menyatukan keanekaragaman, mengembangkan sistem nilai budaya yang sesuai dengan Identitas Nasional Indonesia agar tidak terjerumus dalam pengaruh-pengaruh yang dapat memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia.

Pengertian Seni Budaya

Kata seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, karena pada setiap seni pasti mempunyai nilai kebudayaan yang khas. Begitu juga sebaliknya, pada setiap kebudayaan pasti mempunyai nilai seni yang begitu indah dan tidak ternilai harganya.

Koentjaraningrat menjelaskan:

“...suatu unsur universal kesenian dapat berwujud gagasan-gagasan, ciptaan-ciptaan, pikiran, ceritera-ceritera, dan syair-syair yang indah. Namun, kesenian juga dapat berwujud tindakan-tindakan interaksi berpola antara seniman pencipta, seniman penyelenggara, sponsor kesenian, pendengar, penonton, dan konsumen hasil kesenian; tetapi kecuali itu semua kesenian juga berupa benda-benda indah, candi, kain tenun yang indah, benda-benda kerajinan dan sebagainya”.

Menurut Ki Hajar Dewantara seni merupakan hasil keindahan sehingga bisa menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oleh sebab itu, perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi serta menimbulkan perasaan indah adalah seni.

Menurut Aristoteles seni adalah bentuk yang penampilannya serta pengungkapannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Selain itu juga seni adalah meniru alam. Aristoteles menyatakan bahwa seni adalah suatu bentuk peniruan terhadap alam dengan tetap menjaga sifat idealnya yang disebut mimesis atau mimetic art (Seni mimetrik).

Budaya atau kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang berkembang secara bersama pada suatu kelompok orang secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang sulit meliputi sistem agama, dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, karya seni, perkakas, dan bangunan.

Istilah budaya dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, sebagai bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) yang diartikan hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia.

Menurut Edward Burnett Tylor budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan dari yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Koentjaraningrat menyebutkan bahwa dalam budaya terdapat tujuh unsur yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia ini (dalam kehidupan manusia), yaitu:

1. Bahasa
2. Sistem Pengetahuan
3. Organisasi Sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem Religi
7. Kesenian

Berdasarkan pengertian diatas, seni budaya memiliki kesepadanan makna, yaitu akal dan budi luhur, seperti yang dimaknai Takari dalam makalahnya :

“seni dan budaya adalah pancaran daya dan upaya, seluruh apa yang dipikir, dirasa, dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Budaya adalah cara hidup suatu bangsa atau umat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan beraskan peradaban”.

Dari makna diatas dapat disimpulkan bahwa seni budaya adalah karya seni yang berlandaskan kepada akal maupun budi yang dimiliki oleh masyarakat serta digunakan dan diturunkan dari masa ke masa secara berkelanjutan.

Seni adalah suatu produk budaya dari sebuah peradaban manusia, sebuah wajah dari suatu kebudayaan yang diciptakan oleh suatu bangsa atau sekelompok masyarakat. Pada hakikatnya seni budaya merupakan sebuah proses mengembangkan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pengembangan imajinasi, intuisi, pikiran, kreativitas, dan kepekaan rasa dan bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh serangkaian nilai-nilai yang ditinggikan seperti agama atau norma-norma lain (Fakhruroji:2010)

Karakter

Pengertian karakter merupakan bawaan dari hati, jiwa, budi pekerti, kepribadian, sifat, tabiat, personalitas, temperamen, dan watak. Berkarakter dapat pula diartikan sebagai kepribadian, bersifat, berperilaku, berwatak, dan bertabiat (Depdiknas:2008).

Secara umum istilah “karakter” yang sering disamakan dengan istilah “temperamen”, “tabiat”, “watak”, atau akhlak yang memberinya sebuah definisi sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan.

Secara harfiah menurut beberapa bahasa, karakter memiliki arti seperti: “kharacter” (latin) berarti instrumen of marking, “charessein” (prancis) berarti to engrove (mengukir), “watek”(Jawa) berarti ciri wanci: “watak” (indonesia) berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan peringai.

Pendidikan karakter dalam pandangan Azyumardi Azra adalah proses suatu bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan nilai-nilai sosial seperti toleransi, demokratis, bersahabat/ komunikatif sebagai acuan dalam bertingkah laku dalam berinteraksi dengan sesama, nilai berkewarganegaraan, dan yang terakhir nilai religius.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan seni budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi sebagai berikut (kemendiknas:2010):

1. Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

2. Pancasila

Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. Budaya

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut:



5. Nilai Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

6. Nilai Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

7. Nilai Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

8. Nilai Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

9. Nilai Kerja

Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

10. Nilai Kreatif

Sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya.

11. Nilai Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

12. Nilai Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

13. Nilai Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

14. Nilai Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

15. Nilai Cinta Tanah Air

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

16. Nilai Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

17. Nilai Bersahabat/Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

18. Nilai Cinta Damai

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

19. Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

20. Nilai Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

21. Nilai Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

22. Nilai Tanggung-jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Peran Seni Budaya Dalam Membangun Karakter

Peran budaya dalam membangun bangsa sangat mendasar karena menyangkut nilai-nilai kehidupan yang melandasi sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini jika nilai-nilai budaya telah mengakar kuat sebagai sendi kehidupan masyarakat. Adapaun peran seni budaya dalam membangun karakter bangsa, yaitu:

1. Seni Budaya sebagai perekat persatuan bangsa.
2. Seni budaya sebagai nafas kebersatuan dan kebangsaan
3. Seni budaya merupakan pondasi kekuatan bangsa untuk menahan dan menghadapi serbuan negatif globalisasi yang cenderung melemahkan *social capital* bangsa Indonesia
4. Sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa agar terciptanya insan seni yang memiliki semangat bekerjasama membangun bangsa yang beradab dan bermartabat.

Krisis karakter generasi muda yang tidak punya prinsip dan integritas adalah indikasi kegagalan pembangunan kebudayaan. Peran budaya dalam membangun dan memajukan bangsa adalah membentuk karakter dan moral bangsa.

Kesimpulan

Pembangunan karakter bangsa melalui seni budaya adalah upaya untuk memperbaiki, menanamkan perilaku cinta tanah air yang mencakup adat istiadat, nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat dan pikiran bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika. Menjadikan seni budaya sebagai pendidikan wajib pada setiap institusi pendidikan diharapkan mampu membangun karakter bangsa sehingga memiliki pemahaman makna seni dan budaya. Melalui pendidikan karakter bangsa menjadi suatu kelengkapan dari nilai-nilai dasar seni budaya. Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Semakin kuat karakter suatu bangsa, semakin kuat pula kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Sehingga norma dan nilai budaya secara bersama pada tingkatan paling tinggi dalam tatanan kehidupan bernegara akan menjadi norma dan nilai budaya bangsa yang dihormati. Dengan demikian, warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan nilai ciri ke-Indonesiaannya akan mewariskan nilai-nilai budaya ke generasi mendatang.

Referensi

- Koentjaraningrat. 2013. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta.
- Sunoto. 1984. Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika, Logika, dan Etika. Yogyakarta: Hanindita.
- Cikal. (2016, 15 Mei). pembentukan budaya nasional, sebagai identitas dan kesadaran berbudaya Indonesia. diperoleh 20 Februari 2018, dari <https://cikalweb.wordpress.com/2016/05/15/pembentukan-budaya-nasional-sebagai-identitas-dan-kesadaran-berbudaya-indonesia/>
- Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika*, 1(2): 123-130.
- Kemdiknas, 2010. Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa terbitan Puskur Balitbang diperoleh 20 Februari 2018, dari <https://massofa.wordpress.com/2011/11/17/nilai-nilai-yg-dikembangkan-dalam-pendidikan-budaya-dan-karakter-bangsa/>
- <https://www.antaranews.com/berita/647420/presiden-jokowi-prioritaskan-seni-budaya-bangun-karakter-bangsa>
- http://www.academia.edu/16805469/Menurut_Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia

KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA: TRADISI ME'BU DI ACEH

Oleh : Maisarah, S. Pd.I, MA

Indonesia dikenal dengan bangsa yang kaya budaya, contohnya Aceh sangat unik dengan beragam adat budaya yang dimiliki, salah satunya adat mè bu hingga kini masih lestari di Aceh. Mè bu, yang dalam bahasa Indonesia berarti 'membawa nasi'. Ada banyak jenis mè bue, seperti mè bu bak ureung meuninggai (membawa nasi ke tempat orang meninggal) dan bak ureung meumè. *Akan tetapi dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Me'bu bak ureung meume'.*

Adat mè bu bak ureung meumè dikenal dengan istilah keumaw'euh atau meulineum. Keumaw'euh biasanya berlangsung pada bulan keenam hingga ketujuh. Ini dilakukan oleh keluarga lintô kepada istrinya/keluarga istri. Besar kecilnya idang, tergantung pada kemampuan masing-masing. Sebelumnya, yaitu pada bulan ketiga atau keempat kehamilan, pihak keluarga lintô mengantarkan boh kayèe kepada dara barô.

Keumaw'euh merupakan adat Aceh yang sejak dulu hingga kini sangat menonjol, bermakna, dan penting. Di Aceh Besar, misalnya, mè bu adalah seperangkat upacara adat dalam bentuk nasi beserta lauk-pauknya yang dimasukkan dalam reubieng dan talam hidangan dari keluarga suami untuk diantar pada bulan-bulan tertentu kepada istri karena kehamilan.

Di daerah ini biasanya mè bu berlangsung pada saat seorang istri hamil usia 4 s.d. 6 bulan. Puncaknya adalah pada usia kehamilan mencapai bulan ke-7. Apabila kehamilan telah memasuki bulan kedelapan, apalagi bulan ke-9, mè bu itu sulit dilakukan lagi. Kedua keluarga, baik keluarga suami maupun

keluarga istri akan menanggung malu aib. Dalam pandangan masyarakat, bila adat *mè bu* tidak dilakukan, yang bersangkutan akan terkena sanksi adat disebagian daerah di Aceh.

Yang dibawa saat *mè bu* adalah nasi dan lauk- pauk yang pada umumnya terdiri dari nasi biasa, ayam panggang/gulai ayam, daging, gulai ikan, kuah lapik, dan lain-lain. Orang kaya biasanya membawa sampai tujuh hidangan, kadang-kadang lebih. Namun, hal itu berlaku bagi semua keluarga walaupun hidangan sederhana.

Salah satu peralatan yang dipakai dalam tradisi *mè bu* adalah *rubieng*, suatu tempat seperti baku nasi yang luasnya dapat menampung antara 5-10 bambu beras yang telah dimasak menjadi nasi. *Rubieng* ini semacam *glông* yang dipakai pada/atas *talam* atau *dapeusi*.

Rubieng biasanya dibuat dari kulit bambu atau dari batang *lidi* yang sering digunakan untuk alat *peunyeukat*, terutama *padi* atau nasi sebagaimana di Kampung Daroy Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah dan sebagian daerah lain di Aceh Besar. *Talam* dan *dapeusi* adalah alat semacam baki, tetapi bentuknya bundar, ada yang terbuat dari tembaga, ada yang dari seng plat. *Talam* lebih besar, sedangkan *dapeusi* lebih kecil.

Salah satu gulai yang dibawa dalam kegiatan *mè bu*, seperti yang disebut di atas, adalah kuah lapik. Kuah lapik merupakan jenis kuah dari ikan tongkol yang di dalamnya juga ada lapisan buah-buahan yang sudah dipotong-potong seperti terdapat di Kampung Pande, Banda Aceh. Ada juga kuah lapik yang dimasak dari ikan tongkol bercampur *angka muda*, *nenas muda*, dan biasanya bumbunya tanpa kunyit seperti terdapat di Kampung Daroy Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah.

Mè bu dilaksanakan oleh sejumlah kaum ibu dari keluarga suami yang dipimpin oleh istri *geuchik*, istri *teungku*, para ibu lainnya, serta para tokoh yang dianggap tepat atau patut di

kampung itu. Kegiatan itu dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB ke atas. Banyak sedikitnya para pengantar tergantung pada kemampuan dan besarnya hidangan. Hidangan me bu yang tiba di rumah menantu berupa bungkus nasi khusus beserta lauk-pauknya yang diistimewakan untuk menantu (meulintèe).

Di Kampung Lambaro Angan, Darussalam, Aceh Besar nasi bungkus itu disebut bu meulineum. Ada juga nasi khusus dengan kue-kue khas Aceh (12 macam) sebagaimana berlaku di Kampung Cot Geundreut Meulayoe, Kuta Baro, Aceh Besar. Selanjutnya, semua perangkat hidangan yang telah sampai di rumah meulintèe akan dibuka dan disajikan upacara kenduri pada waktu tertentu dengan turut mengundang seluruh keluarga beserta keuchik, teungku, serta tetangga terdekat dan tokoh-tokoh lain yang patut.

Sebelum kegiatan mè bu dilakukan, ada yang unik oleh masyarakat Kampung Lam Pakuk Gleeyeung, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, yaitu membuat bu cue dari pihak keluarga suami sebagai tanda pemberitahuan awal bahwa menantu telah hamil. Namun, sebelum bu cue diantarkan, terlebih dahulu kira-kira pada waktu anak perempuan hamil lima bulan, ibunya (ma dara barô) memandikan anaknya. Pada saat itu ibunya membuat nasi ketan sekadarnya dan mengantarkan ke rumah keluarga suami (ma lintô). Penyampaian nasi ketan ini merupakan tanda (pemberitahuan) bahwa anaknya (menantu) telah hamil.

Apabila nasi ketan ini telah diterima, pihak keluarga suami (lintô) mempersiapkan bu cue. Bu cue adalah seperangkat nasi beserta lauk-pauknya sekadar satu rantang beserta seperangkat seunicah (rujak) yang diantarkan secara diam-diam (rahasia) ke rumah menantunya yang hamil sebelum acara mè bu dilakukan.

Pada saat diantarkan bu cue oleh keluarga suami, pihak istri dan seisi rumahnya tidak mengetahui sama sekali sehingga mengagetkan mereka. Pada saat itu, ibu si istri mengatakan pada

anaknyanya yang hamil, “Hai, hai mak tuan ka trôk.” Setelah bu cue dilaksanakan, barulah beberapa bulan kemudian acara mè bu dilaksanakan secara resmi. Di Kampung Daroy Jeumpet, Darul Imarah, Aceh Besar, mè bu lebih populer dengan sebutan mè bu kude. Kude ini hampir sama dengan reubing.

Di Aceh Barat Daya, terutama Blangpidie, mè bu atau lebih dikenal dengan keumaw'euh bukan hanya dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi juga oleh tetangga sekitar.

Tujuan utama upacara mè bu adalah sebagai pernyataan kepada umum bahwa janin yang dikandung oleh dara barô adalah benar-benar asli dan sah menurut adat dan syarak sebagai bagian dalam keluarga/kerabat. Sikap pernyataan itu merupakan kebutuhan rohani/moril sang istri dalam upaya memenuhi kegembiraan dan kebahagiaan.

Sebenarnya, bukan hanya mè bu yang dilakukan ketika istri sedang hamil. Ada pula adat jak intat boh kayèe ‘mengantar buah-buahan’, puwoe eungköt tirom, bieng, udeung, eungköt meuaweuh, dan buah-buahan untuk seunicah. Selain itu, selama masa kehamilan, ada pula pantangan/tabu yang tidak boleh dilanggar oleh suami dan istri seperti tidak boleh pulang tengah malam dan peunangkai keu pageu tubôh.

Demikian pembahasan tentang adat budaya Me'bu yang ada ditengah rencong, semoga bermanfaat untuk kita dan generasi yang akan datang yang kian hari kian melupakan adat budaya ini.

MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA POLITIK BANGSA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Oleh : M Adli Abdullah

Pendahuluan

Pada hari ini, saya diminta oleh panitia untuk membahas tentang karakter dan muatan budaya politik bangsa, karena basis saya dibidang hukum adat dan studi keacehan, diskusi kita ini saya fokuskan pada peranan kearifan lokal dalam membangun Karakter budaya politik bangsa. Judul ini saya pilih karena sebelum Indonesia ada dan wujud, di nusantara ini telah wujud kerajaan-kerajaan mulai dari Majapahit, Sriwijaya sampai kerajaan Islam seperti Aceh, Demak dll, disamping itu kita juga memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa, tentunya telah melahirkan keberagaman budaya politik di Nusantara yang akhirnya menyatu menjadi budaya Indonesia dengan konsep *Binneka Tunggal Ika*.

Cuma bedanya, dulunya sebelum Indonesia mardeka istilah nusantara lebih sering dipakai daripada Indonesia. Pada saat ini penyebutan Indonesia lebih menggambarkan kewilayahan politik sedangkan nusantara lebih menggambarkan kewilayahan budaya.

Membangun Karakter Bangsa yang Berbudaya

Karakter adalah watak, yang dapat diartikan sebagai pengembangan dari jati diri manusia itu sendiri. Dengan demikian karakter seseorang atau karakter manusia atau karakter bangsa lebih mencerminkan jati diri seseorang atau jati diri manusia atau jati diri bangsa daripada identitas fisiknya. Karakter merupakan aspek kepribadian manusia; sedangkan aspek kepribadian yang lain adalah intelektual, temperamen, dan keterampilan (skill).

Pada dasarnya karakter dan itu dapat diubah, dibentuk ataupun dikembangkan, demikian juga dengan keterampilan; sementara itu kalau intelektual dan temperamen sangat sulit diubah, dibentuk

ataupun dikembangkan. Dalam hal ini jelas sekali bahwa karakter setiap manusia atau sekelompok manusia bisa dikembangkan; oleh karena itu usaha untuk membangun karakter budaya politik bangsa menjadi sesuatu yang sangat realistik.

Soekarno sebagai *founding father* negara ini sering mengemukakan pentingnya membangun jati diri bangsa yang dalam hal ini adalah bangsa Indonesia, dan jati diri bangsa haruslah dibangun melalui pembangunan karakter bangsa atau yang oleh Soekarno disebut sebagai *national and character building*. Para pendiri republik ini telah bersepakat bahwa membangun jati diri atau membangun karakter bangsa harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan mengingat tingginya tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia, maka wajar kita bertemu dalam hotel ini pada hari ini untuk melakukan FGD agar semangat keindonesiaan dalam kebinnekaan terus dapat dibina dan dipupuk.

Pembangunan karakter bangsa ini penting terus dapat dibina, bukan hanya pembangunan fisik, karena kalau bangsa tidak ada karakter maka tunggulah kehancuran bagi bangsa itu sendiri seperti yang dialami bangsa Cina dalam pembangunan tembok Cina. Dimana pada saat itu Ketika bangsa Cina ingin hidup tenang, mereka membangun tembok Cina yang sangat besar. Mereka berkeyakinan tidak akan ada orang yang sanggup menerobosnya karena tinggi sekali. Akan tetapi 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun, Cina terlibat tiga kali peperangan besar. Pada setiap kali terjadi peperangan itu, pasukan musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjatnya, tapi cukup dengan menyogok penjaga pintu gerbang. Cina di zaman itu terlalu sibuk dengan pembangunan tembok, tapi mereka lupa membangun karakter budaya bangsanya.

Menghancurkan karakter sebuah bangsa, diperlukan tiga cara untuk melakukannya, yaitu:

- a) Hancurkan tatanan keluarga.
- b) Hancurkan pendidikan.
- c) Hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawan.

Untuk menghancurkan keluarga caranya hancurkan tatanan keluarga seperti yang lagi berlaku saat ini, LGBT, free sex, para ibu-

ibu sibuk dengan dunia luar dan anak tidak ada yang urus. Para ibu akan lebih bangga menjadi wanita karir ketimbang ibu rumah tangga dengan dalih hak asasi dan emansipasi.

Pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Kurangi penghargaan terhadap mereka, alihkan perhatian mereka sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif, dengan tujuan materi semata, hingga mereka abai terhadap fungsi utama sebagai pendidik, sehingga semua siswa meremehkannya.

Untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan rohaniawan/ulama adalah dengan cara melibatkan mereka kedalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata, hingga tidak ada lagi orang pintar yang patut dipercayai. Tidak ada orang yang mendengarkan perkataannya, apalagi meneladani perbuatannya.

Apabila ibu rumah tangga sudah hilang, para guru yang ikhlas lenyap dan para rohaniawan dan tokoh panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi dengan nilai-nilai luhur? Itulah awal kehancuran yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran bangsa akan terjadi, sekalipun tubuhnya dibungkus oleh pakaian mewah, bangunan fisik yang megah, dan dibawa dengan kendaraan yang mewah. Semuanya tak akan berarti apa apa, rapuh dan lemah tanpa jiwa yang tangguh.

Memang setiap bangsa memiliki karakter dan jati dirinya masing-masing yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Jati diri ini dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya letak geografis, budaya, ekonomi, politik, agama, dan lainnya. Jati diri suatu bangsa merupakan ciri khas dari bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia yang bergeografis luas berbeda dengan jati diri bangsa Singapura yang bergeografis sempit; jati diri bangsa Indonesia yang beragam etnis berbeda dengan jati diri bangsa Timor yang etnisnya lebih seragam misalnya.

Dalam pidato di hadapan para alumni Universitas Indonesia (UI) Jakarta tahun 1957, Bung Hatta menyatakan “Ilmu dapat dipelajari oleh segala orang yang cerdas dan tajam otaknya, akan tetapi manusia manusia yang berkarakter tidak diperoleh dengan

begitu saja. Pangkal segala pendidikan karakter adalah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Pendidikanilmiah dapat melaksanakan pembentukan karakter itu, karena seperti yang saya katakan tadi ilmu ujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran.”

Bung Hatta juga menyatakan, “... Dalam memelihara dan memajukan ilmu, maka karakterlah yang utama, bukan kecerdasan. Kurang kecerdasan dapat diisi, kurang karakter sukar memenuhinya seperti ternyata dengan berbagai bukti di dalam sejarah. Kecerdasan dapat dicapai dengan jalan studi oleh orang yang mempunyai karakter....”.

Membangun Budaya Politik Yang Sehat

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara umum budaya politik terbagi atas tiga. *Pertama*, budaya politik apatis (tidak acuh, masa bodoh, dan pasif) . *Kedua*, budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi). *Ketiga*, budaya politik partisipatif (aktif)

Untuk mendorong budaya politik sehat maka diperlukan komunikasi politik yang baik. Komunikasi politik diartikan sebagai komunikasi yang memiliki konsekuensi mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Konflik dimaksud bisa perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, dan perbedaan gagasan. Dalam manajemen konflik, semua perbedaan itu bisa menjadi khazanah perbendaharaan pemikiran apabila semua perbedaan itu terakomodasi, teradaptasi, dan teraktualisasi. Tidak ada yang merasa terkalahkan dan memenangkan “pertandingan”. Semua merasa pas dan puas serta memperhatikan buah pikirannya. Selama pengelolaannya baik, selama itu pula berbagai kepentingan akan terasa enjoy di tengah keragaman. Keragaman di

negara mana pun tentu dipengaruhi oleh berbagai budaya dan kearifan lokal yang telah wujud Indonesia yang dikenal dengan ramah, suka gotong royong, tenggang rasa, toleran, dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. kearifan lokal ini akan membuat para politisi benar-benar memahami dan menjalankannya. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi dalam masyarakat Indonesia.

Apabila para politisi memperhatikan etika politik dan menyadari tentang latar belakang budayanya, tentu tindakan dan perilakunya akan sesuai dengan tradisi budaya tadi, tidak terpengaruh dengan budaya politik Machiaveli yang individualis, hedonis, dan mekanis.

Kebudayaan Bangsa dan Peran Kearifan Lokal

Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial, kebudayaan pernah menjadi arus utama (*mainstreaming*) di dalam pembangunan, yaitu pada 1950-an dan 1960-an. Ketika itu kebudayaan dilihat sebagai salah satu variabel penentu pembangunan (*cultural determinism*). Dalam hal sebagai arus utama, kebudayaan tidak hanya dilihat sebagai hasil karya terlihat individu dan kelompok semata. Kebudayaan juga mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku-perilaku. Sejumlah ilmuwan sosial berargumentasi bahwa ada budaya tertentu yang mampu menjadi daya dorong dan daya ungkit kuat bagi modernisasi dan pada akhirnya bagi pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran. Ada juga yang melihatnya sebagai penghalang (*barriers*).

Perspektif kebudayaan sebagai arus utama dalam pembangunan kemudian mengalami pelemahan dan digantikan oleh dua arus utama lainnya, yaitu arus utama pasar dan arus utama negara. Arus utama pasar berangkat dari pemikiran yang bercorak individualisme dan liberalisme mengatakan bahwa perekonomian suatu masyarakat akan tumbuh dan berkembang, serta anggotanya akan menikmati kemakmuran manakala kekuatan pasar diberi keluasaan (*market leads to development*) di dalam arena perekonomian. Negara, dalam perspektif ini, diharap seminimal mungkin terlibat di dalam pengelolaan ekonomi, manakala kekuatan pasar diberi keluasaan (*market leads to development*) di dalam arena perekonomian.

Sebaliknya, arus utama negara berpandangan bahwa mekanisme pasar itu harus dikendalikan. Di samping untuk menghindari ketimpangan antar pelaku ekonomi dan memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang tidak beruntung, adanya peran penting negara di dalam perekonomian merupakan konsekuensi dari pemikiran bahwa negara memiliki daya dorong dan kepemimpinan bagi adanya iklim ekonomi yang tidak hanya memungkinkan tumbuh dan berkembang melainkan juga iklim ekonomi yang adil. Perspektif *state leads to development* seperti itu pernah terkenal dan dipakai untuk menjelaskan kuatnya pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara pada awal-awal 1990-an. Bank Dunia yang sebelumnya terkenal sebagai penganut arus utama pasar, ketika itu mengakui peran penting negara di dalam mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi. Negara, dalam perspektif demikian, tidak lagi dianggap sebagai penghambat laju pertumbuhan ekonomi tetapi dipandang sebagai dirijen bagi pelaku ekonomi untuk berlari kencang di bidang ekonomi. Negara, misalnya, memiliki otoritas untuk mengarahkan kebijakan industri (*industrial policies*) yang dipandang lebih tepat.

Krisis ekonomi yang pernah melanda Asia Timur dan Tenggara pada medium 1997 menjadi titik tolak bagi adanya kritik kembali terhadap arus utama negara. Kalau sebelumnya Bank Dunia memuji peran negara, setelah krisis itu Bank Dunia beserta IMF justru menuduh bahwa krisis itu tidak lepas dari terlalu besarnya peran negara di dalam perekonomian. Maka muncullah kembali resep untuk mengurangi peran negara dan mendorong kembali peran pasar yang lebih besar. Resep seperti ini pula yang dipaksakan untuk dipakai Indonesia di dalam menyelesaikan krisis moneter pada pertengahan 1997 itu.

Adanya bandul arus utama pembangunan yang saling bergantian akibat titik lemah masing-masing itu membuat adanya upaya kembali menengok arus utama kebudayaan sebagai bandul yang lain (*bring-in-the culture-back-in*). Bahwa, di dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adil itu tidak harus didasarkan pada argumentasi dari pemikiran yang pro pasar dan pro negara, melainkan berbasis kebudayaan.

Tumbuhnya pengungkit pertumbuhan berbasis gagasan-gagasan kreatif di berbagai negara menunjukkan bahwa yang menjadi daya dorong dan daya ungkit kegiatan perekonomian itu merupakan pola pikir yang dimiliki oleh individu manusia, yaitu pola pikir yang memungkinkan adanya upaya untuk melakukan pencarian, daya cipta, mengejar sesuatu yang baru demi kebaikan kebaikan secara terus menerus. Pola pikir ini merupakan produk dan reproduksi kebudayaan.

Meskipun demikian, argumentasi yang dibangun di dalam arus utama kebudayaan ini memiliki sejumlah perbedaan dengan arus utama sebelumnya. Kalau sebelumnya terdapat penilaian bahwa hanya budaya tertentu saja yang mampu memberi daya ungkit bagi modernisasi, masuknya pemikiran post-modernisasi berisi adanya penghargaan terhadap nilai-nilai yang sebelumnya dipandang tradisional dan keberagaman. Bahwa, untuk mencapai kebaikan tidak selamanya berpegang pada adanya nilai-nilai tertentu yang bercorak linier, melainkan juga nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam komunitas-komunitas. Maka, dalam perspektif yang lebih baru itu dikenal dan dikembangkan konsep kearifan lokal.

Kearifan lokal (*local wisdom*) yang merupakan hasil dari *Local Genius* dari berbagai suku bangsa, kearifan lokal inilah seharusnya dirajut dalam satu kesatuan kebudayaan (*Culture*) untuk mewujudkan suatu bangsa yaitu, Bangsa Indonesia. Budaya dilahirkan beribu tahun yang lalu sejak manusia ada di Bumi. Kebiasaan yang bagai telah menjadi dan membentuk perilaku manusia tersebut diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya itu sendiri merupakan suatu produk dari akal budi manusia, setidaknya apabila dilakukan pendekatan secara etimologi. Budaya dalam hal ini disebut kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam pergiliran budaya antar generasi ini dibutuhkan adanya generasi perantara yang sudah mampu melakukan pemahaman dari generasi tua dan mampu mengkomunikasikan kedalam bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh generasi selanjutnya.

Derasnya arus globalisasi, modernisasi dan ketatnya puritanisme dikhawatirkan dapat mengakibatkan terkikisnya rasa kecintaan terhadap kebudayaan lokal. Sehingga kebudayaan lokal

yang merupakan warisan leluhur terinjak-injak oleh budaya asing, tereliminasi di kandangnya sendiri dan terlupakan oleh para pewarisnya, bahkan banyak pemuda yang tak mengenali budaya daerahnya sendiri. Mereka cenderung lebih bangga dengan karya-karya asing, dan gaya hidup yang kebarat-baratan dibandingkan dengan kebudayaan lokal di daerah mereka sendiri.

Modernisasi mengikis budaya lokal menjadi kebarat-baratan, sedangkan puritanisme sering menganggap budaya sebagai praktik sinkretis yang harus dihindari. Menurut penulis, sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya lokal harus selalu dipertahankan untuk memperkuat karakter anak bangsa. Padahal, jika kita memahami, kebudayaan lokal di daerah tidak kalah saing dengan budaya-budaya asing yang belum kita kenal.

Kearifan lokal memiliki posisi yang penting di dalam membangun budaya nusantara ke depan. Secara politik hal ini bersambung dengan implementasi kebijakan otonomi daerah yang memberi ruang lebih besar kepada daerah untuk mengelola dirinya sendiri. Di era otonomi, daerah diharapkan mengembangkan dirinya tidak hanya berdasar potensi ekonomi yang dimiliki melainkan juga potensi budaya yang dimilikinya. Dengan demikian, di dalam membangun dirinya, masing-masing daerah tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Hanya saja, adanya posisi budaya daerah yang cukup bermakna itu tidak serta merta menghilangkan budaya yang bercorak nusantara. Kesepakatan-kesepakatan bersama sebagai suatu bangsa tetaplah menjadi sesuatu yang tinggi tempatnya. Kalau tidak demikian, yang terjadi adalah suatu paradok, di mana pemberian titik berat pada kearifan lokal yang berlebihan hanya akan melahirkan kontradiksi dengan kesepakatan-kesepakatan bersama, termasuk kontradiksi antara kearifan lokal yang satu dengan yang lain.

Kebudayaan lokal merupakan kebudayaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Kearifan lokal merupakan akumulasi dari pengetahuan dan kebijakan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang merepresentasikan perspektif teologis, kosmologis dan sosiologisnya. Budaya bangsa yang berbudi luhur, sopan santun, ramah tamah, gotong royong,

disiplin, taat aturan yang berlaku dan sebagainya. Budaya merupakan *source* yang takkan habis apabila dapat dilestarikan dengan optimal. Selain itu, apabila negara menginginkan profit jangka panjang, alternatif jawabannya adalah lestarikan budaya politik bangsa yang berorientasi pada kearifan lokal yang telah hidup beribu tahun dalam sanubari bangsa Indonesia.

www.mpr.go.id

REVOLUSI MENTAL SEBUAH KEHARUSAN MEMPERBAIKI KARAKTER BUDAYA BANGSA

Oleh : Nab Bahany As

Apa yang salah dengan mental bangsa ini? Sehingga Presiden Jokowi sebagai bangsa sudah demikian bobrok? Kalau memang itu kenyataan dalam kita berbangsa dan bernegara, yang tak lagi taat pada aturan, menjunjung harus menyerukan revolusi mental bagi bangsa Indonesia. Apakah mental kita tinggi nilai norma, moral dan etika, mungkin revolusi mental yang diserukan Presiden Jokowi bagi bangsa ini harus menjadi bagian prioritas dari program pembangunan manusia Indonesia yang selama ini terasa diabaikan.

Gerakan revolusi mental harus disosialisasikan secara serius, mulai dari penyelenggara negara “kelas kakap”, hingga aparaturnya paling bawah di tingkat hansip pos kambling di pedesaan. Sehingga mereka dapat memahami apa yang dimaksud revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi, dan untuk apa revolusi mental bagi bangsa ini harus dilakukan.

Merevolusikan mental bangsa yang dianggap sudah bobrok bukanlah sebuah selogan harapan kosong. Rakyat menunggu perubahan untuk keluar dari kejenuhan dan sikap apatisnya terhadap penyelenggaraan negara yang solit dan berwibawa. Maka revolusi mental bagi sebuah bangsa bukan retorika, tapi sebuah gerakan nyata yang memerlukan konsep dan strategi yang mengarah pada penyadaran seluruh komponen bangsa, untuk kembali ke dasar tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini.

Artinya, bila kita menyadari bahwa kita sudah jauh tersesat dalam sebuah perjalanan, maka cepat-cepatlah kembali ke pangkal jalan pada saat kita memulai perjalanan tadi, untuk memulai perjalanan baru dengan penuh kehati-hatian, agar tidak tersesat lagi untuk sampai ke tujuan. Akan tetapi. Perjalanan bangsa Indonesia yang sudah memasuki usia 73 kemerdekaan pada tahun 2018 ini,

seharusnya usia yang sudah cukup matang untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa warga negaranya. Akan tetapi, sampai hari ini bangsa kita masih harus memikirkan perlu adanya sebuah revolusi mental, ini berarti selama 73 tahun perjalanan bangsa ini masih ada yang belum beres mentalitasnya dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu, apa yang dikritik Mochtar Lubis (1977) dalam sebuah orasi budaya: “*Manusia Indonesia Sebuah Pertanggung jawaban*”, kritikan ini hampir tak terbantahkan bila dihubungkan dengan sikap mental sebagai karakter manusia Indonesia hari ini. Orasi yang sempat menghebohkan kemapanan penguasa Orde Baru kala itu, Mochtar Lubis mengungkapkan beberapa contoh sikap mental yang sangat melekat pada diri manusia Indonesia. Antara lain adalah mental *hopokritis* alias *munafik*. Karena mental ini, manusia Indonesia suka berpura-pura. Lain di muka, lain di belakang. Ini adalah mental tidak satunya kata dengan perbuatan. Ibarat orang berzikir: bertukarnya *angguk* dengan *Ilallah*. Yang diucapkan lain, yang dikerjakan lain. Dalam ajaran agama ini munafik namanya.

Ciri kedua mental manusia Indonesia, kata Mochtar Lubis, adalah mental enggan bertanggungjawab atas kesalahan perbuatannya. Raibnya triliunan uang negara Bank Senturi hingga hari ini masih menjadi misteri, karena tak ada yang mau bertanggung jawab. Kalimat “bukan saya” atau kalimat “itu perintah atasan” atau kalimat “saya tidak tahu masalah itu” adalah kalimat paling gampang terucap dari mulut manusia Indonesia yang tak mau bertanggungjawab atas kekeliruan yang dilakukan.

Ciri ketiga mental manusia Indonesia, menurut Mochtar Lubis, adalah mental berjiwa feodal. Meskipun salah satu tujuan dari kemerdekaan adalah untuk membebaskan bangsa ini dari feodalisme, namun dalam perkembangan berbangsa dan bernegara, mental feodalisme ini terus tumbuh subur dalam jiwa manusia Indonesia, utamanya dalam komponen masyarakat yang punya kuasa. Sehingga mental “*asal bapak senang*” tak dapat dihilangkan dalam budaya manusia Indonesia.

Ciri lainnya dari mental manusia Indonesia, dalam orasi Mochtar Lubis, adalah mental misih perya pada mistis-supranatural,

alias percaya pada takhyul. Dalam mental budaya ini untuk meraih suatu kesuksesan atau keutungan (keberhasilannya) tanpa mau bekerja keras atau berangkat dari bawah. Dalam mental ini, iri hati, dengki-khianat (*ku'eh* dalam bahasa Aceh) sudah menjadi bagian dari sikap mental budaya manusia Indonesia untuk meraih keuntungannya sendiri, kelompok, atau kroninya, meskipun harus mencelakakan orang lain.

Apa yang dicirikan Mochtar Lubis terhadap sikap mental sebagai karakter dari budaya bangsa ini bukan tidak berpengaruh bagi perkembangan pembangunan bangsa. Bangsa yang dulunya dibangun dengan cita-cita luhur, penuh kebersamaan, kegotongroyongan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya justru banyak harta negara yang “digotongroyongkan” oleh sebagian komponen bangsa yang bermental sebagaimana telah digambarkan Mochtar Lubis. Akibatnya, tujuan dari cita-cita negara-bangsa untuk menjadi bangsa yang makmur, berdaulat, adil dan sejahtera sebagaimana termaktup dalam lima visi dasar negara (Pancasila) makin terseok-seok sampai ketujuan.

Dalam sejarah negara-bangsa di mana pun di dunia, setiap pergantian pemimpin negara, rakyat selalu menaruh harapan baru. Langsernya Presiden Suharto sebagai penguasa Orde Baru, yang kemudian digantikan B.J. Habibie dianggap kemenangan sipil yang luar biasa, setelah Indonesia tercengkeram dalam kekuasaan militeris yang sertralistik selama lebih dari tiga dasawarsa. Pergantian pemimpin ini disambut dengan euforia reformasi yang luar biasa oleh semua komponen bangsa, dengan harapan pemimpin baru ini dapat membangun Indonesia baru yang lebih baik.

Ketika reformasi bergulir, dalam beberapa hal perubahan memang sangat cepat terjadi. Pers yang sebelumnya terkekang mulai bebas bersuara meskipun harus dalam koridor kode etik jurnalistiknya. Istana negara yang sebelumnya disakralkan Presiden Suharto mulai transparan terbuka. Wartawan bisa langsung mewawancarai Presiden di istana. Seniman dan ulama, serta pimpinan adat tak sulit lagi memnembus istana menemui Presiden sejak Abdurrahman Wahid. Pergantian era Orba (1965-1997) ke era reformasi (1998) hingga

sekarang ini dalam beberapa sisi memang telah banyak membawa perubahan bagi bangsa ini. Termasuk amandemen beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Meskipun di awal reformasi ini, Indonesia harus rela melepaskan Timor Timur dari NKRI untuk mendirikan negara sendiri masa Presiden Habibie. Bisa jadi, lepasnya Timtim dari NKRI saat itu adalah kecolongan pemimpin Indonesia yang terlanjur tak disengaja, akibat evoria reformasi Indonesia sebagai sebuah negara yang belum berpengalaman berdemokratis.

Secara kasat mata, selama 21 tahun usia reformasi saat ini, dari segi fisik Indonesia mungkin tak ada yang kurang. Pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan perekonomian rakyat terus bertumbuhan dari hilir hingga ke hulu. Rakyat yang dianggap kurang mampu disantuni negara, mulai dari jatah beras raskin hingga bantuan uang langsung tunai (BLT). Meskipun program ini bukan cara yang baik bagi negara untuk mendidik bangsa tumbuh mandiri. Cara ini justru bisa jadi bagian dari upaya melestarikan mental bangsa untuk terus ketergantungan, yang dapat membunuh semangat mental untuk menjadi bangsa pekerja keras, berinovatif, kreatif, dan produktif sebagaimana dikampanyekan Presiden Jokowi.

Karena itu, bicara revolusi mental sebuah bangsa bukan retorika, tapi bicara perubahan, yang tidak bisa dilihat dalam penggalan-penggalan yang sifatnya retorik. Revolusi mental harus dilihat keseluruhan karakter bangsa, mulai dari mental kaum petani, nelayan, pedagang kaki lima, tukang asongan, pengamen, tukang parkir, tukang becak, supir angkot, hingga mental pejabat secara menyeluruh, apakah masih taat dan patuh pada aturan yang berlaku.

Mengapa pedagang kaki lima selalu bentrok dengan Satpol PP, nelayan sering mengancam mogok melaut, pupuk petani sering raip di pasaran, L-piji hampir saban hari membuat masyarakat repot kerana kelangkaannya, dan mengapa oknum pejabat hampir tiap bulan harus terseret ke penjara karena penyalahgunaan uang negara. Itu semua kerana ada mental, karakter budaya yang tidak beres di situ, yaitu mental tidak taat pada aturan yang sudah diatur sedemikian rupa untuk melindungi warga negara dari segala ketidaknyamanan, untuk hidup dalam kebersamaan yang aman, damai dan sentosa. Itulah tujuan

dibuatnya aturan, dibuatnya Undang-Undang negara, agar kehidupan manusia-bangsa tidak liar seperti kehidupan hewan di tengah padang yang tidak punya akal dan pikiran, sehingga mereka bebas berbuat apa saja menurut kemauan instingnya.

Tentu saja, kita merindukan karakter dan mental budaya bangsa yang santun, taat aturan, patuh pada hukum yang berlaku. Tetapi kerinduan ini tak ubahnya seperti apa yang disyairkan Ebiet G.A.D dalam lagunya: “kerinduan hanya tinggial kerinduan, anakmu sekarang banyak menanggung beban”. Pertanyaan kita, akankah gagasan Presiden Jokowi untuk mengerakkan revolusi mental bangsa ini akan terwujud dalam masa kepemimpinannya. Apakah gagasan ini akan menjadi “jauh panggang dari api”?

Seperti halnya gerakan reformasi birokrasi masa Presiden SBY, yang malah membentuk Kementerian khusus (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Yang anehnya, gerakan reformasi birokrasi masa Presiden SBY lain Kementerian lain pula aturan reformasi birokrasinya. Sehingga gerakan reformasi birokrasi yang dijalankan masa SBY aturannya sangat tergantung pada selera Kementerian masing-masing. Kementerian Agama punya aturan reformasi birokrasi tersendiri, Kementerian Dalam Negeri juga begitu. Demikian pula Kementerian-kementerian lainnya.

Mengacu pada kosep Weber, mestinya birokrasi pemerintahan sebagai penyelenggara administrasi negara memiliki landasan yang sama pada semua biro pemerintahan. Maksudnya, semua Departemen dapat menjalankan keseragaman aturan yang dibuat negara dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga terhindar dari birokrasi partisan. Tetapi di negeri kita, birokrasinya aneh, tapi nyata. Tiap Kementerian dapat membuat aturan birokrasi masing-masing dalam bentuk reformasi birokrasi yang terkadang bisa tidak sinergi antara birokrasi satu Kementerian dengan Kementerian lainnya.

Oleh sebab itu, gerakan revolusi mental yang dicanan Presiden Jokowi harus lebih terarah pada konsep keseragaman aturan untuk mendukung gerakan revolusi mental bangsa ini. Termasuk revolusi mental birokrasi yang dianggap gagal masa Presiden sebelumnya. Ini sebenarnya ini kerja berat tak hanya bagi seorang Menteri Koordinator

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tapi juga bagi seluruh komponen bangsa dapat berperan serius untuk menjadi sebuah gerakan kebudayaan dalam merubah nilai budaya manusia Indonesia untuk kembali pada tujuan dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini.

Oleh karenanya, revolusi mental yang digerakkan Presiden Jokowi, sebenarnya adalah sebuah revolusi budaya menyengket perubahan perilaku, karakter, dan sikap mental manusia Indonesia untuk kembali ke jatidiri sebagai bangsa yang berwibawa dan berbudaya luhur, yang menghargai manusia bukan kerana pangkat, kedudukan, atau jabatan, tapi bagaimana kita membangun budaya kita yang menghargai manusia sebagai manusia.*

REFERENSI

- Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Weber dan Islam*, Jakarta, 1983.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985.
- Lawrence E. Harrison, *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia Sebuah Pertanggungjawaban*, (Ceramah Kebudayaan tanggal 6 April 1977), CV. Haji Masagung, Jakarta, 1997.
- Soedjatmoko, *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*, PT. Tirta Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.

INTERNALISASI NILAI KARAKTER DALAM BUDAYA POLITIK BANGSA SEBAGAI PROSES PENGUATAN SISTEM NILAI

Oleh : Dr. Rusli Yusuf, M.Pd.

LATAR BELAKANG

Secara harfiah berbicara karakter yaitu membicarakan watak, “perangai” khas dari seseorang individu dan juga masyarakat. Karakter menjadi ciri khas seseorang atau masyarakat, sehingga terkadang untuk mengetahui suku bangsa tertentu cukup dengan mempelajari karakternya saja, sebab karakter senantiasa menyatu dan menjadi ciri khas dari setiap suku bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki sumber nilai utama sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila.

Namun, ironisnya, sebagai bangsa yang memiliki fondasi nilai karakter Pancasila, karakter masyarakat Indonesia telah mulai terdegradasi. Degradasi karakter yang terjadi dalam masyarakat kita dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, diantaranya adalah rapuhnya pemahaman dan pengalaman pancasila pada diri masyarakat Indonesia, sehingga sebagian oknum yang bekerja di pemerintahan berani melakukan tindakan yang merugikan negara, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pengaruh dari kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini, sehingga telah menggeser sikap, tradisi dan budaya masyarakat Indonesia ke arah yang lebih moderat dan individualisme. Atas dasar uraian di atas, dapat diajukan satu pertanyaan yaitu: bagaimana membangun karakter bangsa menjadi tata nilai atau sistem nilai dalam sistem budaya politik kita ? untuk menjawab pertanyaan ini, maka akan dibuat uraian dalam pembahasan berikut ini.

PEMBAHASAN

Penguatan terhadap pembentukan karakter dapat dilakukan dalam pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal. Dalam pendidikan formal, pembentukan karakter ini sering dianggap tugas utama dari guru ataupun para pendidik agama di dalam masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan nonformal, pembentukan karakter lebih ditekankan pada tugas orang tua dan lingkungan sosialnya. Pengklasifikasian tugas tersebut justru menghambat pembentukan karakter suatu individu. Karakter pada prinsipnya merupakan kombinasi antara lingkungan dan keluarga, masyarakat, sekolah yang membentuk perilaku seorang individu. Apabila tugas tersebut diserahkan pada suatu kelompok, hal ini justru tidak memberikan keragaman pengalaman pada masing-masing individu. Hal ini sesuai dengan pendapat Utama Bandi (2011) manusia utuh ditandai dengan berkembangnya domain pendidikan yaitu kognitif, afektif, fisik, maupun psikomotorik ke arah positif.

Pembentukan karakter juga harus disinergikan dengan budaya politik bangsa. Hal ini dilakukan agar terbentuknya sebuah identitas pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Budaya politik bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi, pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan (Saleh & Munif, 2015). Oleh karena itu, sinergisitas antara pemebentukan karakter dan budya politik bangsa benar-benar harus terintegrasi.

Budaya politik bangsa Indonesia yang orientasinya negatif antara lain adalah bersikap apatis. Sikap apatis ini diwujudkan dengan ketidakpedulian sebagian oknum masyarakat untuk tidak terlibat langsung dalam hal pembentukan karakter. Meskipun demikian, upaya untuk mengintegrasikan penguatan karakter telah dilakukan oleh pemerintah melalui budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi), dan budaya politik partisipatif (aktif). Akan teteapi, bila pada suatu individu tetap mengedepankan sikap apatis, upaya yang dilakukan pemerintah tetap akan sia-sia.

Ditinjau berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam budaya politik, secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni (1) budaya politik parokial, (2) budaya politik kaula, dan (3) budaya

politik partisipan. Budaya politik parokial ini merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dan suatu individu yang sangat rendah. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kegotong-royongan yang dilaksanakan pada suatu kegiatan. Selanjutnya, budaya politik kaula cenderung keterlibatan masyarakat dan suatu individu yang meningkat dibandingkan dengan budaya politik parokial yang sangat rendah. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam budaya politik dikatakan bagus apabila diterapkan budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan ini seruruh masyarakat memiliki kesadaran bernegara. Akan tetapi, budaya politik partisipan ini, khususnya di Aceh cenderung lebih menonjol pada keterlibatan pesta pemilihan umum pemilihan kepala daerah pada suatu partai tertentu. Hal itu dapat dilihat dengan berbondong-bondongnya masyarakat untuk hadir dalam kampanye ataupun deklarasi suatu calon.

Karakter dibentuk dari perjalanan hidup seorang yang disertai oleh pengetahuan, pengalaman, serta penilaian terhadap pengalaman itu sendiri. Kepribadian dan karakter yang baik merupakan interkasi seluruh totalitas manusia sehingga pengetahuan, pengalaman serta penilaian adalah modal utama suatu bangsa dalam membentuk karakter bangsa. Dalam hal ini Eric Fromm (Pelly, 1994) menjelaskan perkembangan di eropa sebagai perkembangan peradaban modern. Menurutnya pengetahuan adalah hal pertama yang harus kita ketahui dalam pembentukan karakter bangsa. Itulah sebabnya seorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi malah mempunyai karakter yang buruk sehingga mereka tidak mencerminkan sikap dan perilaku bahwa mereka memiliki ilmu yang tinggi. Dari hak tersebut kita dapat ketahui bahwa pengetahuan yang yang mendalam bukan menjadi jaminan atau tidak selalu mencerminkan bahwa seseorang mempunyai sikap dan perilaku yang baik.

Semua yang terlihat baik belum tentu baik seperti yang kita pikirkan. Sebagaimana di tegaskan Alexis de Toqueville (Bronson, 1998) mengatakan bahwa “setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun private yang sejalan dengan demokrasi konstitusional”. Membentuk karakter bangsa dapa dimulai dari membentuk karakter pribadi terlebih dahulu.

Bukankah karakter seseorang terutama pemimpin dapat mempengaruhi atau setidaknya mencerminkan karakter sebuah bangsa. Secara normatif, pembentukan karakter bangsa merupakan hal yang amat penting bagi generasi mudan dan bahkan menentukan nasib bangsa di masa depan. Argumentasinya adalah di tangan generasi mudalah terletak nasib masa depan bangsanya.

Generasi muda perlu memiliki pengetahuan akan pentingnya mental kepribadian yang kuat, semangat juang yang tinggi, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keras. Itulah sejumlah prasyarat untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat berada sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Lunturnya rasa nasionalisme itu sendiri, dapat menyebabkan tidak adanya lagi generasi penerus bangsa di masa depan yang mau meneruskan karakter dan kepribadian bangsa yang mencerminkan moral baik bangsa kita di masa lalu. Sesungguhnya gerakan yang merupakan intisari dan rangkuman pemikiran dari pemikir ini, tidaklah sulit dilakukan oleh bangsa kita, karena gerakan tersebut sejatinya berakar dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Gerakan yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Silalahi (2012; 91-110) adalah: *Pertama*, membangun kembali karakter bangsa (character builder). Yang dimaksud dengan situasi dimana generasi penerus bangsa mengalami dilema seperti gambarkan diatas, bahwa generasi muda sebagai penyambung lidah bangsa justru harus membangun kembali karakter dan mental bangsanya. Dengan demikian semangat berjuang dan mental baja bangsa kita bisa kembali berkobar untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pendirian bangsa bangsa kita. Tentu saja diharapkan generasi muda kita selalu mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka sehari-hari dilingkungan manapun dan kapanpun. *Kedua*, sebagai pemberdayaan karakter (character enabler). Dalam membangun karakter bangsa, tidaklah cukup hanya dengan pembangunan karakter bangsa, melainkan harus sekaligus dengan pemberdayaan karakter bangsa itu sendiri. Kita sadari bahwa membangun karakter memang tidaklah semudah memberdayakan karakter. Akan tetapi, aspek pemberdayaan menjadi karakter penting karena jika diberdayakan, maka dia tidak akan cepat luntur dimakan

zaman. Oleh karena itu dalam pemberdayaan karakter ini sangat diperlukan kesadaran yang sangat tinggi. Asumsinya, jika karakter seorang tetap terjaga maka karakter bangsa juga bisa tetap terus di berdayakan. Agar di masa depan karakter bangsa tetap terjaga dalam koridor karakter bangsa yang unggul.

Ketiga, sebagai perekayasa karakter (*character engineer*). Hal ini sejalan dengan perlunya adaptasi daya saing untuk memperkuat ketahanan bangsa. Artinya, generasi muda bangsa kita harus mampu memodifikasi atau merekayasa karakter sesuai perubahan zaman. Karena seiring dengan perubahan zaman maka akan berubah pula kebutuhan-kebutuhan yang ada. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, kita perlu membangun atas asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya azas kerakyatan, azas kemufakatan, azas kedaulatan rakyat, azas kekeluargaan, azas kekuatan mayoritas, azas minoritas, asas penjaminan HAM, asas luberjurdil, asas persamaan. Hal ini tidak di pungkiri mulai terjadi kecacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini bisa dilihat mulai timbulnya konflik-konflik kecil di berbagai daerah dan jika dibiarkan bisa merong-rong eksistensi bangsa dan Negara. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka dalam proses pendidikan kita harus diarahkan bahwa karakter bangsa harus menjadi sistim nilai budaya dalam kita berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Theodorson (Pelly, 1994) mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai menurut Theodorson relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, Marpaung (2000) mengemukakan bahwa pada perkembangan, pengembangan, penerapan budaya dalam kehidupan, berkembang pula nilai-nilai yang melekat dimasyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Nilai tersebut dikonsepsikan sebagai nilai budaya.

Sistem nilai budaya merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat, mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh

dan tidak berharga dalam hidup. Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup yang memmanifestasi kongkritnya terlihat dalam tata kelakuan. Dari sistem nilai budaya termasuk norma dan sikap yang dalam bentuk abstrak tercermin dalam cara berfikir dan dalam bentuk kongkrit terlihat dalam bentuk pola perilaku anggota-anggota suatu masyarakat.

Ada beberapa pengertian nilai, yaitu sebagai berikut (1) nilai adalah sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya (pengertian secara umum). (2) Nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap-sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan dan penghargaan dari suatu pemikiran, objek atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang (3) Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran atau keinginan mengenai ide-ide, objek atau perilaku bersifat khusus (Rusli, 2017). Kemudian, sebagaimana yang diketahui dan disepakati bersama bahwa Pancasila merupakan sumber utama nilai-nilai di Indonesia, harus dijadikan sebagai sistem nilai dalam budaya politik kita. Dalam tulisan Rusli (2017) Adapun nilai yang terkandung pada pancasila diantaranya:

Pertama, Nilai ketuhanan, nilai ketuhanan yang maha esa artinya adanya pengakuan terhadap adanya tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan adanya ini bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan negara Atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan kebebasan memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing serta tidak berlaku diskriminatif terhadap kepercayaan agama lain. Namun pada faktanya, saat Pemilihan Umum di Jakarta banyak sekali dijumpai ketidakpahaman akan nilai ketuhanan. Misalnya adanya penyebaran isu SARA yang menyerang salah satu calon pasangan gubernur. Mereka beranggapan pemimpin yang tidak seiman akan memberikan mudharat daripada manfaat. Dengan cara tersebut pasangan cagub yang menyerang agar mampu memenangkan pilkada Jakarta. Cara demikian ini sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan pada Pancasila yang sangat menghargai keberagaman agama.

Kedua, Nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan dari orang lain. Nilai ini mengajarkan bagaimana kita bersikap dengan orang lain, menjaga perasaan orang lain, dll

Ketiga, Nilai persatuan, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha kearah bersatu dan kebulatan rakyat membina rasa Nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan juga merupakan penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan, sesuai semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Namun saat ini, nilai persatuan tersebut semakin berkurang. Yang paling teranyar adalah bentrokan mahasiswa satu kampus di Makassar beberapa waktu yang lalu, Hanya karena masalah sepele namun menggunakan otot bukan otak. Bahkan ada yang tak segan untuk membunuh temannya sendiri. Miris jika kita melihatnya, seharusnya sebagai generasi muda kita bersatu untuk berkarya menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat Indonesia, bukan malah tawuran dan saling menyakiti apalagi sampai membunuh.

Keempat, Nilai kerakyatan, nilai kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai kerakyatan ini sangat erat dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia bagaimana proses pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah dan mufakat dan memperkecil terjadinya perselisihan.

Kelima, Nilai keadilan, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriyah dan batiniah. Namun kenyataannya di Indonesia sangat sulit sekali di jumpai sebuah keadilan. Misalnya pembangunan, nampak jelas pembangunan hanya di pusatkan pada pulau Jawa saja, namun daerah atau pulau yang berada di luar pulau Jawa masih minim dan tidak menjadi skala prioritas. Di Kalimantan jarang sekali dijumpai jalan yang beraspal kualitas baik, jangankan jalan aspal beton jalan aspal yang biasa saja juga masih minim. Akibat dari itu tersendatnya arus transportasi sehingga melambatkan perputaran ekonomi. Nilai-nilai tersebut bersifat abstrak dan normatif karena sifatnya itu maka isinya masih belum bisa di Operasionalkan. Agar

mampu mengoperasionalkan nilai tersebut dijabarkan dalam suatu undang-undang dasar (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pendidikan karakter bangsa merupakan ciri khas yang harus dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu karakter bangsa harus mampu diinternalisasikan melalui sistem pendidikan kita secara integral dan harus terintegrasi dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan ko kurikuler, serta terjewantahkan dalam sistem sosial masyarakat kita, sehingga akan tercermin dalam budaya politik bangsa yang pada akhirnya menjadi sistem nilai bangsa sebagai patokan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Achmat Munif, dan Khoirul Saleh. Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. Addin Jurnal; Media Dialektika Ilmu Islam Vol 9, No 2 (2015)
- Branson, M.S.1998. *the role of civic education forthcoming Educational Policy Task Force Position Paper from the Communitarian network.*
- Fajar, Yogi Ahmad. 2012. "Menyoal Karakter Bangsa". Dalam Nugroho dkk. 2012. *Belajar Merawat Indonesia*. Bogor: Devisi Pendidikan Dompot Duafa.
- Pelly, Usman. 1994. Teori-Teori Ilmu Sosial Budaya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Penyusun, Tim. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Jakarta.
- Marpaung, Parlindungan. 2000. Analisis Perubahan Nilai Sosial Budaya Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Wilayah Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara. Program Pasca Sarjana USU, Medan.

- Saleh, Khoirul dan Munif, Achmat. 2015. "Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi". *ADDIN*. Vol. 9, No. 2 (309-332).
- Silalhi, Johan O. 2012. *Mengurai Masalah Bangsa dan Negara (Refleksi Pemikiran Kepemimpinan dan Kenegarawanan Menuju Indonesia Baru)*. Jakarta: Johansfoundation
- Utama Bandi, A. M. 2011. *Pembentukan Karakter Anak Melalui Aktivitas Bermain Dalam Pendidikan Jasmani*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yusuf, Rusli. 2017. *Pendidikan Karakter Kebangsaan (Seri Praktis Pembangunan Karakter di Perguruan Tinggi dalam Upaya mewujudkan Pemerintahan Yang Baik)*. Banda Aceh: Bina Karya Akademika.

KARAKTER DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH BESAR DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Dr. Samsul Bahri, M.Pd

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05 – 5,75 derajat Lintang Utara dan 94,99 – 95,93 derajat Bujur Timur. Dimana sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim dan 604 Gampong dengan luas wilayah 2.903,50 km². Mata pencaharian penduduk sebahagian besar disektor pertanian dan diikuti nelayan, peternakan, dll.

Kehidupan masyarakat sangat kental dengan nuansa agamis dimana agama Islam merupakan dasar dari setiap gerak yang dilaksanakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, ini masih dapat dilihat dalam kehidupan di Gampong-gampong dimana masih banyak ditemukan tempat-tempat pengajian baik untuk ibu-ibu maupun untuk anak-anak. Islam dan adat bagi masyarakat Aceh Besar hampir tidak dapat dipisahkan karena semua kegiatan yang bersendikan adat tidak pernah bertentangan dengan ajaran Islam.

Adat dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:

Adat sebagai norma/kaedah hukum, untuk memelihara dan membangun keseimbangan (equilibrium) kehidupan masyarakat dengan ketentuan barang siapa yang melanggarnya akan mendapat sanksi dari masyarakat.

Adat sebagai adat istiadat/kebiasaan-kebiasaan perilaku masyarakat dalam membangun tatanan yang tertib/ teratur, hirarkhis, seremonial, ritual untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dua hal tersebut (adat dan adat istiadat) merupakan jiwa (geist) pakaian kehidupan masyarakat Aceh Besar, yang secara umum terkenal dengan budaya adat. Dengan adat budaya inilah masyarakat Aceh Besar telah membuat sejarah kehidupan dalam peradaban dunia (kemegahan dan kekuatan Sultan Iskandar Muda). Sehingga pernah terkenal sebagai salah satu negara besar di dunia. Mengapa ? dengan budaya adat masyarakat Aceh Besar mampu membangun harkat dan martabatnya untuk menjadi masyarakat yang maju dan berdaya guna dalam kesatuan dan keutuhan wilayahnya. Kehilangan aspek ini berarti kehilangan ruh keacehannya yang bersifat “Adat ngon Agama lapei Zat ngon Sifeut”

PEMBAHASAN

Datangnya Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 begitu dasyat, telah menghancurkan dan memporak porandakan tidak hanya fisik materil tetapi juga lembaga-lembaga adat bersama komunitas masyarakat dan wilayah teritorial adatnya hancur berantakan. Disampng itu arus globalisasi dengan tehnologi yang berkembang sangat cepat juga berpengaruh besar terhadap kondisi karakter dan budaya masyarakat Aceh Besar saat ini.

Pemerintah Aceh Besar tidak tinggal diam untuk mengangkat kembali harkat dan martabat masyarakat Aceh Besar dimana semua sektor pembangunan terus dipacu bahkan sektor sumber daya manusia dengan berlandaskan syariat Islam menjadi prioritas pertama dari misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar periode 2017 – 2023.

Kita menyadari bahwa ketika kebudayaan menjadi anak tiri pembangunan, yang paling dulu terjadi adalah ketiadaan identitas diri. Sebab pada hakekatnya, kebudayaan adalah fondasi cara berfikir, sikap dan perilaku manusia dalam sebuah Negara. Untuk itulah pemerintah Aceh Besar memprioritaskan pembangunan budaya yang tercermin dalam pembangunan aklaK masyarakat Aceh Besar.

Sejarah telah memberi bukti. Ketika Bung Karno memimpin negeri ini dengan tiga konsep besarnya menyangkut soal ekonomi yang mandiri (berdikari), politik luar negeri yang bebas aktif serta kebudayaan nasional yang berkepribadian, rakyat seolah mendapat

gambaran yang jelas. Cara berfikir, sikap dan perilaku kesehariannya, termasuk sikap dalam berbangsa dan bernegara terfigurasi oleh ketiga hal yang secara gamblang mudah dimengerti dan dipahami. Konsep itu tentu tak lahir secara mendadak. Atau sekadar lontaran bersifat temporer, tetapi lahir berdasar pemikiran dan penggalian sekaligus kecerdasan yang boleh dikategorikan luar biasa. Sebab Bung Karno tak hanya melihat Indonesia masa lalu dan masa kini, melainkan juga memiliki wawasan yang luas untuk menggagas terwujudnya Indonesia sebagai sebuah Negara besar yang punya identitas alias jatidiri di masa yang akan datang.

Demikian juga halnya pemerintah Aceh Besar, untuk melindungi generasi muda dari bahaya dan ancaman narkoba yang sudah masuk hampir kesegala sendi kehidupan masyarakat terus mengkampanyekan bahanya narkoba bagi masyarakat, bahkan dengan bantuan BNN Pusat pemerintah Aceh Besar telah merubah kawasan ladang ganja yang terdapat di Lamteuba menjadi ladang holtikultura dengan berbagai macam tanaman.

Sosialisasi-sosialisasi kesekolah-sekolah dan hanpir disetiap pertemuan dengan masyarakat pemerintah selalu mengkampanyekan bahaya narkoba bagi kehidupan masyarakat. Dan Alhamdulillah kita dapat menekan meminilisir peredaran narkoba di Aceh Besar, walau kita tidak menutup mata bahwa hal ini belum tuntas untuk dikatakan selesai 100%.

Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat pemerintah Aceh Besar juga menggalakkan kehidupan budaya yang berkembang dimasyarakat, dimana dengan keterbukaan dan saling hormat menghormati sesama masyarakat Aceh Besar dapat menerima datangnya budaya dari luar yang nota bene tidak bertentangan dengan adat dan istiadat masyarakat yang besendikan syariat Islam. Dalam hari-hari besar nasional terkadang juga ditampilkan kesenian-kesenian nusantara yang ada bumi pertiwi Indonesia, ini menandakan bahwa masyarakat Aceh Besar tidak alergi dengan budaya nusantara. Kita juga menyaksikan dalam pawai banyak anak-anak yan memakai baju adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia.

Kita juga masih ingat rumusan Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) yang menyebut bahwa kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Pemikiran ini lahir – atau paling tidak diilhami – berdasar pemahaman dan keyakinan perlunya meletakkan tantularisme (Bhineka Tunggal Ika karya Mpu Prapanca yang terbaca dalam buku *Negarakertagama*) sebagai kerangka dasar bagi masyarakat saat itu dalam berbangsa dan bernegara. Dan ini berkembang di masyarakat Aceh Besar.

Secara jujur harus dikatakan, Reformasi belum meletakkan kebudayaan dan pendidikan karakter sebagai garda depan pembangunan karakter bangsa. Keberagaman yang sejatinya adalah rahmat sekaligus kekuatan justru berubah menjadi sarana dan ajang konflik berkepanjangan. Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal malah dianggap benda usang yang tak perlu lagi diurus dan diolah menjadi tata nilai terbarukan dalam dinamika jaman yang dari ke hari, tahun ke tahun semakin berat dan beragam.

Kehidupan manusia dikelilingi oleh budaya, hal ini disebabkan karena manusia selalu berupaya mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan yang mengharuskannya selalu bersinggungan dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik dan non fisik. Proses pembentukan budaya berlangsung berabad-abad dan teruji sehingga membentuk suatu komponen yang handal, terbukti dan diyakini dapat membawa kesejahteraan lahir dan batin. Komponen inilah yang disebut dengan jati diri.

Di dalam jati diri terkandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang merupakan hasil dari *Local Genius* dari berbagai suku bangsa, kearifan lokal inilah seharusnya dirajut dalam satu kesatuan kebudayaan (*Culture*) untuk mewujudkan suatu bangsa yaitu, Bangsa Indonesia. Budaya dilahirkan beribu tahun yang lalu sejak manusia ada di Bumi. Kebiasaan yang bagai telah menjadi dan membentuk perilaku manusia tersebut diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya itu sendiri merupakan suatu produk dari akal budi manusia, setidaknya apabila dilakukan pendekatan secara etimologi. Budaya dalam hal ini disebut kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam pergiliran budaya antar generasi ini dibutuhkan adanya generasi perantara yang sudah mampu melakukan

pemahaman dari generasi tua dan mampu mengkomunikasikan kedalam bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh generasi selanjutnya.

Derasnya arus globalisasi, modernisasi dan ketatnya puritanisme dikhawatirkan dapat mengakibatkan terkikisnya rasa kecintaan terhadap kebudayaan lokal. Sehingga kebudayaan lokal yang merupakan warisan leluhur terinjak-injak oleh budaya asing, tereliminasi di kandangnya sendiri dan terlupakan oleh para pewarisnya, bahkan banyak pemuda yang tak mengenali budaya daerahnya sendiri. Mereka cenderung lebih bangga dengan karya-karya asing, dan gaya hidup yang kebarat-baratan dibandingkan dengan kebudayaan lokal di daerah mereka sendiri. Slogan “aku cinta produk lokal. aku cinta buatan Indonesia” sepertinya hanya menjadi ucapan belaka, tanpa ada aplikasi nyata yang mendukung pernyataan tersebut. Penggunaan bahasa asing di media massa dan media elektronik bukan tidak mungkin menyebabkan kecintaan pada nilai budayalokal perlahan memudar. Padahal, bahasa sebagai alat dalam menyampaikan pembelajaran sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter pemuda. Tidak ada lagi tradisi yang seharusnya terwariskan dari generasi sebelumnya. Modernisasi mengikis budaya lokal menjadi kebarat-baratan, sedangkan puritanisme sering menganggap budaya sebagai praktik sinkretis yang harus dihindari. sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya lokal harus selalu dipertahankan untuk memperkuat karakter anak bangsa. Padahal, jika kita memahami, kebudayaan lokal di daerah tidak kalah saing dengan budaya-budaya asing yang belum kita kenal. Negara asing saja mau berselisih untuk mengakui budaya kita. Bukankah seharusnya kita bangga dengan budaya lokal yang telah diwariskan kepada kita generasi pelurus perjuangan bangsa? Dengan keadaan yang seperti ini perlu ditanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada para pemuda untuk meningkatkan kecintaan pemuda terhadap kebudayaan lokal. Maka, sangat diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap kearifan budaya lokal kepada para pemuda.

Inilah yang terus kita bangun dimasyarakat Aceh Besar dengan memberikan pemahaman melalui berbagai macam kegiatan baik ceramah agama maupun kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dimana

pentingnya menjaga budaya dan karakter untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kebudayaan lokal merupakan kebudayaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Namun yang terjadi pada pemuda sangat berbeda dengan apa yang kita pahami tentang kebudayaan lokal, bahkan kebudayaan itu sudah terkikis dan tergantikan oleh budaya asing yang sama sekali tidak kita pahami.

Bahkan disekolah-sekolah kita tekankan agar eksistensi budaya tetap kukuh, maka kepada generasi penerus dan pelurus perjuangan bangsa perlu ditanamkan rasa cinta akankebudayaanlokal khususnya di daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuhdi sekolah adalah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam proses pembelajaran, ekstra kurikuler, atau kegiatan kesiswaan di sekolah. Misalnya dengan mengaplikasikan secara optimal Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Budaya Lokal.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Karakter merupakan representasi identitas seseorang yang menunjukkan ketundukannya pada aturan atau standar moral yang berlaku dan merefleksikan pikiran, perasaan dan sikap batinnya yang termanifestasi dalam kebiasaan berbicara, bersikap dan bertindak. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya mendorong para pelajar tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berfikir dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya serta mempunyai keberanian melakukan yang benar, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pendidikan karakter tidak terbatas pada

transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai yang baik, tetapi menjangkau bagaimana memastikan nilai-nilai tersebut tetap tertanam dan menyatu dalam pikiran serta tindakan

Upaya membangun karakter pemuda berbasis kearifan budaya lokal sejak dini melalui jalur pendidikan dianggap sebagai langkah yang tepat. Sekolah merupakan lembaga formal yang menjadi peletak dasar pendidikan. Pendidikan di Sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peranan yang amat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan di Sekolah diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Jika menilik pada tujuan pendidikan nasional, maka manusia yang berkualitas tidak hanya terbatas pada tataran kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor. Pada praktiknya, mata pelajaran muatan lokal dipandang merupakan pelajaran kelas nomor dua dan hanya dianggap sebagai pelengkap. Sekolah-sekolah menerapkannya sebatas formalitas untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang dituangkan dalam berbagai peraturan. Kondisi demikian mengindikasikan aplikasi pengajaran muatan lokal di sekolah masih mengambang. Persoalannya adalah bagaimana penerapan konsep pendidikan karakter yang sudah dimasukkan ke dalam kurikulum tersebut.

Bayangkan saja. Bagaimana mungkin anak-anak memahami pentingnya keberagaman jika sejak dini sudah diajari untuk saling mengalahkan lewat konsep ranking dalam dunia pendidikan? Bukankah itu berarti menanamkan konsep “kalah – menang” (dan bukan kebersamaan serta keragaman) sebagai fondasi utama? Bagaimana mungkin anak-anak memahami pentingnya saling menghargai ketika sejak dini sudah diajari untuk secara tegas untuk membedakan antara “kita” dan “mereka?” Maraknya tawuran antar pelajar adalah salah satu contohnya, sebab “kekitaan” tak lagi ada karena terdesak oleh paham pemecah belah.

Pada titik inilah “kekitaan” sebagai wujud implementasi “Tunggal Ika” menemukan jalan buntu, sehingga konsep tantularisme tidak lagi utuh karena sebagian orang mengatakan, keberagaman adalah sebuah hal yang mustahil di era modern. Kecuali itu, keterpinggiran budaya lokal diakibatkan oleh derasnya arus budaya

global yang mampu menawarkan tata nilai baru yang dianggap lebih baik. Di sisi lain, masyarakat dianggap tidak siap menerima globalisasi sehingga menjadi gagap dan kehilangan rasa percaya diri pada budaya nenek moyangnya. Benarkah demikian?

Bisa benar bisa tidak. Sebab masyarakat memiliki Negara yang berkewajiban menyejahterakan kehidupan rakyatnya, sebagaimana disebut secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian sejahtera, tentu saja tak hanya menyangkut kebutuhan lahiriah dan batiniah, melainkan juga menjaga dan melestarikan budaya bangsa sebagai warisan luhur sekaligus identitas diri sebuah bangsa.

Pada tahap inilah, Negara menemui jalan buntu untuk mempertahankan kebudayaan sebagai salah satu pilar penyangga jatidiri. Karena Negara gagal mencari rumusan baru tentang kebudayaan nasional, sehingga dicarilah argumentasi yang masuk akal dengan mengatakan masyarakat tidak siap menerima sekaligus menyeleksi gelombang kebudayaan baru yang disebut sebagai budaya global.

Kita sama-sama melihat. Ketika masyarakat yang tidak lagi merasa punya benteng dan acuan tentang cara berfikir, bersikap, dan berperilaku yang bersumber pada kebudayaan bangsa seperti rumusan Ki Hadjar Dewantara, yang muncul kemudian adalah menguatkan sikap individualisme. Kebersamaan dan keberagaman yang telah dilakoni dan diyakini selama ratusan tahun, terkikis oleh paham baru yang bersumber pada kepentingan diri. Konsep “menang – kalah, aku bukan kamu, kita bukan mereka” kian jelas mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, beragam konflik – berskala kecil maupun besar marak bermunculan di tengah kehidupan sehari-hari. Kesadaran bersama sebagai sebuah bangsa, terlidas oleh kepentingan diri dan kelompok untuk memenangkan pertarungannya.

Sebuah gagasan briliyant ketika Taufik Kiemas (almarhum) yang juga Ketua MPR RI merumuskan pembangunan bangsa lewat konsep Empat Pilar (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebab selama ini, yang selalu mengedepan – bahkan dikedepankan – adalah persoalan politik dan ekonomi. Sedangkan kebudayaan, seolah menjadi anak tiri yang terabaikan.

Memang tak ada salahnya mengedepankan ekonomi sebagai lokomotif pembangunan mengingat problem yang muncul begitu banyak dan krusial. Kendati demikian, harus diingat bahwa meletakkan ekonomi sebagai garda depan pembangunan, bukannya tanpa resiko karena ekonomi tak hanya berdampak pada pertumbuhan semata tetapi juga berkait erat dengan kesenjangan. Terlebih lagi jika konsep yang diterapkan mengacu pada kapitalisme dan liberalisme. Jelas, kesenjangan akan semakin nyata.

Ketika reformasi digulirkan. Kita sudah sama-sama sepakat untuk menganut paham demokrasi. Akan tetapi, kita belum siap betul, demokrasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk Negara yang didominasi oleh berbagai suku dengan ragam budaya berfikir, bersikap dan berkeyakinan berbeda-beda?

Untuk itulah, kita memerlukan rumusan baru tentang sikap dan perilaku berbangsa dan bernegara di jaman yang semakin canggih di bidang teknologi, namun juga sarat persoalan yang tak mudah dirampungkan. Yang tak kalah pentingnya adalah memiliki politik kebudayaan yang lebih jelas dan gamblang. Semua peristiwa yang terjadi, haruslah dilihat tak hanya dari sisi politik, ekonomi dan sosial, melainkan dari sisi kebudayaan yang selama ini – sekali lagi – dianggap tidak terlalu penting untuk membangun sebuah bangsa. sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan China. Meski mengalami kemajuan di bidang ekonomi namun soal kebudayaan tetaplah terpelihara secara apik.

Adalah keliru jika kita tidak belajar dari Negara lain, bagaimana mereka membangun bangsa dan negerinya tanpa menganak-tirikan kebudayaan sebagai identitas utama. Menyingkirkan kebudayaan untuk tidak menjadi bagian penting sekaligus integral dari dinamika pembangunan, berarti pula mengabaikan terbentuknya bangsa yang berkarakter, bangsa yang memiliki identitas diri dan keyakinan diri bersaing dengan bangsa lain. Ketidak-percayaan sebuah bangsa pada budaya sendiri akan melahirkan generasi yang gamang dan mudah terombang-ambing jaman. Mereka hanya akan menjadi pemakai, peniru, dan bukan pencipta sekaligus kreator yang handal!

MEMBANGUN KARAKTER POLITIK BANGSA (Tinjauan dari aspek pendidikan)

Oleh : Dr. Silahuddin, M.Ag

PENDAHULUAN

Pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal kemerdekaan, para *founding father* negeri ini telah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai sesuatu yang urgen dan tidak bisa lepas dari pembangunan nasional.

Untuk membangun karakter suatu bangsa harus di mulai sejak dini bahkan sejak usianya masih kecil, seorang individu terbentuk sejak dia kecil karena pengaruh genetik dan lingkungan sekitar. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku). Sedangkan karakter tercela kebalikan dari yang tersebut di atas.

Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman yang disertai dengan

berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan pergeseran nilai dan banyak perilaku menyimpang yang terjadi pada anak-anak, sehingga orangtua dan lembaga pendidikan serta lingkungan masyarakat perlu memberikan perhatian serius dalam membangun pendidikan karakter anak. Membangun pendidikan karakter anak harus dimulai sejak dalam kandungan dan sejak usia dini, karena usia dini adalah usia emas. Melalui pendidikan karakter bukan saja dapat membuat seorang anak mempunyai akhlak yang mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan akademiknya. Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana cara membangun pendidikan karakter politik bangsa kepada pemuda.

Memahami Karakter Bangsa

Kata karakter berasal dari kata Yunani, yang berarti “*to mark*” (menandai) dan memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter baik dan mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person character*) apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Menurut Syarbaini, karakter bisa diartikan sebagai sistem daya juang (daya dorong, daya gerak, dan daya hidup) yang berisikan tata nilai kebajikan akhlak dan moral yang terpatri dalam diri manusia. Tata nilai itu merupakan perpaduan aktualisasi potensi dari dalam diri manusia serta internalisasi nilai-nilai akhlak dan moral dari luar/lingkungan yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku.

Secara umum karakter dibagi menjadi dua, yaitu karakter mulia (*al-akhlaq al-mahmudah*) dan karakter tercela (*al-akhlaq al-madzumah*). Jika dilihat dari ruang lingkupnya, karakter dalam Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu karakter terhadap *Khaliq* (Allah Swt.) dan karakter terhadap *makhluk* (makhluk/selain Allah SWT.). Karakter terhadap makhluk bisa dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, karakter terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta karakter terhadap benda mati (lingkungan alam).

Adapun nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada pemuda menurut Zubaedi, meliputi 18 (delapan belas) karakter, antara lain: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Menurut Ari Ginanjar dalam buku Darmiyati Zuhdi, ada tujuh karakter dasar manusia yang dapat diteladani dari nama-nama Allah, yaitu: jujur, tanggungjawab, disiplin, visioner, adil, peduli, dan kerjasama.

Untuk memahami karakter anak, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yaitu:

- a) Karakteristik yang berkaitan dengan fisiologis, yang meliputi: jenis kelamin, kondisi fisik, usiakronologis, panca indera, tingkat kematangan, dan sebagainya.
- b) Karakteristik yang berkaitan dengan psikologis, meliputi: bakat, minat, motivasi, intelegensi, gaya belajar, emosi, dan sebagainya.
- c) Karakteristik yang berkaitan dengan lingkungan, karakteristik ini meliputi: etnis, kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya.

Ada beberapa cara untuk memahami karakter antara lain:

- 1) Menjadi pendengar yang baik, Setiap cerita dan curhat dari anak dengar lah dengan seksama, dengarkan dengan baik, berikan respon, dan pikirkan penyelesaiannya jika anak mempunyai masalah.

- 2) Memahami tipe emosional anak, sangatlah penting memahami tipe seorang anak, apakah dia termasuk pemarah, pemalas, penyabar, dll. Sehingga orang tua bisa memahaminya dan memberikan pengertian kepadanya.
- 3) Interogasi anak dengan baik, Interogasi anak dengan lembut, buat ia mengatakan hal yang sebenarnya.

Dalam perspektif Islam, pengertian karakter memiliki kedekatan pengertian dengan pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari kata *khalaqa* yang berarti perangai, tabiat dan adat istiadat. Menurut pendekatan etimologi, pendekatan akhlak berasal dari bahasa Arab yang jamak dari bentuk mufradnya *khuluqun* yang menurut lughah diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak merupakan perangkat tata nilai yang bersifat samawi dan ajali yang mewarnai cara berpikir, bersikap dan bertindak seseorang muslim terhadap dirinya, terhadap Allah, dan Rasulnya, terhadap sesama dan terhadap lingkungannya.

Pendidikan akhlak dalam perspektif Al-quran dapat dilihat bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan pendidikan kepada anaknya serta cara implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam mendekati diri, anak-anaknya dan keluarganya kepada Allah SWT. Abuddin Nata dalam bukunya mengatakan bahwa ada lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. *Pertama* perbuatan akhlak tersebut sudah menjadi kepribadian yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang. *Kedua* perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan *acceptable* dan tanpa pemikiran (*unthouhgt*). *Ketiga*, perbuatan akhlak merupakan perbuatan tanpa paksaan. *Keempat*, perbuatan dilakukan dengan sebenarnya tanpa ada unsur sandiwara. *Kelima*, perbuatan dilakukan untuk menegakkan kalimat Allah.

Adapun nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah, sebagai berikut:

| No | Nilai | Deskripsi |
|----|----------|---|
| 1 | Religius | Sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan agama. |
| 2 | Jujur | Sikap dan perilaku yang selalu menjadikan dirinya dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 3 | Toleransi | Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku dan etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. |
| 4 | Disiplin | Perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. |
| 5 | Kerja keras | Perilaku yang sungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai hambatan dalam belajar dan tugas serta menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. |
| 6 | Kreatif | Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru dari sesuatu yang telah dimilikinya. |
| 7 | Mandiri | Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain. |
| 8 | Demokratis | Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. |
| 9 | Rasa ingin tahu | Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar. |
| 10 | Semangat kebangsaan | Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri dan kelompok. |
| 11 | Menghargai prestasi | Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakuinya serta menghormati keberhasilan orang lain. |
| 12 | Komunikatif | Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak lain. |
| 13 | Cintai damai | Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. |
| 14 | Gemar membaca | Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca dari berbagai sumber untuk pengembangan dirinya. |
| 15 | Peduli lingkungan | Sikap dan tindakan yang selalu menjaga kebersihan lingkungan dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. |
| 16 | Peduli sosial | Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. |
| 17 | Tanggung jawab | Melakukan tugas dan kewajibannya dengan sepenuh hati. |

Nilai-nilai dalam pendidikan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan dan menjadi budaya dalam pelaksanaan sehari-hari, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Pendidikan bertujuan tidak hanya sekedar proses alih budaya atau alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) akan tetapi juga sekaligus proses alih nilai (*transfer of value*). Pendidikan Islam menjadikan manusia

yang bertaqwa manusia yang bisa mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap orang, karena dengan adanya pendidikan akan membawa seseorang ke arah yang lebih baik sebagaimana ungkapan Zakhia Daradjat bahwa: “Pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau menjadi tingkatan hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental”.

Karakter yang menjadi acuan seperti yang terdapat dalam *The Six Pillars of Character* yang dikeluarkan oleh *Character Counts! Coalition (a project of The Joseph Institute of Ethics)*.

Enam jenis karakter yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Trustworthiness*, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi: berintegritas, jujur, dan loyal.
- 2) *Fairness*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain.
- 3) *Caring*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar.
- 4) *Respect*, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain.
- 5) *Citizenship*, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.
- 6) *Responsibility*, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin.

Dalam menjalani kehidupan berpolitik dalam suatu negara, warga negara harus bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan dan cita-cita negara., ada berbagai tipe budaya politik yang dianut warga negara dalam mengapresiasi cita-citanya. Budaya politik tersebut menjadi khazanah khas bangsa Indonesia dalam kehidupan politik di Indonesia. Budaya politik yang baik adalah budaya yang mampu mendorong partisipasi warga negara dalam keseluruhan kehidupan secara politik.

Untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa, kita dapat mengukurnya melalui beberapa dimensi. Dimensi-dimensi yang biasanya menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.
- b) Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
- c) Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.
- d) Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara.

Ada beberapa tipe cara memahami budaya politik suatu bangsa, adapun tipe budaya politik menurut Almond dan Verba. Menurutnya budaya politik ada tiga macam yaitu.

1. Budaya politik parokial, Budaya politik parokial adalah budaya politik yang memiliki orientasi masyarakat terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap empat dimensi tersebut. Dalam masyarakat jenis ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, dukun, tabib, atau kyai biasanya merangkul semua peran yang ada, baik yang bersifat politis ekonomis, atau religius. Masyarakat tipe ini biasanya terdapat pada masyarakat Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia.
2. Budaya politik subjek, Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan bertipe subjek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
3. Budaya politik partisipan, Budaya politik partisipan adalah bentuk budaya politik di mana anggota masyarakat sudah memiliki

pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politi secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan serta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi diatas.

Peran Lembaga Politik Dalam Membangun Karakter

Menurut Munandar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memainkan peranannya mengembangkan untuk membangun karakter anak:

1. Faktor genetik dan pola asuh yang mempengaruhi kebiasaan anak;
2. Aturan perilaku, orangtua sebaiknya tidak banyak menentukan aturan perilaku dalam keluarga. Mereka menentukan dan meneladkan (model) seperangkat nilai yang jelas, dan mendorong anak-anak mereka untuk menentukan perilaku apa yang mencerminkan nilai-nilai tersebut;
3. Sikap orang tua yang humoris, suka bercanda sebagai lelucon yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari diakui cukup memberikan warna dalam kehidupan anak;
4. Pengakuan dan penguatan pada usia dini, dengan memperhatikan tanda-tanda seperti pola pikiran khusus atau kemampuan memecahkan masalah yang tinggi sebelum anak mencapai umur tiga tahun. Tapi kebanyakan anak mengatakan mereka merasakan mendapat dorongan yang kuat dari orangtua mereka;
5. Gaya hidup orangtua, pada cukup banyak keluarga, anak mempunyai minat yang sama seperti orangtuanya;
6. Trauma, anak yang lebih banyak mengalami trauma mempunyai kemampuan belajar dari pengalaman yang dilalui.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal mempunyai tugas-tugas yang tidak kalah pentingnya dalam pendidikan. tugas utama dari keluarga dalam rangka penyelenggaraan pendidikan bagi anak ialah merupakan peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari orang tuanya dan dari anggota keluarganya yang lainnya.

Peranan orang tua sangat strategis, sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini di mana pengaruh teknologi informasi yang semakin kental. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting sebab kondisi dasar dari sebuah generasi dimulai dari sebuah keluarga. Menurut Zakiah Daradjat keluarga adalah “suatu sistem kehidupan masyarakat yang terkecil dibatasi oleh adanya keturunan atau disebut juga umat, akibat adanya kesamaan agama”.

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Dan berlangsung sampai akhir akhir kehidupan manusia. Sehingga keluarga dapat memainkan peranan penting dalam membangun pendidikan karakter anak, karena pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti plus dengan melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Karenanya tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Terdapat sejumlah nilai budaya yang dapat dijadikan karakter, yaitu ketakwaan, kearifan, keadilan, kesetaraan, harga diri, percaya diri, harmoni, kemandirian, kepedulian, kerukunan, ketabahan, kreativitas, kompetitif, kerja keras, keuletan, kehormatan, kedisiplinan, dan keteladanan.

Pada dasarnya keluarga berkewajiban meletakkan dasar kependidikan berupa potensi nilai kemanusiaan. Potensi kecerdasan spiritual menjadi tumbuh dan berkembang apabila dirawat dan dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari oleh keluarga (orang tua). Tiga moral spiritual yang ikembangkan dalam keluarga adalah syukur, sabar dan ikhlas sebagai benteng dalam upaya membangun kecerdasan spiritual dalam rangka menanamkan nilai-nilai moral kepada anak.

Peranan guru sangat penting untuk menciptakan situasi belajar sesuai dengan kebutuhan anak sebagaimana yang di tulis oleh piaget dalam teorinya, yaitu, sebagai berikut:

- a) Menfokuskan pada proses berpikir anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping itu, dalam pengecekan kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sampai pada jawaban tersebut.

- b) Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- c) Penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang samanamun mereka menerimanya pada kecepatan yang berbeda.

Lembaga pendidikan sekolah bertanggung jawab pula untuk membangun kecerdasan emosional dalam mengembangkan karakter peserta didik. Perkembangan zaman yang sangat cepat membawa pengaruh besar dalam kesejahteraan keluarga sehingga keluarga memiliki kesempatan yang terbatas dalam memberikan pendidikan moral kepada anak-anaknya. Banyak keluarga yang mempercayakan pendidikan anak kepada lembaga di luar keluarga. Ada yang menitipnya sejak bayi pada lembaga penitipan anak yang dikelola bukan dari keluarga. Setelah memasuki usia bermain, ditiptkan pada taman bermain. Diusia empat atau lima tahun anak tersebut disekolahkan pada taman kanak-kanak dan seterusnya sampai menyelesaikan pendidikan tinggi. Oleh karena itu pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak.

Urgensi Membangun Karakter

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai, meliputi: pengetahuan, kesadaran kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter identik dengan pendidikan akhlak karena karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (*character education*). Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada

anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Sebagaimana yang dikatakan Frye pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia.

Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 hubungan yang pasti dialami setiap manusia (*triangle relationship*), yaitu hubungan dengan diri sendiri (*intrapersonal*), dengan lingkungan (hubungan sosial dan alam sekitar), dan hubungan dengan pencipta (*spiritual*). Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan anak. Cara anak memahami bentuk hubungan tersebut akan menentukan cara anak memperlakukan dunianya. Adapun strategi penanaman pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah menurut Zubaedi melalui 4 hal, antara lain: Program pengembangan diri, pengintegrasian ke dalam semua mata pelajaran, pengintegrasian ke dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, dan pembiasaan.

Pendidikan karakter yang perlu diberikan kepada anak meliputi 4 aspek, yaitu; *pertama* olah hati (*Spiritual and emotional development*), bermuara pada pengelolaan spiritual dan emosional. *Kedua* olah pikir (*intellectual development*). olahpikir bermuara pada pengelolaan intelektual. *ketiga* olah raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*). Olah raga bermuara pada pengelolaan fisik. *Ke empat* olah rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*), Olah rasa bermuara pada pengelolaan kreativitas.

Pendidikan karakter merupakan cara untuk membuat seseorang mengerti, memahami, dan bertindak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Konsep pendidikan karakter pada hakekatnya merupakan pendidikan tentang nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya sendiri dan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak atau siswa ke arah yang lebih baik. Pendidikan karakter secara terperinci memiliki lima tujuan. *Pertama*, mengembangkan potensi kalbu atau nurani peserta didik yang memiliki nilai-nilai karakter

bangsa. *Kedua*, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan tradisi budaya bangsa yang religius. *Ketiga*, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab. *Keempat*, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. *Kelima*, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*). pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama yaitu; *Pertama*, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. *Kedua*, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. *Ketiga*, fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa yang bermartabat.

Howard Kirschenbaum menguraikan seratus cara untuk dapat meningkatkan nilai dan moralitas (akhlak mulia) di sekolah yang bisa dikelompokkan ke dalam lima metode, yaitu: 1) *inculcating values and morality* (penanaman nilai-nilai dan moralitas); 2) *modeling values and morality* (pemodelan nilai-nilai dan moralitas); 3) *facilitating values and morality* (memfasilitasi nilai-nilai dan moralitas); 4) *skills for value development and moral literacy* (keterampilan untuk pengembangan nilai dan literasi moral; dan 5) *developing a values education program* (mengembangkan program pendidikan nilai).

Pendidikan karakter memiliki makna yang sama dengan pendidikan pendidikan akhlak. Adapun tujuan pendidikan karakter adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik (*insan kamil*). Pendidikan karakter juga merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada anak yang meliputi komponen

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan karakter berfungsi untuk menumbuhkembangkan anak, dalam 3 aspek, yaitu antara lain:

- a) Pembentukan dan Pengembangan Potensi, yaitu upaya membentuk dan mengembangkan anak untuk berpikiran, berhati dan berperilaku baik.
- b) Perbaikan dan Penguatan, yaitu upaya memperbaiki karakter anak dari bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, dalam mengembangkan potensi anak, maju, mandiri, dan bertanggung jawab.
- c) Penyaring, yaitu upaya memilah nilai-nilai yang positif untuk menjadi karakter yang Mengakar pada dirinya.

Pendidikan karakter anak harus diberikan dengan baik oleh orang tua, guru maupun masyarakat, supaya moralitas anak dapat terbentuk dengan baik. Pendidikan karakter ini paling baik diberikan pada saat anak usia dini. Pendidikan karakter anak ini adalah modal yang sangat penting untuk menentukan karakternya di kemudian hari.

PENUTUP

Membangun karakter anak sangat penting dilakukan karena anak akan menghadapi suatu zaman yang berbeda dengan zaman yang kita hadapi sekarang, mereka diharapkan mampu bertahan hidup dan terhindar dari semua yang akan menjerumuskan mereka kedalam hal-hal yang dilarang agama. Mengingat begitu pentingnya membangun karakter pada anajyng dilakukan dari sebuah latanan yang paling kecil yaitu keluarga, maka dalam pendidikan islam sangat menekankan pendidikan akhlak atau karakter. Pendidikan karakter identik dengan pendidikan akhlak karena karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat

Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perkembangannya, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dimana anak dapat mengeksplorasi dirinya, memberikan kesempatan padanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya melalui lingkungan melalui cara mengamati, meniru dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang yang melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak.

Untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak kita harus memperhatikan karakteristik yang melekat pada anak, mengingat masing-masing anak memiliki perbedaan dan keunikan yang antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan berkarakter akan tercipta secara optimal melalui kolaborasi antara orang tua dan guru dan masyarakat, sehingga tercipta harmoni yang sempurna antara rumah, sekolah dan lingkungan, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing, orang tua maupun lembaga pendidikan bisa mengetahui metode dan strategi apa yang cocok diberikaan kepadanya. Pendidikan keluarga dan lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam membangun karakter anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani press, 1999
- Ahmad Syafii Maarif, dkk, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Wacana Yogya, 1991.
- Amir Daein Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Malang: FIP IKIP Malang, 1973.
- E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Bandung; Bumi Aksara, 2011.
- Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta: Rajawali, 1986)

- Frye, Mike at all. (Ed.), *Character Education: Informational Handbook and Guide for Support and Implementation of the Student Citizen Act of 2001*. (North Carolina: Public Schools of North Carolina, 2002
- Fuat Nashori, *Paradigma Psikologi Islam*, Yogyakarta: SIPRES,1994.
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna,1995
- Howard Kirschenbaum, *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*, Massachusetts: Allyn & Bacon,1995.
- Indrakusuma, Amir Daien, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1985.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemdiknas. 2010.
- Ma'ruf Luis, *Al-Munjid*, (Beirut: al-Maktabah Al-katulikiyah. tt).
- Retno Listiyarti, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif*, Jakarta; Esensi, 2012.
- Slavin, R.E, *Educational Psychology*, Boston : Allyn and Bascon, 1998
- Suhartono, Suparlan, *Filsafat Pendidikan*, Makassar: Badan Penerbit UNM.2009
- Yuliani Nurani Sujono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakart: Indeks, 2009.
- Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta; Kencana,2011.
- Zuchdi, dkk, *Pendidikan Karakter*, Jogjakarta: UNY Press. 2009.

KEMAJEMUKAN SEBAGAI PILAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Dr. Saiful, S.Pd., M.Si

Pengantar

Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, dan bahasa. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang luasnya 7,81 Juta Km² dengan jumlah 17.504 pulau dan 3 zona waktu. Suku bangsa yang paling beragam di dunia, yang terdiri dari 750 suku bangsa dan 583 bahasa. Memiliki hutan hujan tropis terbesar ke-3 dunia setelah Amerika Selatan dan Afrika, paru-paru dunia dan keragaman hayati tinggi.

Indonesia mempunyai jumlah penduduk sekitar 258 juta jiwa, sekitar 3,5% total penduduk dunia. Indonesia juga sebagai salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, seperti Blok Natuna, Blok Cepu, dan lain-lain. Indonesia juga beragam dalam keagamaan dan kepercayaan.

Dalam rangka kita memahami Kebhinnekaan untuk mewujudkan Indonesia Raya, tentunya bukan hanya sekedar kita mampu memahami tentang toleransinya saja, tetapi bagaimana mengubah cara pandang kita tentang ke-Indonesiaan yang utuh secara menyeluruh, itu jauh lebih penting.

Pelaksanaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara konsekuen dalam upaya mengakhiri berbagai persoalan bangsa saat ini, tentunya memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh rakyat Indonesia dalam memantapkan semangat persatuan dan kesatuan nasional, hal tersebut mampu dicapai jika rakyat Indonesia mampu hidup dalam kemajemukan yang dikelola dengan baik.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, cita-cita

membangun sebuah bangsa Indonesia yang bersatu, dan ungkapan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Dan itu tidak akan terwujud jika rakyat Indonesia tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembahasan

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal dasar dan utama dalam membangun bangsa yang mejemuk. Sehingga perlu penyiapan warganegara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam memajukan NKRI.

Ideologi Pancasila merupakan sarana pemersatu bangsa, sehingga dapat jadi prosedur penyelesaian konflik, para pendiri negara telah menanamkan gagasannya bahwa betapa pentingnya mencari nilai-nilai bersama dalam upaya menyatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia (Winarno, 2011:23).

Bung Karno, di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 pernah mengatakan, bahwa "... Kita hendak mendirikan suatu negara "semua untuk semua". Karena itu, jika tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, dan lain-lain, tetapi Kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar *nationale-staat*..."

Tantangan bangsa samakin hari semakin berat, baik tantangan yang bersifat internal seperti: 1) Masih lemahnya tentang penghayatan dan pengamalan agama, sehingga muncul pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit; 2) Pengabaian terhadap kepentingan daerah, serta timbulnya fanatisme kedaerahan; 3) Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan; 4) Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; dan 5) Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal.

Sementara tantangan bangsa yang bersifat eksternal, seperti: pengaruh globalisasi, kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam, dan semakin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Pada saat ini Indonesia memasuki persaingan yang sangat tajam dengan berbagai negara, baik di kawasan Asia maupun di berbagai kawasan lainnya. Setiap negara selalu berusaha untuk lebih unggul dengan negara lain, baik keunggulan dalam bidang teknologi maupun keunggulan dalam bidang non teknologi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tengah diguncang oleh tindakan-tindakan oknum yang ingin mengantikan ideologi Pancasila dengan ideologi suatu agama, mereka mengatasmamakan Islam sebagai dasar gerakan mereka. Sementara kasus peledakan bom di beberapa daerah di Indonesia juga diatas namakan “jihad”.

Meningkatnya kasus radikalisme di Indonesia pada saat ini menjadi fenomena dan bukti nyata bahwa telah terjadi penyimpangan komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kasus kepulauan Sipadan dan Ligitan memberi pengaruh besar pada diri kita, bahwa sikap kehati-hatian sangat diperlukan. Oleh karena itu menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana mengajarkan kepada generasi penerus bangsa tentang kecintaan kepada bangsa dan negara.

Kita mempunyai harapan penuh kepada pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan berdaulat. Seperti kata orang bijak, bahwa keberadaan suatu negara akan mengalami masalah dan kehancuran jika seluruh komponen rakyatnya tidak lagi memiliki rasa kepedulian terhadap upaya menjaga keutuhan negaranya.

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditingkatkan secara

terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Ideologi Pancasila sebagai identitas Nasional.

Kita sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai Ideologi Nasional merupakan titik temu, rujukan bersama, common platform, kesepakatan bersama dan nilai integratif bagi bangsa kita. Karena sudah menjadi kesepakatan, maka harus terus menerus kita pertahankan dan kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan bangsa yang penuh kebhinnekaan ini (Winarno, 2011: 25). Para pendiri bangsa kita telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan nasional (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2017:101).

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan, yang perlu secara terus menerus ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Kecintaan kepada bangsa dan negara merupakan bentuk rasa kecintaan yang tertinggi untuk berbakti dan meneruskan kelanjutan kecintaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu para pendiri negara ini. Mereka mendirikan Negara Indonesia bukan dengan cara yang sederhana, namun banyak tetesan darah yang sudah mereka jatuhkan dan korbankan. Sehingga menjaga dan mempertahankannya adalah sesuatu yang wajib kita lakukan.

Semoga dengan semangat Hari Pahlawan Tahun 2017, mari kita bersatu dalam mempertahankan Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati dan menangkal gerakan radikalisme dan terorisme di Negara yang kita cintai ini. Segenap warga negara Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lembaga pendidikan tinggi pada saat ini, termasuk Universitas Syiah Kuala didalamnya dituntut untuk menjadi salah satu wadah dalam menangkal gerakan radikalisme, terorisme tersebut dalam

rangka menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Generasi muda sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam melawan gerakan radikalisme dan terorisme, tentunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme yang tinggi. Sehingga persoalan dan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, seperti kerusuhan dan perkelahian antar umat beragama, korupsi yang merajalela, fitnah yang semakin mekhawatirkan, kecurigaan yang sudah kelewatan dan etos kerja yang semakin menurun dapat terselesaikan dengan baik.

Kesimpulan

Dengan berbagai contoh yang telah dijelaskan di atas, maka perlu penanaman kembali nilai-nilai yang terkandung Pancasila sebagai identitas bangsa, tentunya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kekinian dengan melibatkan berbagai lapisan komponen bangsa. Sehingga mampu menyelesaikan persoalan dan masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, yang seolah-olah tiada hujungnya.

Sehingga Pancasila tidak hanya sebatas teori, hafalan, sebutan pada setiap upacara dan hanya dikenal sebagai simbol saja, tetapi dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mendarah daging sebagai karakter generasi penerus bangsa.

Referensi

- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. 2017. Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Winarno. 2011. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winataputra, Udin S dan Budimansyah, Dasim. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press

KEPEMIMPINAN DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ACEH

Oleh : Drs. Mawardi Umar, M. Hum., MA.

Pengantar

Dari 2017 yang lalu sampai tahun 2019 yang akan datang, bangsa Indonesia disibukkan dengan hajatan-hajatan politik yang sangat penting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pentingnya hajatan-hajatan politik baik pada tingkat nasional, provinsi sampai di kabupaten/kota tersebut dalam upaya untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang diidamkan yang dapat membawa bangsa Indonesia ke kehidupan yang lebih baik. Tahun 2017, telah selesai berlangsungnya 101 pemilukada yang diikuti oleh 7 Provinsi termasuk Aceh, 76 Kabupaten dan 18 Kota. Dalam waktu yang tidak lama lagi di tahun 2018 ini akan dilakukan 171 pemilukada yang diikuti oleh 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota. Tahun 2019 yang akan datang, bangsa Indonesia kembali akan menghadapi suatu hajatan politik paling besar yaitu pemilu presiden.

Proses pemilihan pada semua tingka tersebut telah dilalui oleh bangsa Indonesia dalam waktu yang lama sejak setelah Indonesia merdeka. Sejak itu, dengan sistem pemilihan yang terjadi beberapa kali perubahan, telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang beragam, baik kompetensi yang dimiliki maupun gaya kepemimpinan mereka perlihatkan. Ada pemimpin yang “sangat sukses” sehingga menjadi pujaan masyarakatnya, dan ada pula pemimpin yang dianggap “gagal” menjalani tugasnya sehingga menjadi tidak populer dalam masyarakat. Malahan banyak pula pemimpin yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena telah masuk penjara akibat korupsi yang dilakukannya.

Keberagaman profil dan nasib pemimpin di Indonesia selama 73 tahun pengalaman hidup berbangsa dan Negara tidak lepas dari system pemilihan (demokrasi) yang dipilih bangsa Indonesia untuk melahirkan para pemimpin tersebut merupakan sistem demokrasi yang

hamper sepenuhnya ala Barat. Sebenarnya, suku bangsa dan etnis yang tersebar di seluruh Nusantara ini mempunyai kearifan lokalnya masing-masing dalam melahirkan pemimpin yang sesuai dengan budaya dan karakter suku dan etnisnya. Keraifan local tersebut sebenarnya perlu digali untuk melahirkan formulasi yang cocok dijadikan landasan melahirkan pemimpin di Indonesia yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang sangat plural ini.

Masyarakat Aceh yang telah mengarungi perjalanan sejarah yang sangat panjang sebagai suatu komunitas besar di bagian Utara pulau Sumatera mempunyai formulasi sendiri terhadap kepemimpinan mereka sejak masa kesultanan dulu. Mengacu pada realitas penduduk wilayah Kesultanan Aceh yang plural maka nilai pluralitas juga tercermin dalam system kepemimpinan tradisional di Aceh. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Aceh tercermin dalam *Hadih Maja* (pribahasa) yang menjadi landasan (way of life) hidup dan ukuran bertidak dan bertingkah laku masyarakat Aceh sejak dulu. Dalam makalah singkat ini hanya dibahas dua aspek saja dari keraifan local masyarakat Aceh tentang kepemimpinan, yaitu: kriterian pemimpin dan sifat kepemimpinan. Pembahasan juga disertai dengan bukti historis yang telah dilalui oleh masyarakat Aceh untuk kedua aspek tersebut.

Masyarakat Aceh Selayang Pandang

Mengkaji sistem kepemimpinan pada sebuah masyarakat tidak akan lengkap kalau tidak memahami masyarakat itu sendiri, demikian juga dengan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh merupakan paguyuban besar bila ditinjau dari sejarah keturunan dan tempat tinggal mereka. Identitas orang Aceh paling tidak dapat ditemukan pada perilaku bahasa Aceh, budaya dan adat istiadat yang islami. Kepercayaan dan keyakinan hidup mereka yang disimbolkan pada *meunasah* (surau) dan masjid, menjadi indicator awal dalam mencari identitas atau keberadaan masyarakat Aceh. Akan tetapi, sampai saat ini belum ditemukan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan “siapakah yang disebut orang Aceh”, hanya terdapat beberapa hipotesis terhadap pertanyaan tersebut. Namun demikian, berdasarkan data praaksara yang ditemukan di beberapa lokasi situs

bukit kerang (*kjokkenmoddinger*) di wilayah pantai kabupaten Aceh Tamiang, diperkirakan wilayah Aceh telah dihuni oleh ras Austroloid sejak sekitar sekitar 6.000 tahun yang lalu.

Mengenai asal-usul penduduk Aceh, ada yang berpendapat bahwa orang Aceh asli adalah orang Mante, yang sama dengan orang Semang, Yakun, dan Toala, yang diperkirakan telah menyingkir ke pedalaman karena terdesak oleh pendatang yang masuk ke Aceh kemudian yang mendiami wilayah pesisir. Ada juga yang berpendapat bahwa orang Aceh berasal dari orang Batak dan orang Gayo, yang diperkirakan berasal dari kelompok Proto Melayu yang datang lebih awal dan mendiami wilayah-wilayah dataran tinggi di Indonesia. Oleh karena kedua pendapat tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta historis, maka kedua hipotesis tersebut sangat lemah dan tidak mendasar.

Merujuk pada temuan hasil penelitian bahasa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa banyak kata-kata Campa dan Khmer terdapat dalam bahasa Aceh, G.K. Niemann dan G.O. Blagden berkesimpulan bahwa nenek moyang orang Aceh berasal dari Campa (Indo Cina). Muhammad Said memperkirakan bahwa keturunan Campa yang merupakan golongan Melayu Muda (Deutero Melayu) inilah kemudian menempati wilayah-wilayah pantai disekeliling Aceh, dan merekalah yang aktif menjalin hubungan dengan orang-orang asing. Hubungan perdagangan yang intensif dalam waktu yang panjang dengan orang asing inilah yang menyebabkan terjadinya pluralitas masyarakat Aceh.

Mengenai pluralitas ini, seorang ulama dan cendekiawan Aceh pada akhir abad ke-19, Shaikh Abbas Ibnu Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Teungku Chik Kuta Karang, berpendapat bahwa orang Aceh terbentuk dari tiga unsur bangsa, yaitu Arab, Persia (Iran), dan Turki. Sementara orang Aceh sendiri menganggap bahwa mereka merupakan percampuran dari empat etnis sesuai singkatan kata A-C-E-H, yaitu: Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Dari realitas tersebut, Mohd.Harun berpendapat bahwa etnis Aceh merupakan sebuah etnis yang sudah ada di Aceh sejak zaman dulu. Etnis ini kemudian banyak berasimilasi dengan etnis pendatang, namun jatidiri etnis Aceh tetap

bertahan, terutama pada keberadaan bahasa mereka, yaitu bahasa Aceh.

Keberagaman masyarakat Aceh dapat dilihat pada realitas etnisitas yang mendiami wilayah Aceh saat ini. Di Aceh terdapat 10 etnis yang dianggap sebagai “penduduk asli” Aceh, yang mempunyai kultur dan bahasa masing-masing, dan mendiami geografi yang berbeda, yaitu : Etnis Aceh, Etnis Tamiang, Etnis Aneuk Jame, Etnis Gayo, Etnis Alas, Etnis Kluet, Etnis Simeuleu, Etnis Singkil, Etnis Haloban, dan Etnis Jawa. Etnis Aceh merupakan etnis mayoritas dan mendiami wilayah yang paling luas di Aceh, meliputi seluruh Pantai Utara, sebagian besar Pantai Timur dan Pantai Barat-Selatan, dan beberapa pulau yang ada. Etnis Tamiang mendiami sebagian wilayah Pantai Timur; Orang Aneuk Jame mendiami sebagian besar Pantai Selatan; Etnis Gayo mendiami Wilayah Tengah; Etnis Alas mendiami Wilayah Tenggara; Etnis Kluet mendiami sebagian kecil Pantai Selatan; Etnis Simeuleu mendiami Pulau Simeuleu; Etnis Singkil mendiami sebagian kecil Wilayah Pantai Selatan, dan Etnis Haloban mendiami Pulau Banyak. Selain itu, terdapat etnis Jawa yang mendiami wilayah perkebunan di Pantai Timur, Pantai Utara, Wilayah Tengah, Aceh Besar, dan Pantai Barat Aceh.

Kelompok-kelompok minoritas tersebut telah terintegrasi dengan etnis Aceh melalui proses pengislaman dan juga karena mereka menjadi sub-ordinasi dari Kesultanan Aceh dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, melalui jaringan social-ekonomi, terutama melalui proses perkawinan antar etnis telah dapat menjaga proses integrasi berbagai etnis tersebut. Implikasi dari proses yang panjang tersebut adalah kelompok-kelompok etnis tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Aceh.

Bagi masyarakat Aceh, agama dan adat menjadi dua pilar penting dalam penataan social. Sisi-sisi kehidupan social budaya Aceh dibangun atas dasar agama dan adat ini yang membentuk suatu sumber dalam penataan social. Keberadaan ulama merupakan manifestasi dari adanya pilar agama dan adat yang perannya sangat penting hingga mendapat perhatian khusus dalam kebijakan politik Belanda. Terintegrasinya budaya dengan agama dalam masyarakat Aceh dapat dilihat dalam *hadih maja* berikut: “*hukom ngen adat lagee*

zat ngen sifeut”, artinya: hukum dengan adat seperti zat dengan sifat. Maksud dari peribahasa tersebut adalah bahwa bagi masyarakat Aceh nilai-nilai ajaran agama telah menjadi bagian integral dalam budaya mereka. Hal ini memberi petunjuk bahwa masuknya agama Islam ke Aceh sebagai pintu gerbang wilayah nusantara, sudah cukup lama dan berakar dengan kuat.

Adat dan tatacara hidup orang Aceh telah terjalin rapat dan tidak terpisahkan dengan nafas Islam. Ajaran-ajaran agama Islam yang dihayati oleh orang Aceh sejak dahulu masih membekas sampai sekarang. Pengaruh agama Islam yang kuat menyebabkan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari sedapat mungkin disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam. Sebaliknya, praktik-praktik keagamaan mereka sesuaikan pula dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku. Kuatnya pengaruh agama Islam dalam masyarakat Aceh dapat dilihat ketika terjadinya peperangan dengan Belanda, dimana melalui semangat Islam yang dikobarkan oleh para ulama telah menjadikan perang ini menjadi perang *fisabilillah* atau perang di jalan Allah.

Dalam kaitan itu Shaikh Abbas Ibnu Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Teungku Chik Kutakarang dalam kitabnya *Tadhkirat al-Rakidin* (1889) menulis “*Adat ban adat hokum ban hukom, adat ngon hukom sama kembar; tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe seunang hana goga*”. Maknanya “adat menurut adat, hukum syari’at menurut hokum syari’at, adat dengan hukum syari’at sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum itu, negeri senang tiada huru hara”. Beliau menambahkan: bahwasanya agama Allah (Islam) dan raja-raja itu bersaudara keduanya, tiada hasil senang raja-raja yang jauh dari pada agama Allah dan tiada hasil senang agama Allah yang jauh daripada raja-raja. Oleh karena itu, antara keduanya harus seiring sejalan dan saling melengkapi sehingga akan tercapai masyarakat yang aman dan makmur.

Kriteria dan Sifat Pemimpin dalam Kearifan Lokal Masyarakat Aceh

Pemimpin merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya arti pemimpin juga telah disadari oleh masyarakat Aceh sejak awal kehidupan bersama mereka di wilayah Aceh. Nilai-nilai kepemimpinan secara tradisional baik kriteria maupun sifat dari kepemimpinan tertuang dalam *hadih maja* atau pribahasa dalam masyarakat Aceh. *Hadih maja* yang merupakan ragam puisi lisan Aceh yang sangat kaya akan nilai-nilai kehidupan, karena di dalamnya terpantulkan hampir seluruh sisi kehidupan orang Aceh, terutama dari dimensi konseptual, telah menjadi tuntunan cara bertindak dan berperilaku bagi masyarakat Aceh sejak dulu. Hal ini tidak terlepas dari asal-usul *hadih maja* tersebut yang merupakan cerita, tradisi nenek moyang masyarakat Aceh yang diwarisi secara turun temurun.

Keberadaan seorang pemimpin memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat Aceh, sebagaimana tergambar dalam *hadih maja* berikut:

Lampôh meupageue, umong meupitak

Nanggroe meusarak maséng na raja

(kebun berpagar, sawah berpetak

Negeri berhukum semua ada raja)

Makna dari pribahasa tersebut adalah sebuah negeri, wilayah, ataupun kampung harus ada pemimpinnya, karena dengan adanya pemimpin akan terjamin terlaksanannya aturan-aturan yang mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Untuk menjadi pemimpin di Aceh tidaklah mudah, karena sangat berat tanggung jawabnya. Seorang pemimpin haruslah seorang yang sudah matang secara emosional. Ia juga harus seorang yang tahan banting, tidak mudah menyerah dan berputus asa dalam mengurus rakyatnya. Dalam memimpin tidak mungkin iadapat memuaskan semua individu yang beragam kepentingan yang ada di wilayah yang dipimpinnya. Bagi orang-orang yang tidak puas tersebut sudah pasti akan mengeluh dan mencari-carai kekurangan pemimpinnya.

Peringatan untuk kesiapan seorang calon pemimpin di Aceh tergambar dalam hadih maja berikut:

Lagee mon tuha

Geulupak, tapeh keunan bandum

(seperti sumur tua

Bongkah dan sabuk kelapa semua ke situ)

Makna dari pribahasa tersebut adalah seorang pemimpin di Aceh harus siap menerima kritikan terhadap kepemimpinannya sekaligus harus memahami karakter rakyat yang dipimpinnya. Tanpa sikap yang demikian tidak mungkin seorang pemimpin akan bertahan lama di Aceh. Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Aceh yang sangat terbuka, termasuk terhadap pemimpin mereka. Selain kesiapan fisik dan mental menjadi seorang pemimpin di Aceh mempunyai kriteria tersendiri sesuai dengan masa kepemimpinannya. Tidak semua orang bisa dipaksakan menjadi pemimpin di Aceh meskipun orang tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pemimpin atau kelompok yang berkuasa sebelumnya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hadih maja berikut:

Euncien bak putu bèk tasok bak giték

Aneuk bak gundék bèk taboh keu raja

(Cincin di jari manis jangan dipakai di kelingking

Anak pada gundik jangan diangkat menjadi raja)

Makna dari pribahasa tersebut adalah pergantian kepemimpinan pada masa kesultana Aceh dulu yang berbentuk monarki, bahwa yang boleh mewariskan kekuasaan raja adalah anak laki-laki dari permaisuri yang sah, sedangkan anak dari gundik tidak mempunyai hak tersebut. Secara luas pribahasa tersebut mempunyai makna bahwa tidak semua orang layak menjadi pemimpin. Yang layak menjadi pemimpin di Aceh adalah orang yang jelas asal-usul dan rekam jekannya, karena dengan itu menjadi bekal kepemimpinan dan juga keyakinan dari rakyat yang dipimpinnya.

Dalam kaitannya ini, dalam perjalanan sejarah kesultanan Aceh yang sangat panjang, yang pernah menjadi sultan di kerajaan Aceh

Darussalam tidak hanya berasal dari etnis Aceh saja, tetapi terdapat beberapa orang sultan yang berasal dari etnis dan bangsa lain. Di antara sultan di kesultanan Aceh Darussalam yang berasal dari etnis dan bangsa lain adalah: Sultan Iskandar Tsani (memerintah, 1636-1641) berasal dari Negeri Pahang (Malaysia sekarang; Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin (memerintah, 1699-1702) dan Sultan Jamalul Alam Badrul Munir (memerintah, 1703-1726) merupakan keturunan Arab; dan terdapat 16 orang sultan Aceh keturunan Bugis termasuk sultan Aceh terakhir Sultan Muhammad Daud Syah (memerintah, 1874-1903).

Dalam kepemimpinannya, seorang pemimpin di Aceh tidak boleh zalim dan otoriter, karena sifat yang demikian sangat dibenci dalam masyarakat Aceh, seperti tergambar dalam pribahasa berikut:

Paléh inong hana lakoe

Paléh nanggroe laktém raja

(sial perempuan tak bersuami)

Sial negeri zalim raja)

Makna dari hadih maja tersebut adalah seorang pemimpin yang merupakan pelaksana aturan tentang tata kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berperilaku sesuai dengan tuntunan. Ditangan pemimpinlah nasib sebuah masyarakat dipertarukan. Oleh karenanya seorang pemimpin tidak zalim karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama pada suatu negeri.

Untuk mengantisipasi agar tidak munculnya perilaku zalim pada pemimpin mereka, masyarakat Aceh telah memperingatkan bahwa rakyat Aceh tidak akan metolerir terhadap pemimpin yang zalim. Apabila terdapat pemimpin yang zalim maka masyarakat Aceh tidak segan untuk melawan mereka, sebagaimana tergambar dalam hadih maja berikut:

Raja adé geuseumah

Raja laktém geusanggah

(raja adil disembah)

Raja zalim disanggah)

Pribahasa tersebut mengandung makna bahwa keadilan memegang sangat penting dalam kehidupan bersama di Aceh. Masyarakat Aceh akan patuh dan taat pada pemimpin yang adil, namun sebaliknya mereka tidak segan-segan akan melawan secara terbuka terhadap pemimpin yang zalim.

Dalam menegakkan aturan pemerintahan yang telah disepakati bersama, seorang pemimpin tidak boleh pilih kasih, walaupun menyangkut dengan keluarganya. Hal ini pernah ditunjukkan oleh Sultan Iskandar Muda yang dengan tidak segan menghukum (mati) anak laki-lakinya sendiri yang merupakan calon pewaris tahta kesultanan, karena ia berbuat salah. Keadilan yang dijalankan ini membuat rakyat sangat patuh sehingga berkontribusi terhadap perkembangan kesultanan Aceh mencapai masa keemasannya masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Selain nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi seorang pemimpin, kewenangan seorang pemimpin dalam masyarakat Aceh dibatasi oleh lembaga lain. Hal ini dilakukan agar tidak lahirnya seorang pemimpin yang otoriter yang sangat dibenci oleh masyarakat Aceh. Hal ini tercermin dalam *hadih maja* berikut:

Ureung peurintah nyang atô buet

Ureung tuha peut nyang peuputôh haba

(orang perintah yang mengatur pekerjaan

Orang “tuha empat” yang putuskan perkara)

Hadih maja ini bermakna bahwa seorang pemimpin tidak bertanggung jawab terhadap semua urusan. Mereka hanya bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan pengambil kebijakan-kebijakan strategis diserahkan kepada “*tuha peut*” atau dewan empat yang terdiri atas orang-orang pintar dan bijak dalam masyarakat.

Pentingnya peran tuha peut dalam masyarakat Aceh masa kesultanan Aceh Darussalam digambarkan dengan sangat jelas oleh seorang intelektual Belanda yang bernama A.J. Fleer, dalam hasil kajiannya yang diterbitkan tahun 1935. Dia menggambarkan bahwa *tuha peut* yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun

secara bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang medampingi seorangkepala kenegerian (*ulée baling*) dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. *Tuha peuet* itu mempunyai saham yang amat penting dalam pemerintahan sesuatu kenegerian. Bersama *ulée balang*, lembaga itu merupakan sejenis dewan yang mempertimbangkan dan mengurus kepentingan-kepentingan dalam sesuatu kenegerian.

Pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, Sultan kerajaan Aceh Darussalam yang sangat dihormati rakyat, disebut dengan istilah *poteu*, artinya tuan kita, atau *poteu raja*, dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh empat orang besar yang disebut dengan “Menteri Hari-Hari”. Di samping itu dia dibantu juga oleh seorang syahbandar untuk mengurus persoalan-persoalan pelabuhan. Di luar wilayah utama yang diperintahi oleh Sultan, terdapat wilayah Aceh Besar dan daerah takluknya yang terdiri atas lebih seratus wilayah yang disebut negeri atau *nanggroe* yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya tidak sama. Setiap negeri diperintah secara otokrasi oleh seorang raja kecil yang disebut *uleebalang* atau *keujreun* yang ditetapkan oleh adat berdasarkan warisan turun temurun patriarkal.

Fakta-fakta sejarah tersebut memperlihatkan bahwa dalam system kepemimpinan di Aceh telah memperkecil terjadinya system pemerintah yang otoriter. Kearifan local tersebut yang telah menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam dulu menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Nusantara.

Penutup

Dalam upaya menjamin keberlangsungan kehidupan bersama sebagai sebuah kelompok besar yang sangat plural dan memiliki karekter tersendiri, masyarakat Aceh mempunyai formulasi sendiri dalam menentukan pemimpinnya. Formulasi yang sudah ada sejak awal masyarakat Aceh terbentuk sebagai suatu entitas politik tersebut mengatur baik tentang kriteria maupun sifat pemimpin yang cocok dengan karakter masyarakat Aceh. Dengan formulasi kepemimpinan tersebut telah menjadikan Aceh pernah menjadi suatu entitas politik

terbesar di Sumatera bagian Utara. Oleh karenanya, dengan menggali kearifan local tersebut dapat menjadi inspirasi dan masukan untuk memperbaiki kekurangan system kepemimpinan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia saat ini. Dengan system kepemimpinan yang cocok dengan karakter anak bangsa tersebut pada gilirannya akan mempercepat pencapaian cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju dan rakyatnya sejahtera, “*baldhatun thayibatun warobbul ghafur*”.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, “Potensi Sosial Budaya Masa Depan Aceh”, *Makalah* pada Seminar Kebudayaan Pekan Kebudayaan Aceh V, Banda Aceh 10-11 Agustus 2009.
- Alamsyah, Teuku dkk. 1999. “Sastra Lisan Haloban”. *Laporan Penelitian: Extension of the Grant Application for Community Development Activities in the Context of the Environmental Program Pulau Banyak*.
- Alfian, T. Ibrahim. 1977/1978. *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- , 1987. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harun, Mohd. 2009. *Memahami Orang Aceh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hasjim M.K. Cs. 1959. *Himponan Hadih Madja*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Provinsi daerah Istimewa Aceh.
- Hurgronje, C. Snouck. 1996. *Aceh Rakyat dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: INIS.
- Ibrahim, Husaini. 2014. *Awal Masuknya Islam ke Aceh: Analisis Arkeologis dan Sumbangannya pada Nusantara*, Banda Aceh: Aceh Multivision.

- Kreemer, J. 1931. *Atjehsch Handwoordenboek (Atjehsch-Nederlandsch)*, Leiden: E.J. Brill.
- Mawardi. 2005. "Menyadap Getah untuk Onderneming: Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Karet di Aceh Timur, 1907-1939". *Tesis S-2* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Said, Muhammad Said. 1981. *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada.
- Sufi, Rusdi dan Wibowo, Agus Budi. 2004. *Budaya Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Sulaiman, M. Isa. 2006. "From Autonomy to Periphery: A Critical Evaluation of the Acehnese Nationalist Movement", in: Anthony Reid (ed.), *Verandah of Violence: The Background of Aceh Problem*. Singapore and Seattle: Singapore University Press and University of Washington Press, 2006.
- Usman, Abdul Rani dkk.2009. *Budaya Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009
- <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>
- <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>

KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Dr. T.M. Jamil, M.Si

Pengantar

HAK suara rakyat di pemilu merupakan bagian dari satu standar internasional. Itu merupakan jaminan bagi setiap orang untuk dapat memilih, dan juga dipilih dalam masyarakat demokratis. Batas-batas keterpilihan ini harus jelas dan ditetapkan, sehingga daerah pemilihan relatif setara dalam kekuatan pemilih. Keadaan itu akan membuat setiap pemilih memberikan suara yang memiliki tingkat kesetaraan setinggi mungkin. Persaingan di daerah pemilihan yang memiliki populasi setara (*Equi-populous*) juga memungkinkan pemilih memiliki hak suara yang sama, dan sejajar dalam pemilihan wakil rakyat.

Konsep ideal tersebut sedang dirunut dalam relasi sosial yang terus berkembang. Meski politik kekerabatan dewasa ini cukup menjadi banyak perbincangan, namun hak suara bagi setiap orang tetap saja menjadi hak mutlak. Apabila ingin mengetahui hubungan sikap politik dan non-politik dengan pola-pola perkembangan, maka hal itu harus dapat dipisahkan secara jernih.

Yang terus disadari bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada dasarnya memiliki kecenderungan yang bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang ada memaksa tumbuhnya pemilahan tegas antara penguasa dengan rakyat yang kerap disebut sebagai akar rumput. Masing-masing dipisah melalui tatanan hirarkis yang ketat. Sehingga kebanyakan orang masih setia mengekspresikan diri kepada penguasa dalam ragam tingkah.

Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercermin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. Pendekatan struktural semacam inilah yang lalu melahirkan konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu dan lain sebagainya.

Menurut Efriza dalam *Political Explorer* (2012:492) struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa juga nasionalisme. Semua aspek tersebut diprediksi mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

Stratifikasi sosial dalam kehidupan politik dapat kita lihat dari beberapa kecendrungan, antara lain patronase, dan neo-patrimoniaalistik. (lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik). Budaya politik masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Kecendrungan *patronage*, pola hubungan ini merupakan salah satu budaya politik yang menonjol, saya pikir termasuk juga di Propinsi Aceh ini. Bentuknya bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam itu dapat ditelusuri dilingkup pelaku politik.

Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya. Tak heran, masih banyak diantara keluarga kita yang meminta pendapat untuk memilih siapa di pemilu legislatif atau pemilu gubernur pun bupati/walikota. Mereka tidak berarti tak memiliki kemampuan memilih, tapi lebih disebabkan adanya pengaruh secara personal yang memungkinkannya untuk mengambil keputusan yang sama. Atau paling tidak untuk membuat komparasi sebelum menjatuhkan pilihan.

Orientasi politik individual semacam itu dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, kelekatan dan sempitnya cara menilai obyek atau mungkin peristiwa politik. Hal ini dapat diartikan bahwa sikap warga negara mengenai respon dan aktivitasnya terhadap sistem politik yang ada masih memerlukan patron, dan itu ditentukan oleh budaya di lingkungannya.

Sejauh ini pembahas, masih terus mendapat pertanyaan atau dimintai pandangan tentang siapa yang mesti dipilih. Tentu saja amat sulit, dan tidak boleh mengarahkan pilihan pada orang per orang, kecuali terus membangun persepsi yang lebih baik pada budaya politik agar mampu mempengaruhi penerimaan warga pada putusan-putusan politik, dan konteks perilaku politik yang dibingkai sistem

politik yang ada. Bukankah pemilih terus belajar dan menilai usai memilih?

Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial dalam hal ini sistem politik. (lihat <http://id.shvoong.com/law-and-politics>). Pada sistem politik, perhatian utamanya pada sistem sebagai suatu keseluruhan, termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi terhadap daerah atau bangsa seberapa besar atau kecil, seberapa kuat dan lemah. Objek pribadi sebagai aktor politik meliputi isi dan kualitas, bukan isi tas pribadi. Yang mengikat kewajiban politik seseorang pada norma-norma, serta kompetensi setiap orang dalam berhadapan dengan sistem politik. Sikap ini berkaitan dengan rasa percaya diri, dan permusuhan yang biasa menyeruak di masyarakat.

Dalam realitas sehari-hari rasa percaya diri atau ego kelompok dan sikap bermusuhan sering menjadi pemandangan dalam bentuk kualitas politik, yakni antara kerja sama dan konflik. Dua hal ini dapat dibangun dalam bentuk kerja sama, tetapi juga kerap (dapat) diarahkan pada suatu benturan kepentingan yang berujung konflik politik. Sebab budaya politik suatu masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan interaksi yang ada di masyarakat itu sendiri. Proses yang dikenal sebagai sosialisasi politik, dimana anggota masyarakat mengalami, menyerap dan menghayati nilai-nilai politik yang saling mempengaruhi. Peta jalan untuk mewujudkan tatanan demokrasi memang masih panjang, berliku dan timpang. Untuk itu, pendidikan politik yang terus-menerus sangatlah penting, dan tak boleh berhenti. Termasuk melalui kegiatan-kegiatan seperti hari ini. Berikut akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan Tema Diskusi kita hari ini. Semoga Bermanfaat untuk bangsa dan negeri ini.

Situasi Budaya Politik

Dari peta Pilkada 2018 dan Jelang Pilpres 2019 yang akan kita nikmati bersama, dapat diasumsikan bahwa para elite politik beserta para mitra politiknya telah memetakan secara jelas tentang alokasi dana pemenangan ke masing-masing kontestan yang akan bersaing di Pilkada suatu daerah. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, para elite politik berdasarkan analisisnya telah mampu memprediksi tentang standar biaya yang harus dikeluarkan para kontestan Pilkada dan mungkin Pilpres yang ingin meraih kemenangan.

Tentunya fenomena ini tidak mungkin kita hanya menyalahkan para kontestan Pilkada atau para elite politik secara sepihak. Namun, yang patut kita renungkan mengapa masyarakat masih saja ikut terlibat aktif sebagai bagian dari siklus “politik uang” tersebut. Tolak ukur kemaslahatan sistem demokrasi sejatinya tidak hanya diukur dari sistem tatanan hukum dan kebijakan politik semata, tetapi kematangan sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas kebudayaan politik yang tumbuh dalam aktivitas masyarakatnya.

Suka tidak suka, dibalik antusias warga dan pemerintah dalam meng-agungkan sistem demokrasi, terdapatnya celah dan potensi untuk menghilangkan nilai demokrasi secara praktis. Maka dari itu, tidak berlebihan rasanya jika pembahas mengatakan bahwa sistem demokrasi dewasa ini hanya sebatas “bingkisan” yang menjaga kebudayaan korupsi. Sistem demokrasi kita telah salah jalan dan salah tujuan, tidak lagi mengedepankan etika politik dan keteladanan dalam berpolitik. Parahnya, sebaik malaikat-pun tokoh yang masuk dalam sistem demokrasi saat ini, dapat diprediksikan akan mejandi bagian dari sistem demokrasi yang melestarikan budaya korupsi itu. Na'uzubillahi Min Zhalik.

Pasar Politik dan Kerawanan Budaya

Berdasarkan studi pemikiran politik ekonomi, pasar politik cenderung diartikan sebagai proses mengatur, memobilisasi, serta memasarkan gagasan dan praktik politik melalui modal politik yang dikelola oleh sekelompok pemain politik. Dalam perkembangan dinamika politik menjelang Pilkada atau Pemilu yang akan dihadapi,

secara tidak langsung telah membuka peluang besar bagi berkembangnya pasar politik di negeri ini. Masing-masing tim sukses (timses) berusaha untuk meluaskan teritorial pasar politik mereka dengan berbagai cara. Hasilnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk menang dalam daya saing pasar politik tersebut tidak tanggung-tanggung. Bahkan kadangkala dari mereka nekat untuk menjual aset-aset berharga milik keluarga mereka demi memenuhi kebutuhan finansial politiknya.

Beratnya “modal politik” dalam bentuk uang yang ditanggung para kontestan Pilkada secara tidak langsung telah mempengaruhi pemenang Pilkada nantinya untuk mengembalikan modal politiknya secara halus dengan tidak kita menyebutnya licik dan licin. Jika pemenang Pilkada tidak melakukan praktik korupsi tersebut, maka para mitranya yang akan melakukannya. Inilah namanya “lingkaran setan” yang masih berkembang dalam sistem, budaya politik dan proses demokrasi saat ini.

Pembahas saat ini tidak ingin dalam kondisi berspekulasi dengan mengatakan bahwa demokrasi di negeri ini tidak layak. Tetapi, konsepsi dan praktik demokrasi yang terjadi di “zaman now” mengalami paradoks atau kontradiksi. **Maka dari itu, patut dipertimbangkan bahwa seiring suksesnya Pilkada tahun ini ternyata tersimpan harga diri demokrasi yang tergadaikan.** Situasi ini diperparah oleh sistem sosial di Indonesia yang masih tersandung dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), minim wawasan politik dan jurang kesenjangan sosial semakin melebar. Jika hal ini tidak dibenahi secara serius, maka jangan harap perkembangan demokrasi di negara ini akan semakin baik. Prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya identik dengan musyawarah, transparansi, profesionalitas dan keteladanan politik. Namun pada kenyataannya disabotase oleh kebudayaan politik publik yang secara tidak langsung telah “memperkosakan” makna demokrasi menjadi politik transaksional dan penuh sandiwara politik. Harus diakui, inilah wajah demokrasi kita saat ini.

Nasib Kebudayaan dalam Demokrasi

Tidak ada yang salah dengan sistem demokrasi di Indonesia. Yang salah hanyalah subjek-subjek dari demokrasi tersebut. Banyak hasil penelitian yang menjelaskan tentang manfaat dari sistem demokrasi. Tidak hanya itu, upaya untuk meluruskan makna demokrasi terus dilakukan, sehingga demokrasi sering diregulasikan dengan khazanah Islam, *nation* dan modernitas.

Demokrasi merupakan suatu gagasan yang komplit dan memiliki potensi bias tafsir jika tidak diringi dalam bentuk perwujudan perilaku. Demokrasi tidak hanya identik dengan adagium dari rakyat, oleh rakyat dan (untuk rakyat,?) atau satu manusia satu suara. Tetapi Demokrasi juga identik dengan kedewasaan berpikir dan keteladanan berperilaku dalam mencapai kemaslahatan. Barangkali, makna demokrasi inilah yang ingin digagas oleh Soekarno ketika dirinya ingin membedakan mana model demokrasi liberal dan mana demokrasi kebangsaan khas Indonesia (*nation*).

Tanpa bermaksud untuk membahas makna demokrasi secara komprehensif. Jika melihat fakta konstelasi politik dewasa ini, nasib demokrasi di Indonesia semakin rapuh, dengan tidak menyebutnya tak berdaya dalam membenahi perpolitikan bangsa. Alasannya, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) malah semakin subur dalam sistem demokrasi. Hal inilah yang membuat kita harus merasa bertanggung jawab untuk membenahi sistem demokrasi di negara ini. Bukannya ingin menggantikan sistem yang lain sebagai pengganti demokrasi. **Namun demikian, kita patut bersyukur bahwa secara narasi teoritis, gagasan demokrasi masih diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia.**

Dalam konteks dinamika Pilkada Aceh, yang dialami oleh masing-masing daerah tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Berdasarkan observasi yang pernah penulis lakukan, daerah-daerah yang akan merayakan pesta demokrasi dalam bentuk Pilkada di Aceh masih berpotensi kuat terjadinya politik uang. Alasannya, sudah menjadi kebudayaan politik bahwa uang dan politik ibarat dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan.

Berkaitan dengan pergerakan massa, mungkin gagasan multikulturalisme tidak begitu dijadikan strategi andalan dalam kampanye politik di Aceh. Beda halnya dengan kampanye politik di Pulau Jawa, yang tetap semangat mengkampanyekan khazanah-khazanah multikulturalisme dalam membentuk kekuatan politik masing-masing kandidat Pilkada. Khusus di Aceh, narasi yang cenderung ditampilkan sering dikaitkan dengan kata “*awak tanyo dan awak kah*” (kelompok kita dan kelompok kamu) dalam mempertahankan kekuatan politik mereka.

Strategi Kebudayaan Politik Bangsa

Di abad ke-21 ini program-program penguatan politik berbasis kebudayaan telah menjadi barang langka. Padahal, tanpa kebudayaan, arah pergerakan politik akan menciptakan bom waktu terhadap kedaulatan bangsa. **Jika diizinkan untuk berimajinasi walupun buktinya bersifat faktual, kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini sejatinya bukanlah jati diri kebangsaan yang dirumus oleh *funding father* terdahulu. Untuk saat ini pula kita telah mengalami proses kerapuhan kebudayaan politik, dan kehilangan praktik politik yang berbudaya.**

Untuk memahami kebudayaan politik bangsa saat ini, mungkin kita harus bertanggung jawab tentang banyaknya pemimpin-pemimpin daerah yang terlahir dari rahim kebudayaan politik yang kita hadapi beberapa tahun terakhir ini. Suka tidak suka, saat ini belum ada tokoh atau elite politik manapun yang mampu untuk merumuskan mana politik kebangsaan khas Indonesia yang sesungguhnya. Yang tampak selama ini adalah imajinasi atau klaim-klaim kebudayaan politik secara sepihak, sehingga yang muncul hanyalah politik identitas masing-masing daerah. Sebagai contoh, Pulau Jawa berpolitik dengan politik identitas jawanya begitu pula Aceh, berpolitik dengan politik identitas ke-Acehan-nya. Dan kemudian semua politik identitas tersebut bukannya mendongkrak ketahanan dan kedaulatan politik bangsa, tetapi malah menggrogoti kedaulatan bangsa dengan tidak menyebutnya “menerkam” bangsa dari dalam.

Bangsa ini perlu diperkuat melalui praktik kebudayaan politik yang bermartabat. Kita sudah cukup sedih melihat bangsa ini tergilas atas persaingan global dengan persaingan inovasi yang begitu cepat. Siap tidak siap menghadapinya, bangsa ini akan tetap terkena imbas dari percikan-percikan persaingan tersebut. Lantas dimanakah dan bagaimakah kekuatan dan strategi bangsa ini untuk menghadapi ancaman negara yang bersifat laten tersebut?

Jawabannya tergantung dengan sejauhmana kesadaran dan keseriusan bangsa ini untuk membenah kekuatan budaya politiknya. Kebudayaan merupakan sistem sosial yang mengandung nilai secara komplit. Semua prinsip kesejahteraan dan keakraban terhimpun di dalamnya. Namun kompleksitas nilai tersebut belum mampu ditransformasikan oleh bangsa ini. Nilai religius misalnya, bukannya dijadikan sebagai landasan etika dalam berpolitik, tetapi malah digunakan untuk membakar isu SARA (Suku, Agama, Ras dan antar Golongan). Begitu juga nilai kebebasan, malah digunakan untuk menebarkan semangat perpecahan dan saling curiga yang berlebihan antar sesama. Sentimen-sentimen sosial telah membentuk kebudayaan baru dalam benak rakyat Indonesia. Apakah kebudayaan politik bangsa ini hanya megah pada masa prakemerdekaan semata, sehingga sulit bangkit untuk saat ini? Untuk itu, negara ini harus cepat disadarkan, kita harus berani keluar dari zona nyaman, siap untuk berkeringat bahkan harus siap mati demi membangun kebudayaan politik bangsa yang lebih bermartabat dan mampu bersaing secara global.

Jika merujuk dari Undang-undang No. 5/2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diputuskan pada 27 April 2017. Undang-Undang ini merupakan bagian dari tindak-lanjut amanat pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Dalam tulisan ini mungkin dapat dipahami dari empat butir dari Undang-Undang kebudayaan yang harus dijadikan pertimbangan sebagai upaya menjaga kebudayaan politik bangsa dari kerawanannya. Berikut empat butir tersebut adalah **Perlindungan kebudayaan oleh negara, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.**

Tanpa membahas konstitusional secara mendalam, yang ingin dipertegas dalam tulisan ini adalah bagaimana posisi peran dan tanggung jawab negara untuk melaksanakan empat butir strategis yang telah disebutkan di atas guna menyikapi perkembangan kebudayaan politik saat ini yang cenderung dapat mengarahkan negara pada pintu kehilangan jati diri ke-Indonesiaannya. Sudah saatnya pemerintah untuk tidak bermain-main dengan potensi kebudayaan yang dimiliki bangsa ini. Seyogyanya, semua kebijakan pemerintah baik bersifat politik, ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lainnya harus mengindahkan nilai-nilai kebudayaan politik kebangsaan.

Namun pertanyaan yang mendasarnya adalah, **sudahkah negara ini mampu merumuskan dan mengkonsepkan secara matang bagaimana praktik budaya politik kebudayaan yang sesungguhnya yang dapat diaplikasikan untuk saat ini?** Jawaban ini tidak mungkin dan tidak etis penulis jawab sendiri walaupun pembahas mungkin sedikit mengetahui jawabannya. Tidak bermaksud untuk tidak menjawab bukan berarti tidak paham atau angkuh. Tetapi jawaban tentang konsepsi dan praktik kebudayaan politik bangsa harus dijawab secara bersama-sama, kolektif dan terpadu oleh semua wakil-wakil yang paham tentang kebudayaan yang bertebaran di berbagai wilayah di nusantara ini.

Maka dari itu, tidak berlebihan rasanya jika mengatakan mengurus kebudayaan tidaklah semudah mengimajinasikan gagasan kebudayaan tersebut, karena di dalam kebudayaan tersirat harkat dan martabat rakyat yang harus dibimbing dan dilindungi oleh negara. Sekali lagi pembahas tegaskan, tanpa kebudayaan politik bangsa yang jelas, bangsa ini bergerak tanpa mengetahui jati diri. Wallahu ‘Aklam Bisshawab. (TM. Jamil, Ketua Program Doktor IPS, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)

PERAN SASTRA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA

Oleh Dr. Wildan, M.Pd.

Prolog

*Hati-hati dengan pikiranmu
Karena dari pikiranmu akan meluncur kata-katamu
Hati-hati dengan kata-katamu
Karena kata-katamu akan menjadi tindakanmu
Hati-hati dengan tindakanmu
Karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu
Hati-hati dengan kebiasaanmu
Karena kebiasaanmu akan membentuk karaktermu
Hati-hati dengan karaktermu
Karena karaktermu itulah akan terukir nasibmu*

Agak sedikit susah menerjemahkan ungkapan tema “karakter dan muatan budaya politik bangsa”. Apakah bangsa itu?

Menurut Anderson (dalam Wildan, 2011:7), bangsa (*nation*) adalah komunitas politik yang dibayangkan (*imagined community*) sebagai sesuatu yang inheren (asli), bersifat terbatas, sekaligus berkedaulatan. Bangsa dikatakan sebagai sesuatu yang dibayangkan kerana di antara para anggotanya sering tidak saling tahu, tidak saling kenal sebagian, tidak saling bertatap muka, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar satu sama lain, meskipun di benak mereka hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Dalam kenyataan, semua komunitas, jika lebih besar dari pada dusun-dusun primordial yang para anggotanya dapat saling bertatap muka langsung setiap hari, adalah komunitas imajiner. Anderson menyebut akar-akar budaya suatu bangsa dapat berupa umbul-umbul taman makam pahlawan, makam perajurit tak dikenal dan *cenotaph*, lagu kebangsaan, bendera nasional, kesamaan bahasa ibu, kesepahaman ideograf bahasa agama, bahasa media cetak, pandangan-dunia gambar-gambar (ukiraan, lukisan, relief, atau sketsa), dan seterusnya;

yang dengan ini semua kita dihadapkan pada sebuah dunia yang menggambarkan kenyataan imajiner menjadi sangat visual dan aural. Anderson menunjukkan dua struktur pembayangan itu, yaitu novel dan surat kabar: dua bentuk wahana yang menyediakan cara-cara teknis ‘menampilkan keterwakilan’ atau ‘meng-kini-kan kembali’ jenis komunitas imajiner yang adalah suatu bangsa. Pada akhirnya Anderson berkesimpulan bahwa ‘nasion(alisme) merupakan ‘benda ciptaan’. Teori Anderson yang abstrak tersebut diperkonkret melalui tinjauan ringkas terhadap novel *Semarang Hitam* (1924) karya Mas Marco Kartodikoro. Melalui novel itu Anderson hendak membuktikan bahwa bangsa adalah komunitas imajiner. Insan tak bernama ‘laki-laki muda kita’ sebagai okoh utama novel itu menggambarkan lanskap sosial Indonesia melalui kenaiifan susastera. Bagaimanapun, pembaca akan merujuk tokoh itu sebagai bagian dari tubuh kolektif bangsa Indonesia. Tanpa terkatakan pun identitas tokoh tadi sudah terbayangkan. Dari individu dari kolektif yang demikianlah akan dikupas karakter dan budaya politiknya!

Makna karakter dan upaya pemertahanan

Karakter sepadan dengan kata watak, tabiat, *peurangeui*, keperibadian, atau budi pekerti, yang pada akhirnya akan bermuara pada istilah jati diri seseorang. Karakter terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan sebagai landasan dalam cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Kebajikan terdiri atas nilai, moral, dan norma. Interaksi seseorang dengan orang lain membentuk karakter masyarakat, yang pada akhirnya menjelma sebagai karakter suatu bangsa (Kemdiknas, 2010:3).

Hal seperti itu oleh Sedyawati (1998:1--2) disebut sebagai jatidiri bangsa. Ada yang kasatmata seperti pada makanan atau pakaian. Ada yang berupa tingkah laku, yang baik atau yang tidak baik. Ada yang berwujud tutur kata atau budi bahasa, yang pantas atau tidak pantas, yang tepat atau tidak tepat. Ada pula yang sama sekali tidak terindera, yaitu pandangan hidup, wawasan, gagasa, konsep atau pengertian, dan sebagainya. Semua ini pada awalnya merupakan milik individu, bersimpul menjadi milik ras, dan akhirnya menjelmakan ciri kebangsaan.

Karakter bangsa ada yang terus bertahan, bergeser, berubah, bahkan menghilang. Upaya pemertahanan perlu dilakukan agar karakter yang baik tidak tergerus dari kehidupan. Karakter bangsa dapat diturunkan dan diajarkan dari generasi ke generasi. Dalam kaitan inilah Kemdiknas (2011) menawarkan delapan belas karakter yang diharapkan tercapai dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) bertanggung jawab.

Belajar dari kearifan lokal

Secara leksikal, frasa kearifan lokal berpadanan dengan *local wisdom*, kearifan atau kebijaksanaan setempat. Para pakar sering memadankan istilah kearifan lokal ini dengan pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), kecerdasan atau kecendekiaan lokal (*local genius*), cerlang budaya, kearifan budaya, kearifan kolektif, penemuan tradisi (*invention of tradision*), dan identitas atau kepribadian budaya (*cultural identity*) Hobsbawm, 1998; Sartini, 2004; Ridwan, 2007; Gunawan, 2008; Astra, 2009; Pattinama, 2009; Djalil, 2010, Salman, 2010; dan Wildan, 2013).

Bersyukurlah bangsa Indonesia diberi kekayaan sebanyak 1.340 kelompok etnik. Masing-masing kelompok etnik itu tentu memiliki kearifan lokal yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan mereka, termasuk persoalan politik. Bersyukur juga kita di Aceh hidup sembilan etnik (dengan bahasa dan sastra lokalnya masing-masing): Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, Jamee, Kluet, Singkel, Simeulu, dan Haloban (Wildan, 2010b:1). Kesemua etnik ini pun memiliki keunikan, keistimewaan, keutamaan, dan sebagainya yang menjadi kearifan lokal mereka. Mari kita belajar dari kegeniusan mereka guna mengembangkan budaya politik bangsa.

Barangkali agak sedikit mengada jika dikatakan bahwa rekaman terbaik perihal **kareakter politik** dan **budaya politik** sesuatu bangsa

adalah sastra. Tradisi pelantunan syair nina bobo, kebiasaan penyampaian kisah-kisah heroik (*haba*), *reusam* berbalas *seumapa*, dan sebagainya semuanya merupakan jalan ke arah ejawantah *peurangeui* melalui aktivitas budaya dan media sastra. Ajakan perjuangan di masa penjajahan disemarakkan melalui pembacaan *hikayat* atau syair-syair yang menggelora. Bahkan, yang lebih mendasar, bangsa dan negara Indonesia terbentuk pun berbasis sastra, yaitu puisi **Sumpah Pemuda**. Novel bawah tanah Mas Marco yang bercorak marxis, sajak-sajak semangat kebangsaan dari Muhammad Yamin atau Rustam Effendi atau Sanusi Pane, dan lain-lain semuanya menunjukkan pentingnya karya sastra dalam pembentukan karakter bangsa. Pesan-pesan dan kritik pembangunan di masa Orde Baru selalu ramai disalurkan melalui novel dan puisi balada. Tumbangnya Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi pun tidak terlepas dari pengaruh karya sastra. Demikianlah catatan sejarah kearifan dan kearifan yang tertoreh dalam perjalanan panjang bangsa kita.

Dalam sejumlah penelitian terdahulu ditemukan peran sastra dalam merefleksikan keadaan demikian. Menurut Sedyawati (1998:5), karya sastra sebenarnya bukan hanya mencerminkan, melainkan juga dapat menentukan keadaan bangsa. Contoh, di dalam novel *Tungku* karya Salman S. Yoga misalnya digambarkan sistem penyelesaian konflik dalam masyarakat Gayo melalui upacara *tungku*, sebuah upacara penegakan keadilan hukum dalam musyawarah adat. Di sini sastra mengambil peran sebagai **perefleksi**. Di pihak lain, manakala sastrawan Aceh menggubah dan membacakan hikayat *Prang Sabi* di zaman penjajahan, tentu peran **menentukan** (karakter berani dan cinta tanah air) yang terjadi.

Untuk kasus Aceh, karya sastra (dan pengarangnya) mampu dan berani menyibak sisi-sisi gelap berbagai ketimpangan dan/atau penyelesaian konflik sepanjang sejarah. Para pemangku kebijakan perlu sedikit berani menentukan arah pembinaan dan pengembangan sastra di Aceh, yang perannya sangatlah besar dalam membina dan mengembangkan karakter politik bangsa. Kita tidak ingin menjadi “bangsa rabun sastra dan lumpuh menulis,” tulis Taufik Ismail (1998). Oleh karena itu, kesinambungan tradisi perefleksian dan pewarisan

gagasan, nilai, perilaku berkarakter dan budaya bangsa melalui sastra perlu terus dipertahankan.

Epilog

Tawaran kecil penulis adalah (1) pengenalan, (2) pengajaran, dan (3) pengejawantah karakter dan budaya politik bangsa (Indonesia) berbasis kearifan lokal (Aceh) perlu terus dilakukan melalui peningkatan peran karya sastra dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berencana.

Rujukan

- Gunawan, Restu. 2008. "Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan dan Karya Sastra". Makalah disampaikan dalam Kongres Bahasa, 28—31 Oktober 2008, di Jakarta.
- Hobsbawm, Eric. 1988. "Introduction: Inventing Traditions". Dalam E. Dan T. Ranger (Eds.). *The Invention of Tradition*. Cambridge, Geat Britain: Cambridge University Press.
- Ismail, Taufik. 1998. "Tentang Cara Menjadi Bangsa Rabun Sastra dan Lumouh Menulis Pula, sehingga Jelas di Dunia Kita Pakar Terkemuka". Makalah pada *Kongres Bahasa Indonesia VII* Jakarta, 26—30 Oktober 1998.
- Kemdiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan dan Karakter Bangsa*. Bahan Pelatihan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum.
- , 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Puskurbuk.
- Pattinama, Marcus J. 2009. "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal: Studi Kasus di Pulau Buru—Maluku dan Surade—Jawa Barat". *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009:1—2.

- Ridwan, Nurma Ali. 2007. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal".
Jurnal *Ibda'*, Vol. 5, No. 1, Januari—Juni 2007:27—38.
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati". Jurnal *Filsafat*, Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2004.
<http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewPDFInterstitial/.../41> Diunduh tanggal 25 April 2011.
- Sedyawati, Edi. 1998. "Sastra dan Jatidiri Bangsa". Makalah pada
Kongres Bahasa Indonesia VII Jakarta, 26—30 Oktober 1998.
- Wildan. 2010a. "Doktrin Nasionalisme dalam Novel A. Hasjmy".
Dalam jurnal *Lingua* Voleme 5, Nomor 2, Desember 2010.
- , 2010b. *Kaidah Bahasa Aceh*. Banda Aceh: Geuci.
- , 2011. *Nasionalisme dan Sastra*. Banda Aceh: Geuci.
- , 2013. Kearifan Lokal dalam Novel *Seulusoh* Karya D Kemalawati." Dalam Jurnal *Bahasa dan Seni*, Nomor 1, halaman 30—39, Februari 2013. <http://www.malamg.ac.id>

PEUTUA BEUNA, MITOS RAJA YANG BIJAKSANA

Oleh: Yusri Yusuf

Alkisah, pada masa Pemerintah Raja Jeumpa di Aceh, di sebuah wilayah (sagoe) hidup seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tak diketahui dari mana asalnya, dan di mana dia mendalami ilmu agama sosial dan politik. Dia memiliki postur tubuh kekar, tidak terlalu tinggi, berkulit putih, dan berjenggot, tampak bagai orang Yaman. Penampilannya sangat bersahaja dan selalu mengenakan jas, peci serta kain sarung. Karena kearifan dan kepiawaiannya menangani dan menyelesaikan berbagai masalah, dia diangkat sebagai Mufti Raja. Apa saja yang difatwakan olehnya adalah benar, maka dia dimitoskan sebagai Petua Benar (Peutua Beuna).

Pada masa kemuftiannya, tampillah seorang pemuda reformis yang bernama Dobransah. Diam-diam Dobransah mensosialisasikan gagasan demokrasi pada rakyat di wilayah sagoe itu. Ia tampil membela kepentingan rakyat dari praktek anarkhi para meuntroe, hulubalang, dan penggawa kerajaan beserta opas-opasnya. Dobransah membuka hati dan pikiran masyarakat tentang hakekat kemanusiaan, hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara, sebagai individu, sebagai masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Gagasan dan kegiatan Dobransah yang menentang kebijakan para Meuntroe, hulubalang dan penggawa kerajaan beserta opas-opasnya sampailah ke telinga Raja. Akibatnya, Dobransah dipermaklumkan oleh kerajaan sebagai orang yang hendak melakukan makar. Dengan kepintaran mendramatisasikan persoalan dan membubungnya dengan fitnah, Tuan Meuntro dan para hulubalang melaporkan kegiatan Dobransah pada Raja. Raja pun menjadi murka dan segera membuat rapat dengan memanggil para meuntroe, para hulubalang, para penggawa, dan mufti kerajaan. Rapat itu memutuskan: *pertama*, negeri dalam keadaan bahaya; seluruh negeri berlaku hukum perang. *Kedua*, Dobransah dijatuhkan hukuman mati; siapa yang dapat menangkapnya hidup atau mati akan diberikan hadiah.

Selanjutnya, Raja memerintahkan pengawal kerajaan, dan para opas untuk mencari dan membawa ke istana hidup atau mati pemuda

Dobransah beserta pengikut-pengikutnya. "Apabila ia masih hidup akan dilaksanakan hukum pancung di depan istana; jika ia sudah mati arakkan mayatnya keliling kotaraja", begitu titah sang Raja.

Maklumat Raja tetang negeri dalam bahaya dan hukuman mati terhadap Dobransah segera tersebar ke seluruh negeri. Anak negeri mulai ketakutan, tidak berani berpergian, tidak berani keluar malam, tidak berani berkumpul, tidak berani bicara, dan sesama mereka saling curiga. Karenanya, terjadilah huruhara dan malapetaka dalam negeri yang dulunya aman, makmur, dan sejahtera.

Saat itu, Sang Peutua mulai merasakan adanya konspirasi dalam Istana untuk merebut kekuasaan dan Dobransah sebagai tumbalnya; fatwa Raja dapat dijadikan dasar untuk mengamankan lawan politik, dan kesempatan memperoleh kekayaan. Peutua Beuna mulai berfikir tentang bagaimana cara *menjaga keutuhan negeri, menegakkan wibawa Raja, dan menyelamatkan nyawa rakyat yang tidak berdosa beserta harta bendanya*. Dobransah yang Peutua kenal tidak seperti yang diceritakan Tuan Meuntroe.

Setelah rapat berakhir Peutua mohon pamit pada Raja dan langsung pulang. Sampai di rumahnya, Sang Peutua memanggil dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membawa Dobransah ke rumahnya untuk diamankan. Setelah satu hari dan satu malam lamanya, Dobransah berhasil dibawa ke rumah Sang Peutua.

Petua bercerita pada Dobransah tentang fitnah yang dialamatkan padanya dan keputusan Raja tentang dirinya. Dobransah pun memakluminya dan menyerahkan dirinya pada kebijakan Peutua.

Malam itu, Peutua memerintahkan anak buahnya untuk mengambil seekor kerbau jantan milik Dobransah dan membawa ke tempatnya secara diam-diam dan pastikan tidak ada seorang pun yang tahu. Pada anak buah lainnya, Peutua memerintahkan untuk mencari satu helai kain kafan beserta peralatan pengkafanan mayat. Anak buah lainnya menyiapkan kerenda. Setelah memberi semua perintah, Sang Peutua lalu keluar rumah dan menebang sebatang pohon pisang.

Besok pagi, Dobransah dan batang pisang dibungkus dengan kain kafan dan dibaringkan di dalam kerenda. Kerbau jantan diikat matanya dengan kain kuning. Sang Peutua beserta anak buahnya, kerabat-

kerabatnya, dan masyarakat sekitarnya berjalan mengarak kerenda itu mengelilingi Kotaraja menuju Istana. Paling depan berjalan Peutua Beuna, di belakangnya dua orang pengawalnya menghela kerbau, berikutnya delapan orang anak buahnya memikul kerenda, paling belakang berjalan sejumlah kerabat-kerabat dan masyarakat. Sambil berjalan mereka mengancungkan tangan ke atas dan berkata, "hidup Raja, hidup Raja, hidup Raja". Demikianlah keadaannya sampai mereka tiba di depan istana Raja.

Set sampai di depan Istana, Peutua Beuna langsung menaiki tangga istana dan menghadap Raja. Entah apa yang dibicarakannya pada Raja saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Pembicaraan itu tampaknya sangat rahasia. Tuan Meuntroe, para hulubalang, dan penggawa kerajaan tidak berani mendekat. Lima menit kemudian, Sang Raja berdiri dan bertitah agar kerenda mayat Dobransah dinaikkan ke beranda istana. Raja menghampiri kerenda dan berkata, "Inilah hukuman bagi orang yang menentang Kerajaan". Kemudian, Raja meminta pada Peutua untuk membuka wajah orang yang terbaring dalam kerenda itu. Peutua Beuna pun segera membukanya. Wajah itu terlihat oleh Meuntroe, para hulubalang, penggawa kerajaan, dan para pembesar istana lainnya. Mereka menyaksikan bahwa wajah dalam kerenda mayat itu adalah benar Dobrasah yang telah dieksekusi oleh Peutua Beuna.

Setelah itu, Sang Raja memerintahkan Peutua Beuna agar kerenda mayat Dobransah disemayamkan di bilik khusus untuk melampiaskan dendam raja. Peutua Beuna memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan kerbau jantan ke dalam kandang Raja. Sementara itu, di luar istana tetap terlihat rakyat berkerumun dan bersorak "hidup Raja, hidup Raja".

Sampai di bilik khusus, Peutua bergegas mengeluarkan Dobransah dari dalam kerenda dan menutup kembali kerenda itu untuk tidak bisa dibuka selamanya. Sepuluh menit kemudian, kerenda mayat Dobransah dibawa keluar, diturunkan dari istana, dan diusung menuju pemakaman oleh para pengawal dan anak buah Peutua Beuna beserta beberapa prajurit khusus yang kesetiiaannya tidak diragukan Raja. Pemakaman itu terletak di sebuah bukit berdekatan dengan rumah Peutua Beuna.

Sepulang dari kuburan Sang Peutua langsung menghadap Raja secara rahasia. Raja memuji kebijakan Peutua dengan berkata, "**benar, benar, benar**". Peutua telah menjaga wibawa kerajaan dan telah menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa secara bijaksana. Dobransah sebenarnya adalah pemuda yang baik, berkomitmen dan berintegritas terhadap kebaikan negeri, tentu sangat dibutuhkan kerajaan telah terselamatkan.

Setelah itu, Petua Beuna memperhadapkan Dobransah dengan Raja dan mereka bertiga berbicara sangat rahasia dan serius. Raja meminta pada Dobransah untuk mendiskripsikan segala persoalan yang dihadapi, dan dialami rakyat negeri itu beserta pembesar kerajaan yang terlibat. Sejak itu, Dobransah menetap di istana secara rahasia dan mejadi informan Raja secara diam-diam. Sang Peutua diberi wewenang khusus oleh Raja untuk mencari fakta tentang berbagai pelanggaran kemanusiaan dan harta benda yang dilakukan oleh pembesar kerajaan dan kaki tangannya.

Satu bulan kemudian, Peutua Beuna telah mengumpulkan sejumlah fakta tentang pelanggaran kemanusiaan dan harta benda beserta orang yang terlibat baik sipil maupun militer. Sang Peutua mendiskusikan dengan Raja tentang hukuman dan keadilan yang harus ditegakkan di kerajaan itu.

Sebagai seorang ulama yang berpegang pada paradigma "*hablum minallah dan hablum minannas*", Peutua Beuna mengusulkan pada Raja bahwa hukuman kurungan dan tuntutan-menuntut melalui mahkamah tidak memberi kepuasan bagi rakyat, dan kondisi itu dapat menyimpan dendam yang berkepanjangan. Menurut saya, kata Peutua Beuna, "Daulat Tuanku panggil semua pembesar kerajaan yang telah melakukan pelanggaran kemanusiaan dan diminta pengakuannya atas dosa-dosanya pada negeri ini. Mereka harus menyatakan penyesalan dan minta maaf pada rakyat". Selanjutnya, mereka harus bersedia: (1) mengembalikan harta benda yang dirampas kepada pemiliknya; (2) mengawini gadis yang diperkosanya, asal jangan memiliki empat orang; (3) menyantuni anak yatim dan janda yang ayahnya dibunuh secara terus menerus sampai anak yatim itu berkeluarga dan janda itu meninggal; (4) meminta maaf di hadapan rakyat atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Untuk itu mereka membiayai kenduri negeri yang kita laksanakan

selama tujuh hari. Setelah Peutua Beuna selesai menyampaikan usulan, Raja berkata "benar, benar".

Sosok Peutua Beuna telah tampil sebagai pemberi keadilan pada masyarakatnya di masa lalu. Keadilan seperti itu mungkin juga dijumpai pada kerajaan lain atau belahan dunia lainnya. Bagi sebahagian masyarakat Aceh sosok Petuah Beuna telah menjadi mitos dalam penyelesaian terhadap pengkhianatan oleh para pembesar kerajaan terhadap Raja dan Negerinya. Bagi Negera Republik Indonesia, cerita ini mungkin dapat menginspirasi warga negara yang setia pada Negara Republik Indonesia tercinta.

www.mpr.go.id